



LKIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tahun Anggaran 2024**

Disusun Oleh:
**TIM PELAPORAN
BNNP KALTIM**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini, dapat diselesaikan sesuai rencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Kementrian/Lembaga menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Oleh karena itu dalam rangka mendukung laporan kinerja, BNNP Kalimantan Timur wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Kepala BNN.

Penyusunan laporan kinerja ini, mengacu kepada Keputusan Kepala BNN Nomor 388 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP dan BNNK/Kota. Laporan ini pula disusun berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024, Renstra BNN menjadi acuan BNNP Kalimantan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dikewilayahan, sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya “*good governance and clean governance*”.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNNP KALTIM atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi vertikal BNN dalam menyelenggarakan

P4GN di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNNP KALTIM selaku penyelenggara negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNNP KALTIM dalam tahun 2024 yang meliputi kinerja Satker di lingkungan BNNP KALTIM dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun berikutnya dan merupakan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan BNNP Kalimantan Timur dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Akhirnya, saya berharap agar Laporan Periodik Pelaksanaan Kinerja Program dan Anggaran 2024 juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNNP KALTIM secara keseluruhan demi meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan berkah atas usaha kita semua.

Samarinda, 20 Januari 2025

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Timur**



Rudi Hartono, S.H.,S.I.K

IKTHISAR EKSEKUTIF

BNNP Kaltim berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 mempunyai dan melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara efektif dan efisien dan telah menetapkan target dan sasaran kinerja yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Realisasi target kinerja ditetapkan melalui Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatkan Penanganan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif dan Proporsional serta berkinerja tinggi.

Implementasi Program P4GN mengacu pada Rencana Program Kerja BNNP Kalimantan Timur Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja BNNP Kaltim Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 13 (Tiga Belas) Sasaran Kegiatan dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun capaian realisasi target kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan dengan 5 (Lima) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :
 1. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan target 3 Kab/kota tercapai 2 Kab/Kota.
 2. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan target 3 Kab/kota tercapai 3 Kab/Kota.

3. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dengan target 3 Kab/Kota tercapai 3 Kab/Kota.
 4. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" dengan target 1 Kawasan telah tercapai 1 Kawasan.
 5. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi dengan target 2,8 tercapai 3,7.
- b. Bidang Rehabilitasi dengan 5 (Lima) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :
1. Persentase Penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 68 % tercapai sebesar 82,03 %.
 2. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan target 10 Orang telah tercapai sejumlah 22 Orang.
 3. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dengan target 1 Lembaga tercapai 1 Lembaga.
 4. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dengan target 8 Unit telah tercapai 8 Unit.
 5. Nilai Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur dengan target Indeks 3,42 tercapai dengan raihan nilai Indeks 3,75.
- c. Bidang Pemberantasan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :
1. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 target sebanyak 15 Berkas Perkara, tercapai sebanyak 49 Berkas Perkara

2. Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan target sebesar 100, tercapai sebesar 100 (100 %).
 3. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba target sebesar 100, tercapai sebesar 100 (100 %).
- d. Bagian Umum terdiri dari 3 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :
1. Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur dengan target 91 tercapai 98,68 Indeks.
 2. Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran dengan target 3 BNN Kab/Kota tercapai 3 BNN Kota.
 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Timur dengan target 98,95 tercapai 97,35
 4. Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target dengan target 3 BNNK tercapai 3 BNN Kab/Kota.
 5. Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal dengan target indeks 78 tercapai sebesar 79,44.

Untuk mengukur sasaran tersebut dilaksanakan dengan cara menghitung/ mengidentifikasi terhadap hasil dan sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan maupun melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung kepada penerima program.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa dari 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2024, diperoleh bahwa ada 7 (tujuh) IKK yang melebihi target ($\geq 100\%$) dan mencapai target (= 100%) sebanyak 9 (sembilan) IKK , dan 2

(dua) IKK yang tidak mencapai target ($\leq 100\%$) sehingga diperoleh rata-rata capaian kinerja BNN Provinsi Kaltim T.A 2024 sebesar 121,36%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program P4GN terlaksana secara professional, akuntabel, efektif dan efisien melalui kerja keras dan dukungan dari seluruh stakeholder Provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi anggaran anggaran BNN Provinsi Kaltim Tahun 2024 Sebesar **Rp. 7.902.833.000,-** atau **96,05%** dari pagu anggaran sebesar **Rp.7.590.848.131,-** dengan jumlah Sisa anggaran sebesar **Rp. 311.784.869,-**. Untuk total pagu anggaran untuk BNNP dan BNNK Wilayah Kaltim sebesar **Rp.13.150.942.000** dengan Realisasi mencapai **Rp. 12.777.517.071 [97 %]** dengan sisa anggaran sebesar **Rp 373.424.929**. Berdasarkan alokasi anggaran yang ada pada tahun 2024 khusus BNNP Kaltim, telah berhasil melaksanakan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **96,05 %** dengan nilai IKPA (Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran) sebesar **97,35**.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	7
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	8
D. Struktur Organisasi	10
E. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Program Kinerja.....	12
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	14
C. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Analisis Capaian Kinerja.....	21
B. Akuntabilitas Keuangan	117
BAB IV PENUTUP	110
LAMPIRAN	
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	14
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
Tabel 3 Realisasi Kinerja BNNP Kaltim Tahun 2024.....	21
Tabel 4 Rekapitulasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi.....	26
Tabel 5 Rekapitulasi Jumlah Kabupaten /Kota Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi.....	26
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional pada Dektari.....	30
Tabel 7 Capaian Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”.....	36
Tabel 8 Perbandingan Realisasi dengan Indeks Dektara secara Nasional.....	39
Tabel 9 Realisasi IKP Wilayah BNNP Kaltim dan Jajaran Tahun 2024.....	45
Tabel 10 Jumlah Kawasan Rawan diwilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjadi waspada Periode 2020 - 2024.....	51
Tabel 11 Realisasi Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi Periode 2021-2024.....	56
Tabel 12 Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup.....	60
Tabel 13 Perbandingan Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan antara Nasional.....	61
Tabel 14 Realiasi Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang terlatih Periode 2021-2024.....	64
Tabel 15 Realisasi Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi SPM wilayah Provinsi Periode 2020-2024.....	68
Tabel 16 Realisasi Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Periode 2021-2024.....	71
Tabel 17 Realisasi Indeks kepuasan penerima layanan Rehabilitasi pada fasilitas Rehabilitasi BNN.....	75
Tabel 18 Realisasi Jumlah Berkas TPN yang P-21 Periode 2020 - 2024	79
Tabel 19 Realisasi Capaian Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan Tahun 2024.....	84
Tabel 20 Realisasi Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika.....	89
Tabel 21 Nilai Kinerja Anggaran BNNP Kaltim Periode 2020-2024	93
Tabel 22 Jumlah BNNK di wilayah Provinsi degan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target periode 2020 2024.....	98
Tabel 23 Nilai IKPA BNNP Kaltim Periode 2021-2024	103
Tabel 24 Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target Periode 2021- 2024.....	107
Tabel 25 Nilai Zona Integritas BNNP Kaltim dan BNNK Jajaran TA. 2024.....	113
Tabel 26 Jenis Belanja, Pagu Dipa dan Realisasi TA 2024.....	117

Tabel 27	Realisasi Anggaran BNNP Kaltim dan Jajaran Periode 2020-2024	119
Tabel 28	Capaian IKK yang Melebihi Target Tahun 2024.....	120
Tabel 29	Capaian IKK yang Sesuai Target Tahun 2024.....	121
Tabel 30	Capaian IKK yang Tidak Memenuhi Target Tahun 2024.....	122

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi Periode 2020 - 2024.....	28
Grafik 2 Persentase Capaian Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi Periode 2020 - 2024.....	29
Grafik 3 Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi Periode 2020 -2024.....	37
Grafik 4 Persentase Capaian Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi Periode 2020 - 2024.....	38
Grafik 5 Persen Capaian Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi Kaltim tahun 2021-2024.....	46
Grafik 6 Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” Periode 2020-2024.....	52
Grafik 7 Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *) Periode 2021-2024.....	57
Grafik 8 Persentase penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup.....	60
Grafik 9 Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih pada Satker BNNP Kaltim Tahun 2020 - 2024.....	64
Grafik 10 Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi Tahun 2020 - 2024.....	68
Grafik 11 Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Periode 2021-2024.....	72
Grafik 12 Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN Periode 2021-2024.....	75
Grafik 13 Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 Periode 2020-2024.....	80
Grafik 14 Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan Periode 2020-2024.....	85
Grafik 15 Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkoba dan Non Narkoba Periode 2020-2024.....	89
Grafik 16 Nilai Kinerja Anggaran BNNP Kaltim Periode 2020 - 2024.....	94
Grafik 17 Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target tahun 2020-2024.....	98
Grafik 18 Capaian Nilai IKPA BNNP Kalimantan Timur Tahun 2021- 2024.....	104
Grafik 19 Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target Periode 2021 - 2024	108
Grafik 20 Realisasi Nilai Zona Integritas Periode 2023-2024.....	113
Grafik 21 Realisasi Anggaran BNNP Kaltim dan Jajaran Periode 2020-2024	119

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1	Struktur Organisasi BNNP Kaltim	10
Gambar 2	Hasil Pengukuran IKRN Program Dayatif 2024.....	56
Gambar 3	Capaian Nilai Kinerja Satuan Kerja Emonev Kemenkeu.....	93
Gambar 4	Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran OMSPAN.....	103
Gambar 5	Capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas Tahun 2024.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan permasalahan multidimensi dan sangat kompleks karena berkaitan dengan permasalahan hukum, keamanan negara, kesehatan, ekonomi maupun sosial. Kejahatan narkotika adalah kejahatan terorganisir (*organized crime*), kejahatan lintas negara (*transnational crime*) dan bagian dari *proxy war* yang dapat menghancurkan ideology bangsa dan ketahanan nasional.

Sekitar 275 juta orang menggunakan Narkoba di seluruh dunia pada tahun 2020, dengan 36 juta orang sebagai *drug use disorder* (Press Release UNODC World Drug Report 2021, 24 Juni 2021). Berdasarkan Data Pusat Laboratorium Narkoba BNN, Oktober 2023 dimana telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru skala global (dunia) ada sekitar 1.230 jenis NPS, sementara di Indonesia sampai dengan saat ini sebanyak 93 *New Psychoactive Substances* (NPS) telah berhasil terdeteksi, dimana 90 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes dan 3 NPS belum diatur dalam Permenkes.

Hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperlihatkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika selama satu tahun terakhir tahun 2024 adalah 1,73 % yang artinya dari 10.000 orang penduduk Indonesia berumur 15 - 64 tahun terdapat 173 orang diantaranya terpapar narkotika selama satu tahun terakhir atau setara 3,337 juta jiwa penduduk berumur 15 - 64 tahun (total penduduk Indonesia berumur 15 - 64

tahun adalah 192.937.354 jiwa). Sementara angka prevalensi pernah pakai penyalahguna narkoba tahun 2023 adalah 2,20% yang artinya 10.000 orang penduduk Indonesia berumur 15 - 64 tahun terdapat 220 orang diantaranya pernah terpapar Narkoba atau setara 4,24 juta jiwa penduduk berumur 15 – 64 tahun. Terjadi penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 (3,337 juta jiwa) dibandingkan tahun 2021 (3,662 juta jiwa) sebesar 11,28% dalam setahun pakai dan 10,93% pernah pakai. Penurunan ini kemungkinan terkait dengan menurunnya kasus ODHIV (Orang Dengan HIV) dalam beberapa tahun terakhir (Kemenkes, 2022).

BNN telah melakukan pengukuran tingkat kepercayaan masyarakat melalui survei Indeks Kepercayaan Masyarakat tahun 2023 menghasilkan data Indeks Kepercayaan Masyarakat sebesar 87,27 dengan kategori “sangat baik” (dalam skala 84,01 - 100). Adapun BNNP Kaltim mencapai sebesar 89,46. Dan pada tahun 2024 ini mendapat nilai indeks sebesar 88,33, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023 tetapi tetap pada range kategori “sangat baik” dan diatas skala indeks nasional 87,8. Angka indeks yang menunjukkan penilaian yang sangat baik memberikan arti bahwa masyarakat memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap BNN dalam setiap program yang dijalankan oleh BNN dan masyarakat menaruh harapan yang besar kepada BNN untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang muncul akibat adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

BNN juga telah melaksanakan survei indeks P4GN, pada tahun 2024 ini BNNP Kaltim mendapat peringkat kedua tertinggi setelah BNNP DIY (71) untuk tingkat BNNP yaitu sebesar 70,1 /kategori Efektif (range 60 - 80) dalam arti “hasil capaian

kinerja sesuai batas nilai ideal dan diatas nilai nasional sebesar 65,1. Indeks P4GN merupakan tolak ukur dalam mengukur capaian keberhasilan pelaksanaan P4GN di wilayah.

Kejahatan narkoba yang kian meresahkan dan membahayakan masa depan bangsa telah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan permasalahan narkoba sebagai salah satu isu strategis yang diangkat dalam misi Asta Cita ke-7. Presiden juga menguatkan “Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba” menjadi program prioritas ke-6 dalam rangka mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai tindak lanjut atas komitmen dan tekad Presiden, Kemenkopolkam telah membentuk “Desk Pemberantasan Narkoba” sebagai langkah untuk mengakselerasi penanganan permasalahan narkoba pada instansi pemerintah terkait. Pada tahun transisi perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang maupun menengah ini, BNN melakukan transformasi arah kebijakan dan strategi dalam penanganan permasalahan narkoba untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman narkoba dan mewujudkan visi Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

BNN menetapkan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi yang menjadi fokus dalam upaya penanganan permasalahan narkoba yaitu **1) Penguatan Kolaborasi**; Penguatan Kolaborasi dilakukan dengan membangun komunikasi dan koordinasi bersama pemangku kepentingan untuk pelaksanaan P4GN serta mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan P4GN di wilayah. Kolaborasi ini penting, sebab permasalahan narkoba melibatkan berbagai aspek yang saling

terkait dan kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan yang holistik dan multi-sektoral dalam penanganannya. **2) Penguatan Intelijen;** Penguatan Intelijen merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung kebijakan P4GN, mencakup berbagai upaya yang difokuskan pada pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang akurat dan relevan guna mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan narkoba secara lebih efektif melalui pembangunan big data intelijen guna mendukung kebijakan P4GN serta intensifikasi kegiatan *surveillance*, peningkatan kapasitas SDM Intelijen dan penguatan *drug signature analysis*. **3) Penguatan Wilayah Pesisir dan Perbatasan Negara;** dilakukan dengan memperkuat ketahanan masyarakat pada wilayah pesisir dan perbatasan negara untuk menangkal penyelundupan narkoba serta dengan memperkuat sistem pengawasan jalur pelintasan antar negara. **4) Penguatan Kerja sama dengan Negara Perbatasan;** dilakukan melalui pembangunan koordinasi yang lebih intensif dengan aparat penegak hukum di negara tetangga sehingga diharapkan dapat menciptakan jaringan pertahanan yang lebih solid dalam memutuskan jalur distribusi narkoba di wilayah Indonesia dan negara tetangga. dan **5) Tematik dan Ikonik;** Strategi ini dilakukan dengan melalui intervensi langsung di lapangan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan permasalahan narkoba yang aktual di masing-masing wilayah. Melalui pendekatan tematik dapat menargetkan permasalahan yang spesifik seperti penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar, pekerja atau masyarakat di daerah rawan. Sedangkan pendekatan ikonik mengarahkan perhatian pada wilayah atau isu-isu yang menjadi simbol atau representasi dari masalah narkoba yang lebih besar, seperti daerah perbatasan

atau kota-kota besar yang menjadi pusat peredaran. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan dampak setiap program dengan merespon permasalahan yang ada dimasyarakat dengan cepat dan tepat. Intervensi langsung ini mencakup berbagai aktivitas seperti kampanye pencegahan, rehabilitasi berbasis komunitas, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan partisipasi aktif dalam memerangi narkoba.

BNN Provinsi Kalimantan Timur membawahi 3 (tiga) BNNK yaitu BNNK Samarinda dan BNNK Balikpapan dan BNNK Bontang. Sementara wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Sehingga masih terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota yang belum terbentuk BNNK. Hal tersebut menjadikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program P4GN oleh BNNP Kaltim, mengingat luas wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 127.267,52 km² dan luas wilayah lautan 25.656 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 3.752.605 jiwa. Selain itu letak geografis Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia mempunyai banyak akses/pintu masuk yang menjadikannya sangat rawan penyeludupan dan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan *Indonesia Drugs Report 2023* yang dilakukan Puslitdatin BNN tentang Kawasan Rawan Narkoba, terdapat 166 kawasan rawan di Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam kategori Bahaya dan Waspada, dengan rincian fakta tersebut maka tantangan BNNP maupun BNN Kabupaten/Kota lebih besar untuk merubah daerah bahaya dan waspada tersebut menjadi wilayah bersih narkoba.

Tantangan sebagaimana diuraikan diatas menjadi semakin berat dengan maraknya peredaran narkoba jenis baru yang dilaporkan. Untuk mengatasi hal tersebut, BNNP Kaltim sebagai instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dituntut untuk semakin gigih melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba, terutama dengan menggerakkan stakeholder dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Upaya strategis tersebut dilakukan BNNP Kaltim melalui program dan kegiatan di empat bidang utama yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan dan Bidang Umum sebagai pendukung manajemen.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, BNN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Kinerja ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah termasuk BNN wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga,

yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (**Good Governance**).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional RI Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

10. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN Tanggal 08 Desember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
11. DIPA Awal Petikan Tahun 2024 Nomor: SP DIPA- 066.01.2.682651/2023 Tanggal 30 November 2023, Kode *Digital Stamp* DS:5500-6105-0209-4186;
12. Surat Perintah Kepala BNNP tentang Penyusunan LKIP BNNP Kalimantan Timur TA 2024.
13. Surat Sekretariat Utama BNN Nomor:B/133/I/RO/PR.03.02/2025/BNN tanggal 13 Januari 2025 tentang Masa Penyampaian Laporan Kinerja Unit Kerja BNN Tahun 2024

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut BNNP Kaltim adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. BNNP Kaltim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional. BNNP dipimpin oleh Kepala.

2. Tugas

BNNP Kaltim mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional nomor 06 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota.

3. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Pelayanan administrasi BNNP.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

D. Struktur Organisasi

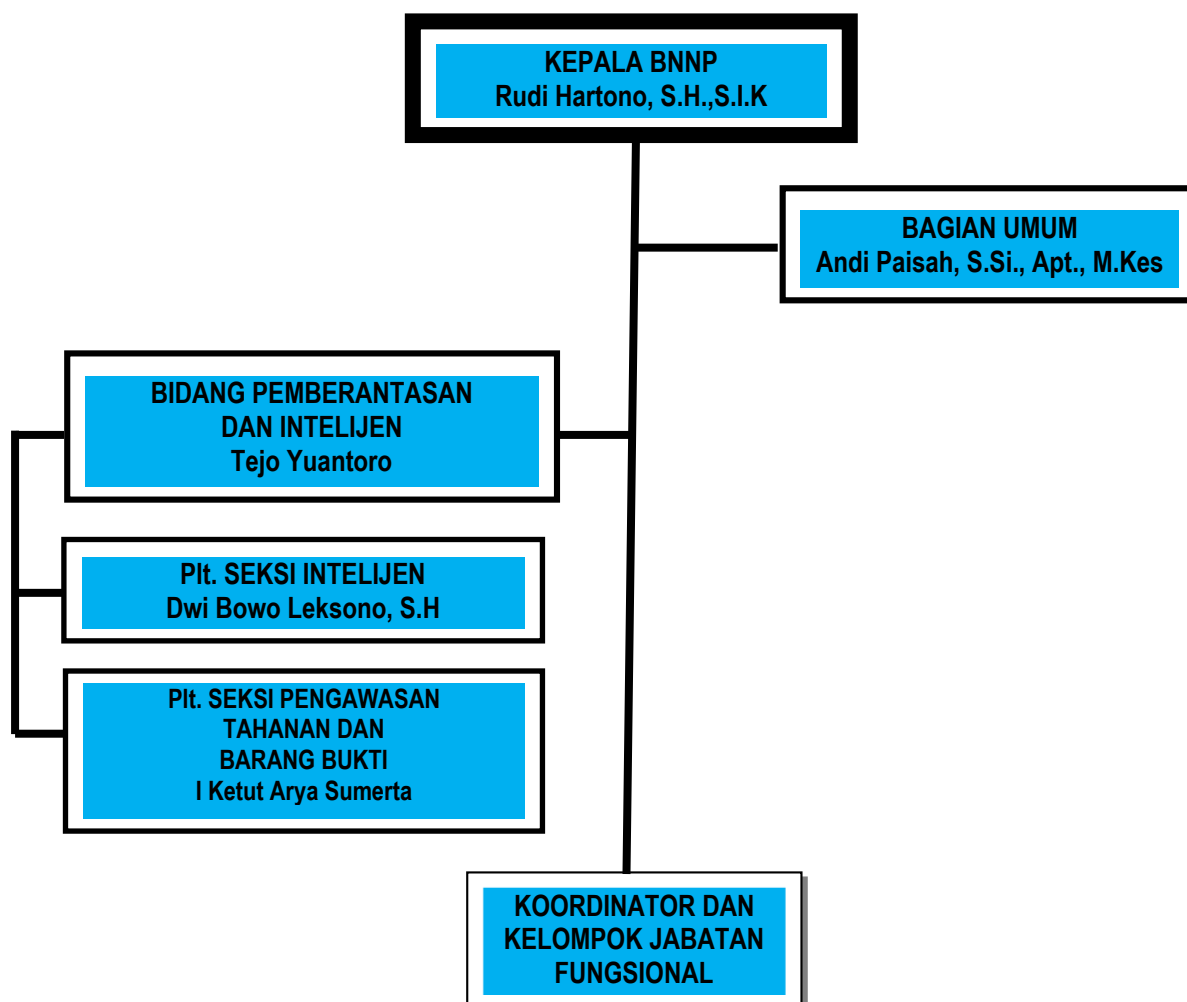
Struktur organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan BNN RI Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen;
4. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNN Provinsi Kalimantan Timur ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Program Kerja

Pada lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional tahun 2020 – 2024, menetapkan tujuan BNN Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Melindungi dan Menyelematkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas

Sedangkan sasaran Strategis BNN yaitu:

1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

Adapun Visi yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional 2020 – 2024 adalah Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Demi mencapai Visi BNN 2020-2024 yang ditetapkan, dirumuskan misi-misi yang secara umum akan menjadi upaya-upaya pencapaian kondisi yang diharapkan pada akhir periode Tahun 2024.

Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Kaltim merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Arah Kebijakan BNN tahun 2020 - 2024 yaitu:

1. Peningkatan pengawasan titik masuk jalur peredaran dan kapasitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba
3. Peningkatan pemberdayaan, partisipasi dan kedayatanggapan masyarakat melalui pemanfaatan nilai-nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam P4GN
4. Penguatan dukungan fasilitasi yang mengarah pada rehabilitasi berkelanjutan
5. Penguatan kerjasama, inovasi dan teknologi
6. Penataan dan penguatan kelembagaan BNN (tata kelola untuk pelayanan publik)

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah. Adapun rencana program kerja (Renpoja) BNN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari rencana Strategis BNN tahun 2020 – 2024, program tersebut adalah Program P4GN dan Program Dukungan Manajemen serta pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Focal point penanggulangan Narkoba di wilayah Kalimantan Timur, Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim melakukan berbagai upaya penanggulangan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya wilayah Kalimantan Timur melalui Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan serta meningkatkan kerjasama baik pemerintah daerah, organisasi pemerintah daerah(OPD), lembaga dan kementerian serta swasta

B. Rencana Kinerja Tahunan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 1.
Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 Kab/ Kota	Rp. 383.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 Kab/ Kota	Rp. 438.700.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	3 Kabupaten Kota	Rp. 824.283.000

4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	1 Kawasan	Rp. 90.000.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2,8 Indeks	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	Rp. 97.970.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	8 Orang	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	4 Unit	Rp. 473.814.740
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,4 Indeks	Rp. 95.408.000
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	3 Laporan	Rp. 150.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	15 Berkas Perkara	Rp. 820.000.000
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	Rp. 278.745.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks	

10.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	92 Indeks	Rp. 62.277.0000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 Kab/kota	
		Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNNBerdasarkan PenilaianInternal	78 Indeks	
11.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	98,95 Indeks	Rp9.877.122.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kab /Kota	
Total Anggaran BNNP dan BNNK Jajaran					Rp 13.818.963.000

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi, perhitungan pada tabel 1. dibuat sebelum adanya perjanjian kinerja TA. 2023 berdasarkan RKT 2024.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja berisikan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang harus dicapai melalui program pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun Perjanjian Kinerja BNNP Kaltim Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

K/L : Badan Narkotika Nasional
Satuan Kerja : Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,8 Indeks
5	Meningkatnya Upaya Pemulihan penyalahguna dan atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang mengalami	68 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
		peningkatan kualitas hidup	
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia	1 Lembaga
		Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang operasional	8 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur	3,42 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	15 Berkas Perkara
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur	91 Indeks
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 BNN Kabupaten/ Kota

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
12	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Timur	98,95 Indeks
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 BNN Kabupaten/ Kota
13	Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	78 Indeks

Rincian Anggaran

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	383.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	438.700.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	824.382.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	90.000.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	97.970.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	690.707.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	56.060.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp	150.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	820.000.000

10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	278.745.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	3.056.815.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	65.540.000
13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	62.540.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	6.754.767.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	50.000.000

Kerangka pendanaan sebagaimana di atas merupakan rencana kebutuhan pendanaan program kerja BNN dalam Rencana strategis 2020-2024 yang bersifat proyektif dan indikatif. Artinya, kebutuhan pendanaan tersebut dapat berubah atau disesuaikan dengan kondisi dinamika kebijakan alokasi penganggaran APBN dan kebijakan pimpinan Lembaga.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Kinerja.

Perjanjian Kinerja BNNP Kaltim tahun 2024 menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 18 (delapan belas) indikator. Dari 18 IKK tersebut dapat disimpulkan 7 (tujuh) IKK melebihi target, 9 (sembilan) IKK sesuai target dan 2 (dua) IKK tidak mencapai target.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan tahun 2024 dan penjelasan hasil capaian 20 (dua puluh) IKK sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.
Realisasi Kinerja BNNP Kaltim Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	66,67%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/Kota	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,8 Indeks	3,7 Indeks	132,14%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	22 Orang	220%
6	Meningkatnya Upaya Pemulihan penyalahguna dan atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	82,03 %	120,63%
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
		Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang operasional	8 Unit	8 Unit	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur	3,42 Indeks	3,75 Indeks	109,65%
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	15 Berkas	49 Berkas	326,67%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target
	tanaman terlarang lainnya				
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks	100 Indeks	100%
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur	91 Indeks	98,68 Indeks	108,44%
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3 BNN Kabupaten/ Kota	3 BNN Kabupaten/ Kota	100%
12	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Timur	98,95 Indeks	97,35 Indeks	98,4%
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 BNN Kabupaten/ Kota	3 BNN Kabupaten/ Kota	100%
13	Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	78 Indeks	79,44 Indeks	101,85%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan di BNNP Kaltim selama tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik yang berisi analisis perbandingan antara target

dan realisasi kinerja tahun berjalan, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Adapun pengukuran capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana uraian berikut:

1.

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Sasaran Kegiatan di atas, diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 Kab / Kota	2 Kab / Kota	66,67%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan kriteria yaitu:

- a) Menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b) Kriteria indeks ketahanan diri remaja berkategori “Tinggi” dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (Anti Drugs Scale/ADS) dengan skala pengukuran yaitu :
 - i. **Self Regulation** : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
 - ii. **Assertiveness** : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
 - iii. **Reaching Out** : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Pada tahun 2024 Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 3 kabupaten/kota atau sebesar 100%.

Tabel 4.
Rekapitulasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi

No	Satker	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi		
		Indeks Target	Realisasi	Kategori
1	BNNP Kaltim	55,89		Sangat Tinggi
	BNNK Samarinda	56,56	52,45	Tinggi
	BNNK Balikpapan	52,75	54,67	Sangat Tinggi
	BNNK Bontang	52,75	42,46	Sangat Rendah
Rata-rata/Total			51,37	Tinggi

Tabel 5.
Rekapitulasi Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Sasaran Kegiatan	Tahun	Target	Realisasi
1	1. 2020 : Persentase Masyarakat yang terpapar informasi P4GN 2. 2021 - 2024 Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	1. 2020 : Meningkatnya Penyebarluasan Informasi P4GN	2020	7%	7,13%
2		2. 2021- 2024 : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	2021	2	1
3			2022	2	2
4			2023	2	3
5			2024	3	2

Adapun klasifikasi hasil capaian sebagai berikut:

- Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$)
- Kategori Tinggi (49,74 – 53,50)
- Kategori Rendah (45,98 – 49,73)
- Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$)

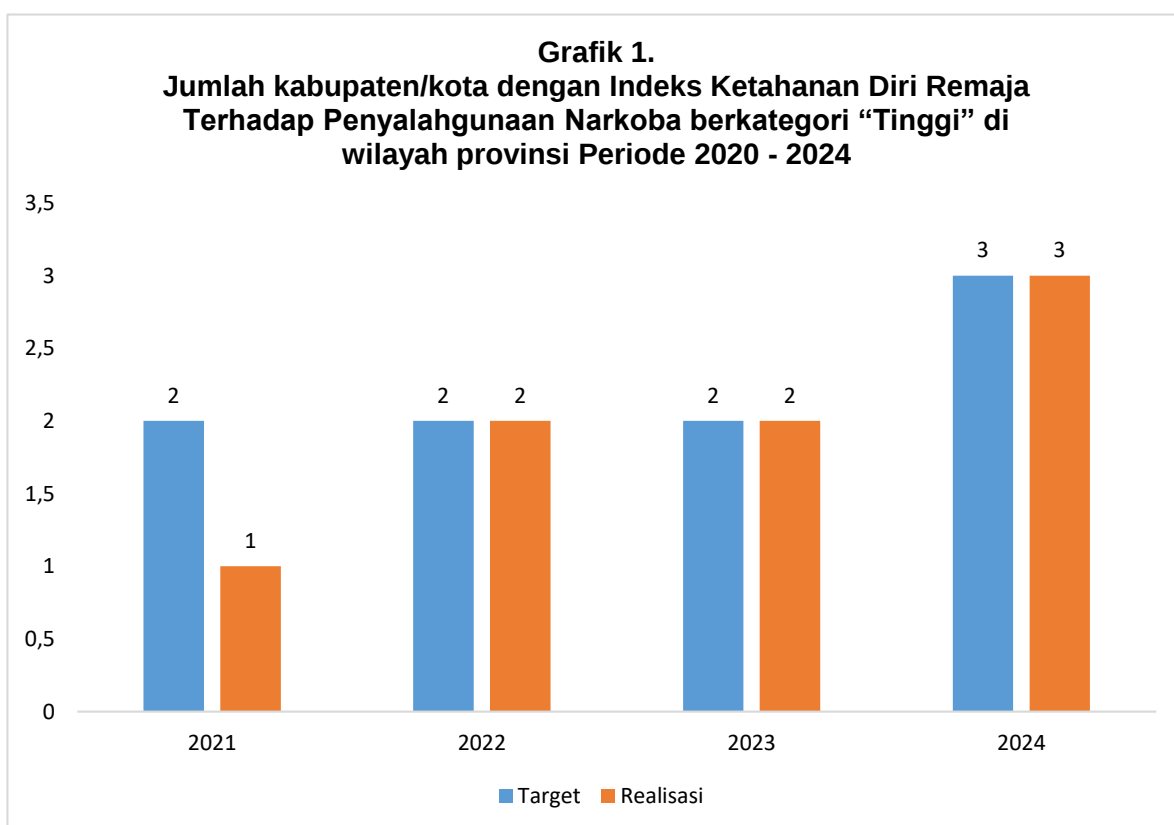
Beberapa kegiatan informasi dan edukasi yang telah dilaksanakan tahun 2024 yang mendukung meningkatnya capaian indeks ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur adalah softskill di lingkungan SMP/SMA, kampanye/pagelaran seni, Informasi dan edukasi melalui pemanfaatan media luar ruang, dan insert konten. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah tingkat SMPN dan SMAN/SMKN wilayah Provinsi Kalimantan Timur, masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.

Pada tabel Rekapitulasi Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”, diatas diperoleh bahwa untuk tahun 2024 jumlah kab/kota yang berkategori “Tinggi” sejumlah 2 kab/kota yaitu Kota Samarinda berkategori “tinggi” dan Kota Balikpapan berkategori “sangat tinggi” sehingga capaian realisasi hanya 66,67% Hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”, sebanyak 3 kabupaten/kota (capaian 150%).

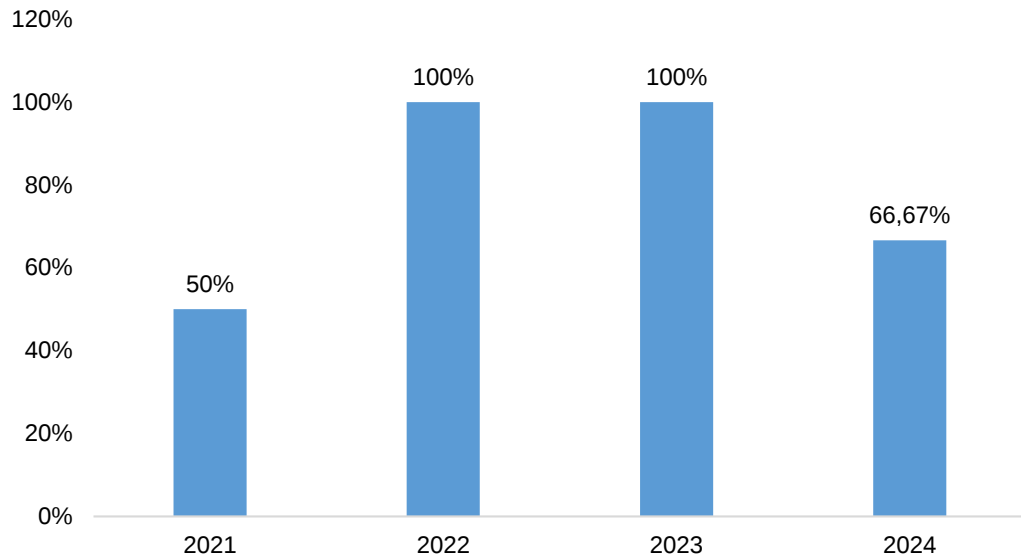
Penurunan capaian realiasi antara tahun 2023 dibanding pada tahun 2024 disebabkan adanya 1 Kab/Kota yang berkategori “Sangat Rendah” (Bontang), hal ini dikarenakan adanya kesalahan strategis BNNK Bontang dalam merevisi anggaran blokir pada saat dilakukan “*Automatic Adjustment*” komponen 52 pada kegiatan 5936 dengan sub komponen antara lain Informasi dan Edukasi melalui Pemanfaatan Insert Konten; Informasi dan Edukasi melalui Media Cetak; Informasi dan Edukasi melalui pemanfaatan Media Luar Ruang, sehingga hal ini mempengaruhi pada capaian IKK Dektari ini. Disamping itu belum maksimalnya

kesadaran masyarakat Kota Bontang untuk mencari dan mendapatkan informasi P4GN, minimnya SDM di BNNK Bontang dan adanya jaringan yang tidak stabil serta kemampuan HP peserta yang berbeda-beda.

Adapun Kab/Kota Balikpapan dan Samarinda yang mengalami peningkatan capaian Dektari ini dikarenakan meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba pada remaja; tingkat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; meningkatnya peranan mitra masyarakat dalam upaya pencegahan; meningkatnya koordinasi tingkat pusat dalam hal fasilitasi yang meliputi bimbingan teknis, penyajian materi dan acuan pelaksanaan informasi dan edukasi P4GN.



Grafik 2.
Persentase Capaian Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi
Periode 2020 - 2024



4. Analisa dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Timur (Renproja tahun 2020 - 2024) target indikator kinerja Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah 3 kabupaten/ kota. Hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja (IKR) BNN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebesar 51.37 (Kategori Tinggi) dan mendekati dari standar yang ditetapkan secara nasional yaitu sebesar 53.51 (Kategori Tinggi). Hal ini tidak terlepas dari adanya sinergi dengan stake holder terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat serta keterlibatan pihak sekolah dalam mendukung pelaksanaan program BNN.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi kinerja BNNP Kalimantan Timur tahun 2024 dalam indikator kinerja kegiatan “Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)” jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional pada Dektari

NO	WILAYAH	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	Nasional	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)	53,51	52,04
2	Provinsi Kalimantan Timur				51,37

Dari data pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan nilai sebesar 51,37. Hasil tersebut mendekati dari capaian realisasi kinerja indeks ketahanan diri remaja secara nasional sebesar 52.04.

BNN Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan anak dan remaja secara terarah dan sistematis lagi di tahun 2025 agar realisasi kinerja di tahun mendatang menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 3 kabupaten/kota atau sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

- a) Kegiatan pengembangan soft skill pada remaja di SMP/SMU sederajat dan pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan secara optimal sehingga indeks ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba masuk dalam kategori tinggi;
- b) Keluarga yang sudah berperan aktif dalam menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan narkoba serta melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba baik di dalam maupun diluar lingkungannya;
- c) Tingginya kesadaran di lingkungan Pendidikan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN.

7. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Pertanyaan kuisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja yang terkadang sulit dipahami oleh beberapa siswa;
- b) masih ada beberapa institusi/ lembaga yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan P4GN.

Kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara.

8. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber daya Manusia

Ditengah keterbatasan SDM, BNN Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan kinerja sesuai dengan matrik peran hasil yang telah dibuat. Kedepannya diperlukan lagi penambahan jumlah penyuluh narkoba untuk lebih memaksimalkan kegiatan sosialisasi P4GN dimasyarakat serta peningkatan kapasitas tenaga penyuluh melalui diklat yang diperlukan dan penambahan tenaga penuluh di BNN Provinsi Kalimantan Timur.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki cukup memadai seperti Gedung Kantor berstatus Hak Milik BNN dan memiliki aula pertemuan yang besar, namun beberapa alat pengolah data dan alat peraga jenis narkoba berstatus rusak serta rata-rata sudah berumur lebih dari 5 tahun.

c) Anggaran

Pada tahun 2024 anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Pengelolaan Informasi dan edukasi adalah sebesar Rp. 346.240.000,-. Realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 342.062.000,- atau 98.79% dengan realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja (IKR) BNN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebesar 51,37 dari target 53.51 atau 96 %. Hasil tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam mencapai kinerja.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah:

- a) Meningkatkan informasi dan Edukasi kepada sasaran anak dan remaja dalam rangka meningkatkan daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b) Melakukan koordinasi intensif dengan pembina fungsi PIC pusat terkait survei Dektari.
- c) Pertanyaan kuisisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja untuk kedepannya bisa dibuat lebih simpel, jelas, dan mudah dipahami;
- d) Menjalin kerja sama yang baik lagi dengan semua komponen baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan dalam upaya meningkatkan ketahanan diri remaja dari penyalahgunaan narkoba;
- e) Koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan lagi serta lebih banyak berpartisipasi dalam rangka bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan instansi-instansi terkait;
- f) Mengembangkan penyebaran ragam media informasi dan edukasi yang bervariasi dari kampanye konvensional, media cetak, media luar ruang, online dan media penyiaran sehingga dapat menjangkau banyak khalayak khususnya kalangan remaja;
- g) Melakukan berbagai model kegiatan yang dapat merangsang remaja untuk aktif dalam kegiatan penyebaran informasi dan pemberian edukasi P4GN.

2.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
-----------	--

Sasaran Kegiatan di atas, diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 Kab / Kota	3 Kab / Kota	100%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal di suatu kabupaten/kota. Keluarga yang memiliki daya tangkal harus mampu mencapai 3 dimensi yaitu:

1. Belief System

2. Organization Process

3. Communication/ Problem Solving Process

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu:

- a. Menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. Kriteria indeks ketahanan keluarga berkategori “Tinggi” dengan melakukan perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure). Setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2024;
- c. Pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua;
- d. Pemilihan 10 (sepuluh) responden keluarga;
- e. Response keluarga yang dipilih akan mengisi kuisioner di kertas;
- f. Fasilitator akan menyalin jawaban responden ke link kuisioner yang telah dibagikan;
- g. Nilai hasil akumulasi pengukuran akan terakumulasi di BNN Pusat;
- h. Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :
 1. Kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100
 2. Kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30
 3. Kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60
 4. Kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

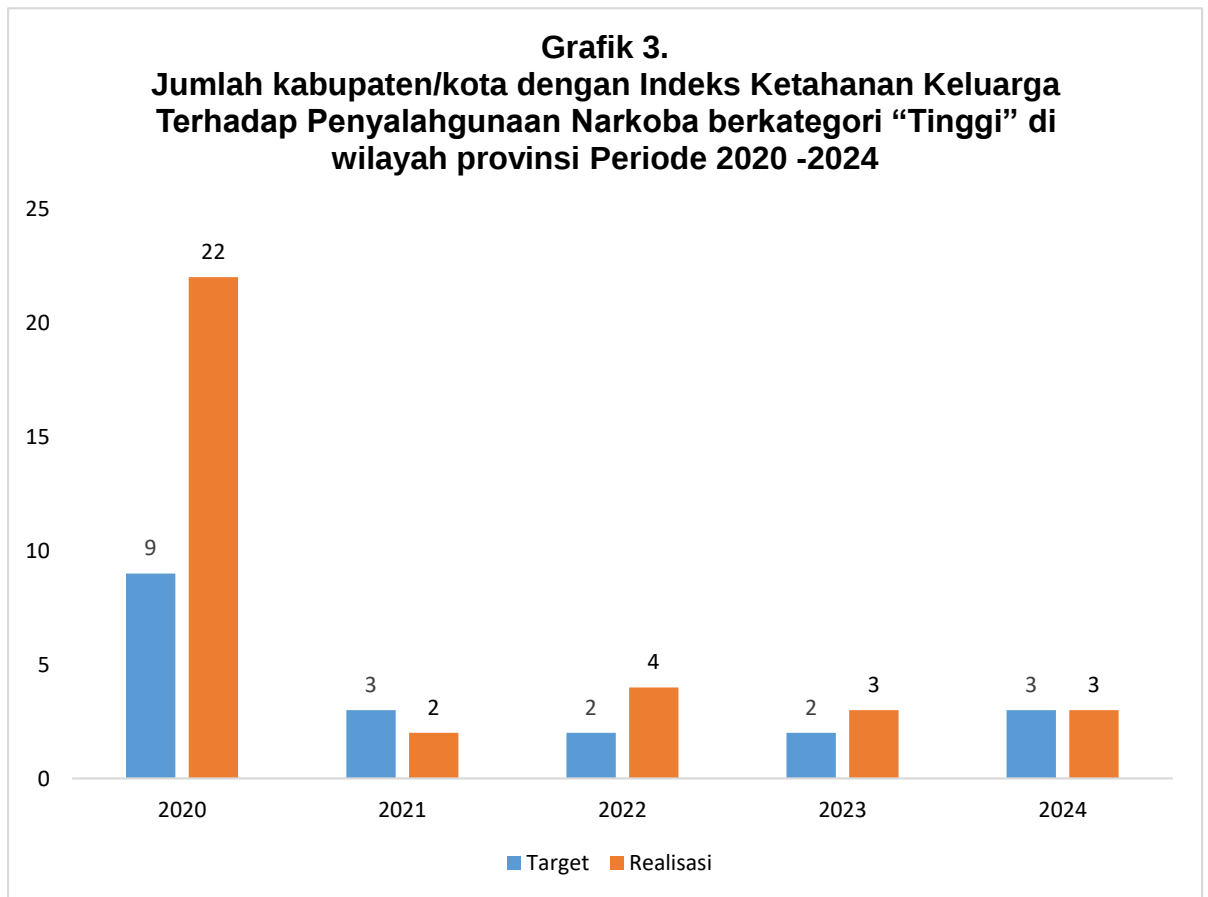
3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 3 kabupaten/kota atau sebesar 100%

Tabel 7.
Capaian Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”

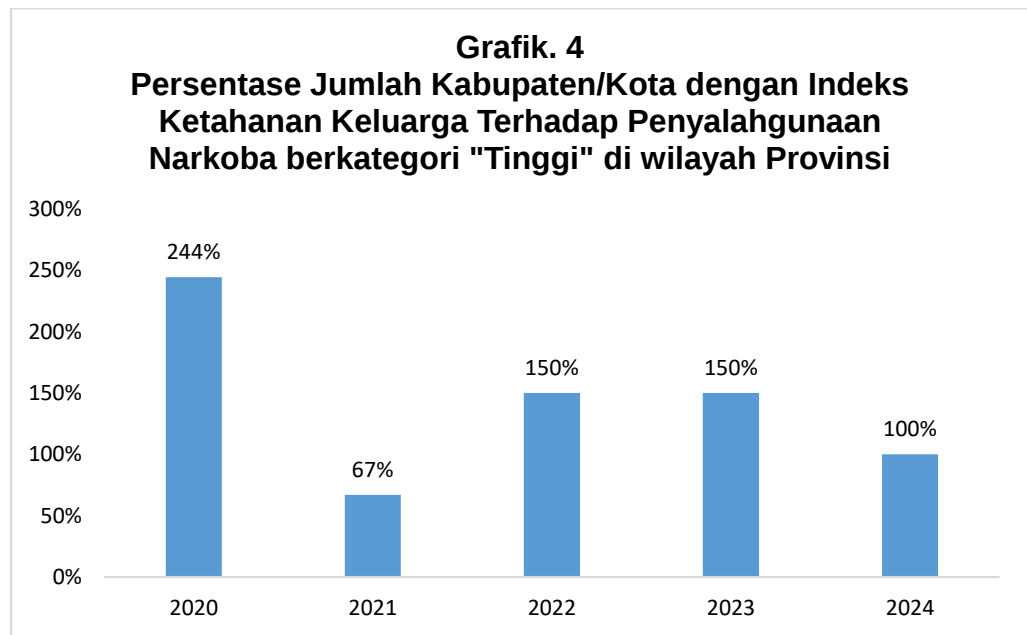
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	UNIT KERJA	TARGET	REALISA SI
1	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Provinsi	Jumlah Kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" (skala nilai 76.61-88,30) di wilayah provinsi	BNNP Kaltim	92,143	92,589
2			BNNK Samarinda	85	85,179
3			BNNK Balikpapan	92.321	91,518
4			BNNK Bontang	80.714	90,804
CAPAIAN				3 Kab/Kota Kategori Tinggi	3 Kab/Kota Kategori Tinggi

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” tidak mengalami penurunan maupun peningkatan capaian pada tahun 2024 yaitu tetap 3 kabupaten/kota.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Timur (Renproja tahun 2020 - 2024) target indikator kinerja Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi tahun 2024 adalah 3 kabupaten/kota dengan realisasi sebanyak 3 kabupaten/kota.



Hasil capaian indeks ketahanan keluarga BNN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebesar 92,589 (Kategori Sangat Tinggi) atau 104%, telah melebihi dari standar yang ditetapkan secara nasional yaitu sebesar 78.70 (Kategori Tinggi), hal ini tidak terlepas dari adanya sinergi dengan stake holder terkait dalam pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga, sesuai dengan MoU BNN Pusat dan Daerah dengan Tim PKK baik pusat maupun daerah, serta pro aktifnya pihak kelurahan dalam mendukung pelaksanaan program BNN.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi kinerja BNNP Kalimantan Timur dan BNNK Jajaran tahun 2024 dalam indikator kinerja kegiatan “Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)” jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8.
Perbandingan Realisasi dengan Indeks Dektara secara Nasional

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	WILAYAH	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara)	Nasional	78.70	86.787
2			Provinsi Kalimantan Timur		92,589

Dari data pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur dan BNNK Jajaran sebesar 92.589. Hasil tersebut lebih tinggi dari realisasi kinerja indeks ketahanan keluarga secara nasional sebesar 84.767.

BNN Provinsi akan melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga secara terarah dan sistematis lagi di tahun 2025 agar realisasi kinerja di tahun mendatang menjadi lebih baik dari capaian realisasi kinerja secara nasional.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- a) Adanya dukungan dari unsur perangkat desa terhadap pelaksanaan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa yang dilakukan oleh BNNP dan BNN Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur;

- b) Antusiasme orang tua murid dari kegiatan dialog interaktif keluarga sangat kuat dengan mendampingi anaknya pada kegiatan berlangsung dan mendukung program P4GN.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah masih lemahnya koordinasi antar perangkat desa dalam penerapan program ketahanan keluarga dilingkungannya.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya manusia

Demi lancarnya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan koordinasi dan sinergi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terutama Badan Kesbangpol, Pokja 1 Tim penggerak PKK dan aparat kelurahan/desa bersinar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi ketahanan keluarga dan penentuan peserta kegiatan intervensi ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki cukup memadai seperti Gedung Kantor berstatus Hak Milik BNN namun beberapa alat pengolah data dan alat peraga jenis narkoba berstatus rusak serta rata-rata sudah berumur lebih dari 5 tahun.

c) Anggaran

Anggaran kegiatan Advokasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 417.980.000,- Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pendampingan ketahanan keluarga anti dan narkoba dan advokasi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa untuk mendukung pencapaian target kinerja berupa indeks ketahanan diri keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba. Realisasi anggaran pelaksanaan Penyelenggaraan Advokasi berupa Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 411.750.650,- atau 98,44% dengan hasil capaian indeks ketahanan keluarga BNN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebesar sebesar 92.589 dari target 78.70 atau 104%. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam pencapaian kinerja.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah mengenali faktor pelindung dan risiko penyalahgunaan narkoba dalam keluarga dapat melalui pengenalan karakter dan minat anggota keluarga khususnya anak, memperhatikan pola asuh dalam keluarga, mengetahui harapan keluarga, serta tata nilai dalam keluarga.

3.

Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Sasaran Kegiatan di atas, diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
3.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba, sehingga memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan dan pasokan sediaan narkotika..

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perhitungan kuisioner dilakukan secara manual dan dikumpulkan sesuai surat edaran dari Deputi Pemberdayaan nomor B/3439/X/DE/PM.00/2024/BNN tentang Pengumpulan Data IKP Tahun 2024.
- b. Kuisioner diisi oleh peserta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Pengembangan Kapasitas P4GN dilingkungan instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan organisasi/komunitas.

- c. Menggunakan hasil olah data kuisisioner survei/wawancara dengan 10 indikator dengan jumlah responden 20 orang kemudian diidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output dan outcome) dari masing-masing lingkungan kemudian dilakukan interval tingkatan dengan kriteria sebagai berikut :
- i. **SDM**; adalah tokoh dan penggiat antinarkoba yang aktif melakukan P4GN (toma, toga, pengurus satgas antinarkoba, penyuluh, konselor adiksi, dll) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
 - ii. **Metode**; adalah cara-cara yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan instansi pemerintah, swasta, masyarakat yang berupa :
 - a. Pelatihan, konseling, pelaksanaan test urine, dll yaitu metode yang dilakukan dengan banyak cara, metode pendekatan dan media, selain penyuluhan
 - b. Penyuluhan atau Sosialisasi yaitu metode P4GN yang dilakukan dengan ceramah, paparan, penyampaian pesan baik luar ruang maupun dalam ruang.
 - iii. **Anggaran**; adalah pembiayaan atau pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang terdiri dari :
 - a. Mandiri/swadaya yaitu anggaran yang diinisiasi secara mandiri dan tidak dari bantuan atau fasilitas dari pihak lain.
 - b. Sponsorship/ bantuan pihak lain yaitu anggaran yang berasal dari bantuan atau fasilitas dari pihak lain. .
 - iv. **Material**; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.

- v. **Sistem (Kebijakan)**; adanya sistem, regulasi atau aturan , yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya baik yang bersifat mengikat (adanya reward, punishmet, sanksi) maupun yang tidak mengikat (tidak ada sanksi)
- vi. **Sarana Prasarana** adalah peralatan atau media yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan P4GN (seperti ruang konseling, papan informasi, baliho, spanduk, poster, leaflet, test kit) yang terdiri atas :
 - a. Sarpras yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi agar lebih menarik
 - b. Sarpras yang telah tersedia yaitu yang hanya memanfaatkan fungsinya saja melalui baik penyewaan atau lainnya tanpa pengadaan barang/jasa yang baru.
- vii. **Aktivitas** adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba. Dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :
 - IKP 1,00 – 1,75: Tidak Mandiri
 - IKP 1,76 – 2,50: Kurang Mandiri
 - IKP 2,51 – 3,25: Mandiri
 - IKP 3,26 – 4,00: Sangat Mandiri

Kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3 kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri”

di wilayah provinsi dapat terealisasi sebanyak 3 kabupaten/kota atau sebesar 100%.

Tabel 9.
Realisasi IKP Wilayah BNNP Kaltim dan Jajaran Tahun 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A

Indikator kinerja jumlah kab/kota dengan indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Sangat Mandiri” di wilayah provinsi Kaltim untuk rata-rata capaiannya terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 0,04 pada tahun 2024 (3,68), dibandingkan rata-rata capaian tahun 2023 (3,64).

4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi KALTIM (Renproja tahun 2021 - 2024) target indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi tahun 2024 adalah 3 kabupaten/kota.

Hasil capaian jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi tahun 2024 sebesar 3 kabupaten/kota atau 100% yaitu pada Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang. Dan sejak tahun 2021 ke-3 kab/kota tersebut telah mencapai target nasional yaitu telah berkategori “Mandiri”.



Sebagai perbandingan dilihat dari grafik 5 tersebut dapat disimpulkan persentase capaian tiap tahunnya sejak tahun 2021 hingga 2024 pada angka 100%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian indikator jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dibandingkan pada level nasional merupakan akumulasi jumlah kabupaten/kota berkategori “Mandiri” di seluruh unit kerja BNNP dan BNNK di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan untuk target kab/kota dengan indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” sangat tercapai karena sejak tahun 2022, ke-3 Kab/Kota telah berkategori “Sangat Mandiri” sehingga melebihi target capaian nasional yang target capaian berkategori “Mandiri”.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah: semakin tumbuhnya kepedulian, kesadaran masyarakat, dan memandang bahwa permasalahan Narkoba menjadi persoalan bersama yang harus segera diatasi;

- a) Partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal yang mendukung program P4GN.
- b) Adanya Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN yang mendorong setiap OPD di daerah untuk ikut serta dalam menekan peredaran narkoba di provinsi Kaltim.
- c) Pemberian apresiasi kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan P4GN.
- d) Pembinaan yang berkelanjutan kepada para tokoh dan penggiat anti narkoba.
- e) Penandatanganan MOU ataupun PKS pada instansi pemerintah dan swasta maupun LSM/organisasi.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Beberapa kabupaten/kota masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan;

- b) Kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara.
- c) Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah untuk program P4GN.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai kinerja dibidang pemberdayaan masyarakat, BNN Provinsi Kaltim memaksimalkan SDM yang ada dan melakukan koordinasi serta sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim terutama Badan Kesbangpol Kaltim sehingga target indikator Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dapat tercapai.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah mobil operasional Bidang P2M diberikan oleh BNN pusat.

c) Anggaran

Anggaran untuk menunjang kegiatan pemberdayaan peran serta masyarakat sebesar Rp. 824.382.000- diblokir sebesar Rp 138.265. 000 menjadi Rp. 686.117.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 676.282.840,- atau 98.57% dengan hasil capaian indikator jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori

“Mandiri” di wilayah provinsi tahun 2024 sebesar 3 kabupaten/kota dari target 3 kabupaten/kota atau 100%.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah:

- a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan penanganan penyalahguna narkoba di berbagai instansi/lingkungan;
- b) Koordinasi/Komunikasi dan kerjasama yang lebih intensif bagi lingkungan dalam melaksanakan kegiatan P4GN di semua lingkungan;
- c) Sinergi dan Kolaborasi dengan instansi/lembaga/organisasi terkait secara berkelanjutan/berkesinambungan;
- d) Melibatkan Program CSR untuk mendukung kegiatan ini;
- e) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pertriwulan.

4.	Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
----	---

Sasaran Kegiatan di atas, diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
4.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan/ Wilayah Rawan	1 Kawasan/ Wilayah Rawan	100%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" adalah suatu kawasan/wilayah yang masyarakat didalamnya mempunyai potensi menjadi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pengedar narkoba, yang dengan kesadarannya mengikuti program pemberdayaan alternatif guna mengurangi dampak buruk terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" dengan kriteria yaitu:

- a) Kawasan/wilayah yang masyarakat didalamnya mempunyai potensi menjadi penyalahguna, korban penyalah guna dan pengedar narkoba karena faktor lingkungan, faktor individu dan faktor ketersediaan narkoba;
- b) Kawasan/wilayah rawan yang telah ditentukan, mendapatkan program pembinaan alternatif berupa pelatihan life skill yang diberikan oleh BNN Provinsi Kaltim dengan tujuan agar mantan pengguna dan pengedar dapat memperoleh kesempatan memiliki usaha yang halal dan tidak terjerumus lagi ke dalam narkoba.

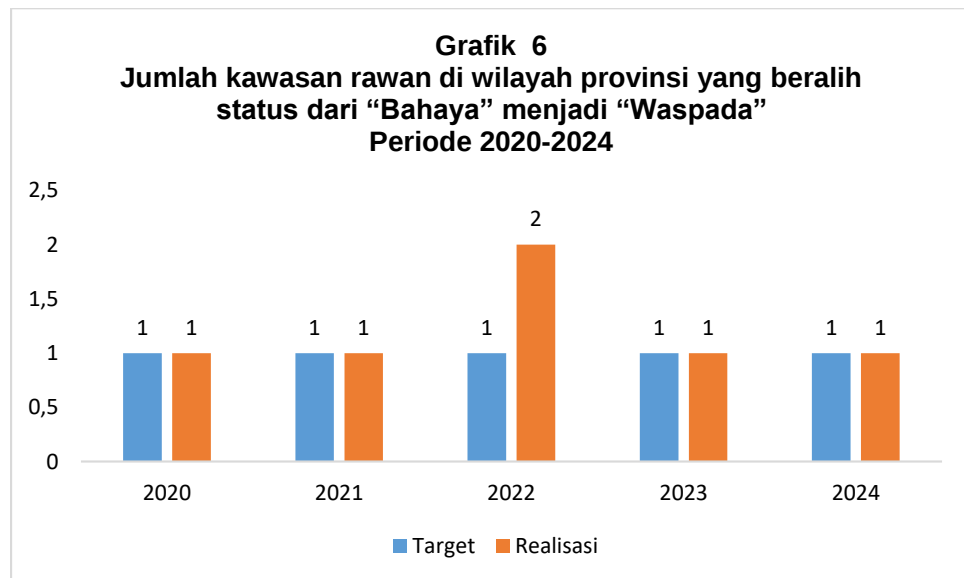
3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" dapat terealisasi sebanyak 1 kawasan atau sebesar 100%. Kawasan rawan narkoba yang dibina BNN Provinsi KALTIM melalui program

pemberdayaan alternatif berada di Kelurahan Penajam Paser Utara. BNN Provinsi Kaltim pada tanggal 28-30 Agustus 2024 memberikan pelatihan Membatik. Pelatihan ini diberikan kepada 15 orang ibu-ibu dan pemuda rawan narkoba dengan kriteria Residivis kasus narkoba, Remaja Putus Sekolah, Belum Berpenghasilan dan tidak produktif/pengangguran, dan Istri dari Narapidana Kasus Narkoba. Alat yang diberikan adalah alat membatik, Kain, Lilin lengkap dengan kursi serta bahan dan peralatan usaha yang sesuai dengan Pelatihan Membatik. Diharapkan melalui program pemberdayaan alternative tersebut dapat menjauhkan masyarakat di Kelurahan Petung untuk menjauhi pengaruh buruk dari narkoba karena salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba adalah kondisi lingkungan yang kurang baik, masalah ekonomi, angka putus sekolah yang tinggi, dan minimnya lapangan kerja.

Tabel 10
Jumlah kawasan rawan di wilayah
Provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”
Periode 2020 - 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tahun	Target	Realisasi	Kawasan
1	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	2020	1	1	Kelurahan Lok Tuan, Bontang
2			2021	1	1	Kelurahan Lok Tuan, Bontang
3			2022	1	2	Desa Bangun Mulya (PPU) & Teluk Lingga (Kutim)
4			2023	1	1	Desa Batu Kajang (Paser)
5			2024	1	1	Kelurahan Petung (PPU)



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi KALTIM (Renproja tahun 2020 - 2024) target indikator kinerja jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" tahun 2024 adalah 1 kawasan. Hasil capaian indikator jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" BNN Provinsi KALTIM Tahun 2024 sebesar 1 kawasan atau 100% yaitu Kawasan Kelurahan Petung Kab. Penajam Paser Utara.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian indikator jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" di level nasional merupakan akumulasi jumlah kawasan di seluruh unit kerja BNNP dan BNNK di wilayah Republik Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya dukungan dari unsur perangkat lingkungan, dinas perindustrian, maupun masyarakat sendiri yang telah jenuh dan mengenai kawasan atau lingkungannya yang dicap sebagai kawasan/wilayah rawan narkoba.

7. Hambatan atau Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah keterbatasan anggaran dan tidak tersedianya anggaran tindak lanjut dari program pemberdayaan alternatif melalui pelatihan life skill, sehingga panitia tidak bisa melakukan program pasca pelatihan yang berguna untuk pendampingan lebih lanjut.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Data Dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai kinerja dibidang pemberdayaan masyarakat, BNN Provinsi KALTIM memaksimalkan SDM yang ada dan melakukan koordinasi serta sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim terutama Badan Kesbangpol, Bappeda Kaltim sehingga target indikator jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" dapat tercapai.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah mobil operasional Bidang P2M yang diberikan oleh BNN pusat.

c) Anggaran

Anggaran untuk menunjang kegiatan hanya sebesar Rp. 90.000.000,- dengan sisa setelah Blokir Rp. 77.300.000 untuk menunjang pelaksanaan Program Pemberdayaan Alternatif berupa Pemberian Bantuan Paket Usaha kepada Masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan narkoba tahun 2024. Realisasi anggaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Alternatif sebesar Rp 73.909.415,- atau 95,61% dengan hasil capaian indikator jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" BNN Provinsi Kaltim tahun 2024 sebesar 1 kawasan atau 100%

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah dalam perencanaan program selanjutnya perlu adanya identifikasi awal atau membaca hasil laporan kegiatan sebelumnya, agar dapat merencanakan tindak lanjut program yang mestinya dilaksanakan berkesinambungan berikut dengan kebutuhan anggaran yang memadai demi kelancaran program di tahun berikutnya.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	2024		Capaian
		Target	Realisasi	
5.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,8	3,7	132,14%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi adalah suatu alat ukur untuk mengukur sejauhmana intervensi

program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran. Dalam konsep nilai keterpulihan kawasan rawan ini yang diukur, antara lain: (1) Pelaksanaan Program, (2) Pelaksana Program, (3) Keberlanjutan Program, (4) Sinergi Instansi Pemerintah, (5) Kemitraan Duniausaha, (6) Pelibatan Organisasi Sosial Masyarakat (Orsosmas), Dan (7) Hasil Program yang dirasakan masyarakat.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) / IKRN yang diintervensi dengan kriteria yaitu :

- a) Kawasan/wilayah yang masyarakat didalamnya mempunyai potensi menjadi penyalahguna, korban penyalah guna dan pengedar narkoba karena faktor lingkungan, faktor individu dan faktor ketersediaan narkoba;
- b) Kawasan/wilayah rawan yang telah ditentukan, mendapatkan program pembinaan alternatif berupa pelatihan life skill yang diberikan oleh BNN Provinsi Kaltim dengan tujuan agar mantan pengguna dan pengedar dapat memperoleh kesempatan memiliki usaha yang halal dan tidak terjerumus lagi ke dalam narkoba.

3. Hasil Pengukuran Indikator

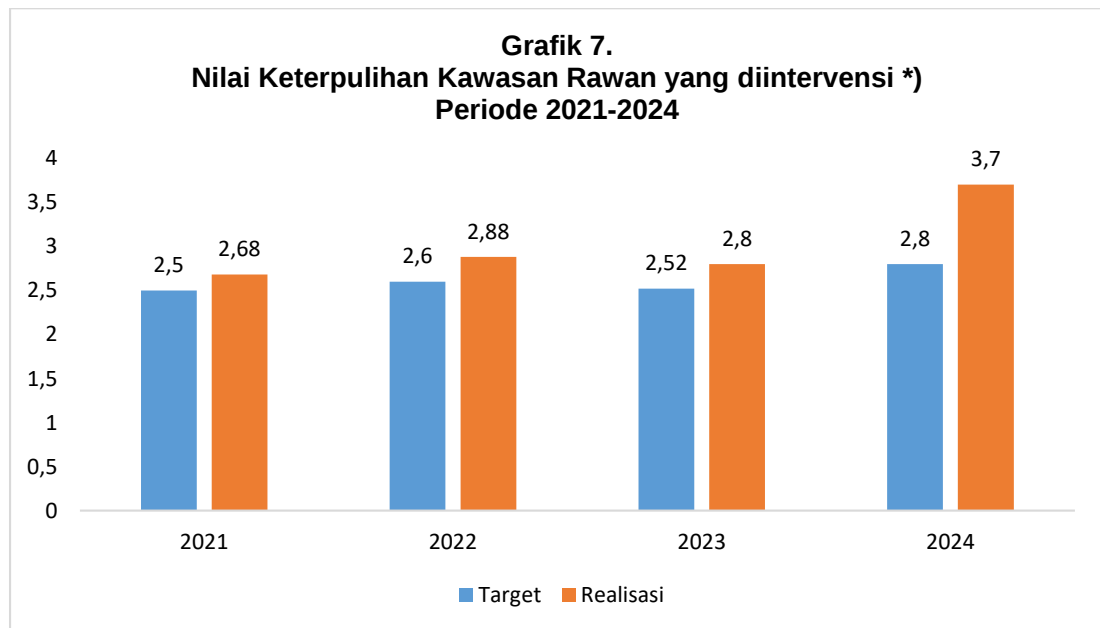
Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja terkait nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi sebesar 1 dapat terealisasi sebesar 1 atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi, mengalami peningkatan capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 0.9 indeks. Berdasarkan Surat Kepla Badan Narkotika Nasional Nomor : B/9/I/DE/.01/2025/BNN tentang Hasil Pengukuran IKRN di Wilayah Program Pemberdayaan Alternatif sebagai berikut:

**HASIL PENGUKURAN IKRN DI WILAYAH PROGRAM
PEMBERDAYAAN ALTERNATIF TAHUN 2024**

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
31	BNNP Kalimantan Timur	Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Pasir Utara,	Bahaya	3.70	Siaga

Tabel 11
Realisasi Nilai Keterpulihan
Kawasan Rawan Yang di Intervensi
Periode 2021-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tahun	Target	Realisasi
1	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2021	2,5	2,68
			2022	2,6	2,88
			2023	2,52	2,8
			2024	2,8	3,7



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kaltim (Renproja tahun 2020 - 2024) target indikator kinerja nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi tahun 2024 adalah 2.8 indeks. Hasil capaian indikator nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi BNN Provinsi KALTIM Tahun 2024 sebesar 3.7 indeks atau 132%. Hasil evaluasi indikator kinerja tersebut juga melebihi target jangka menengah (Renproja BNN Provinsi Kaltim Tahun 2020-2024) yaitu terealisasi 3,7 dari target jangka menengah 2.8 indeks.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian indikator nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi di level nasional masih menunggu hasil dari Deputi Dayamas BNN RI.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya dukungan dari unsur perangkat lingkungan, dinas perindustrian, Kabag Kesra Kab. PPU maupun masyarakat sendiri mengenai kawasan atau lingkungannya yang dicap sebagai kawasan/wilayah rawan narkoba.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah beberapa instansi/ lingkungan masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai kinerja dibidang pemberdayaan masyarakat, BNN Provinsi KALTIM memaksimalkan SDM yang ada dan melakukan koordinasi serta sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim terutama Badan Kesbangpol sehingga target indikator nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi dapat tercapai.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah mobil operasional Bidang P2M yang diberikan oleh BNN pusat.

c) Anggaran

Anggaran untuk menunjang kegiatan hanya sebesar Rp. 90.000.000,- dengan sisa setelah Blokir Rp. 77.300.000 untuk menunjang pelaksanaan Program Pemberdayaan Alternatif berupa Pemberian Bantuan Paket Usaha kepada Masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan narkoba tahun 2024. Realisasi anggaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Alternatif sebesar Rp 73.909.415,- atau 95,61% dengan hasil capaian indicator 3,7 Indeks

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah :

- a) Memperkuat sinergi program dengan instansi/lembaga/organisasi terkait;
- b) Dengan Adanya Inpres 2 tahun 2020 diharapkan setiap stakeholder mampu membuat program berbasis anti Narkoba diwilayahnya masing-masing.

5.**Sasaran :** Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
6.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	82.03%	120,63%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba memiliki persepsi individu terhadap kehidupan yang dijalannya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tempat individu tersebut tinggal serta membandingkan kehidupannya dengan harapan, standard an tujuan yang telah ditetapkan oleh individu. Pengukuran kualitas hidup merupakan salah satu evaluasi perkembangan klien yang dinilai saat mengikuti rehabilitasi. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup, maka diharapkan klien akan memiliki capital pemulihan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sehat, produktif, dan bermakna.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Klien mengisi sendiri form WHOQoL-BREF yang sudah disediakan petugas;
- Dilakukan skoring terhadap jawaban klien;
- Evaluasi hasil WHOQoL-BREF klien;
- Pencatatan dan pendokumentasian hasil WHOQoL-BREF.

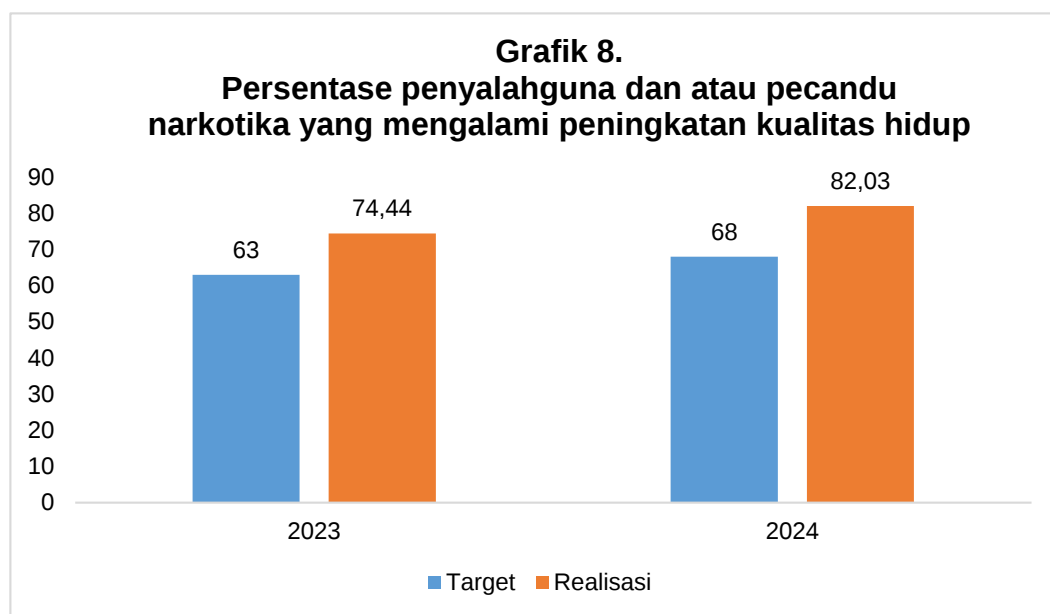
3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 68% persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dapat terealisasi sebanyak 82.03% atau sebesar 120%.

Tabel 12.
Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba
yang mengalami peningkatan kualitas hidup

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Unit Kerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	BNNP Kaltim	68%	82.03%
2			BNNK Samarinda		87.50%
3			BNNK Balikpapan		80.85%
4			BNNK Bontang		78.85%
	Rata-rata				84.05%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 pada indikator kinerja Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup, mengalami peningkatan capaian pada tahun 2024 sebesar 7.59



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Timur (Renproja tahun 2020 - 2024) target Persentase Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup belum ada. Target ini ada dalam renstra BNN tahun 2020-2024 yaitu sebesar 65% untuk tahun 2024.

Pada dialog kinerja / penyepakatan target kinerja antara satker dan Pembina Fungsi disepakati target sebesar 68% Penyalahguna dan atau Pecandu Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup. Target ini lebih tinggi 12.59% dari target yang ada pada Renstra BNN. Capaian target IKK Penyalahguna dan atau Pecandu Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup tahun 2024 adalah 82,03% atau lebih tinggi dari capaian Renstra BNN tahun 2020-2024.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi kinerja BNNP KALTIM dan BNNK Jajaran tahun 2024 dalam indikator kinerja kegiatan Persentase Penyalahguna dan atau Pecandu Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13
Perbandingan Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan antara Nasional

No	Wilayah	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi
1	Nasional	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	85,01%
2	Provinsi Kaltim				82.03%

Dari data pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur dan BNNK Jajaran sebesar 84.05%. Hasil tersebut lebih rendah dari realisasi kinerja Persentase Penyalahguna dan atau Pecandu Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup secara nasional sebesar 85.01%. BNN Provinsi akan melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terarah dan sistematis lagi di tahun 2025 agar realisasi kinerja di tahun mendatang menjadi lebih baik dari capaian realisasi kinerja secara nasional.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah rencana terapi yang sesuai dengan kebutuhan klien sehingga sebagian besar klien mengalami perubahan hidup kearah yang lebih positif.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah pemahaman klien terkait isi (pertanyaan) dalam instrument seringkali berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai target yang ditetapkan pada bidang Pascarehabilitasi hanya ada 2 orang pegawai yaitu dari 2 orang PNS. Ditengah keterbatasan SDM, BNN Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan kinerja sesuai dengan matrik peran hasil yang telah dibuat atau sesuai dengan ketentuan.

b) Sarana dan Prasarana

Untuk memudahkan melaksanakan kegiatan pasca rehabilitasi petugas menggunakan BMN berupa laptop dan printer untuk mendukung pelaksanaan tugas.

c) Anggaran

Jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja sebesar Rp. 27,458,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27,409,695,- atau 100%. Dengan hasil capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 68% persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dapat terealisasi sebanyak 82.03% atau sebesar 120%. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam pencapaian kinerja.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah petugas rehabilitasi yang memberikan formulir WHOQOL Breef mampu menjelaskan isi pertanyaan kepada klien/penanggung jawab klien untuk memudahkan dalam menjawab isi pertanyaan sehingga hasil persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dapat valid.

6. Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
7.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih pada Satker BNNP Kaltim	10 Orang	22 Orang	220 %

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi.

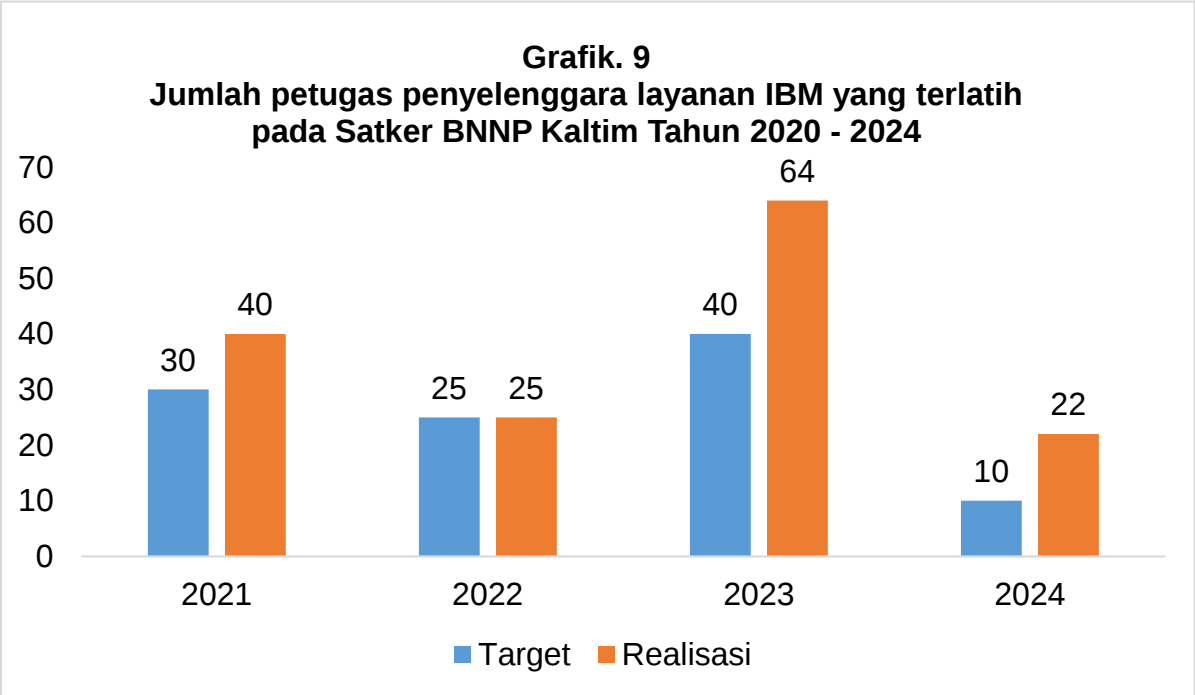
3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 10 orang jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dapat terealisasi sebanyak 22 Orang atau sebesar 220%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, mengalami penurunan

capaian pada tahun 2024 yaitu dari 64 petugas yang terlatih pada tahun 2023 menjadi 22 petugas yang terlatih pada tahun 2024.

Tabel 14
Realiasi Jumlah Petugas Penyelenggara
Layanan IBM Yang terlatih Periode 2021-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TAHUN	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih pada Satker BNNP Kaltim	2021	30	40
2			2022	25	25
3			2023	40	64
4			2024	10	22



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Timur (Renproja tahun 2020 - 2024) target indikator kinerja jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih tahun 2024 adalah 20 orang. Akan tetapi terjadi perubahan target pada dialog kinerja atau penyepakatan kinerja antara satker dan Pembina fungsi diawal tahun 2024 yaitu disepakati 10 orang saja dikarenakan faktor anggaran yang terbatas. Hasil capaian indikator kinerja jumlah

petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih tahun 2024 sebesar 22 orang atau 220%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 22 orang dari target 10 orang. Realisasi jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih pada tingkat nasional adalah kumulatif realisasi dari BNNP/BNNK seluruh Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

- a) Dukungan dari perangkat desa dalam layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat diwilayahnya;
- b) Koordinasi & kerja sama serta dukungan kepala desa, lurah, dan masyarakat.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja:

- a) Ada beberapa desa yang tidak aktif dalam melaksanakan layanan Rehabilitasi IBM (belum ada klien yang melaporkan diri untuk mengikuti program rehabilitasi);
- b) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang bahaya narkoba, sehingga perlu usaha lebih untuk menjalankan program IBM;
- c) Beberapa petugas yang sudah dilatih BNNP maupun BNNK dalam prakteknya masih belum memiliki keterampilan yang memadai dalam melaksanakan layanan rehabilitasi.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai target persentase jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, seksi rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur memaksimalkan SDM yang ada dengan melakukan pembagian tugas secara profesional.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menunjang adalah kendaraan dinas roda 4 serta alat pengolahan data yang masih terbatas. Meskipun demikian seksi rehabilitasi memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai target IKK tahun 2024.

c) Anggaran

Jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja sebesar Rp. 38,630,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 38,624,225,- atau 100% dengan hasil capaian indikator jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNN Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebesar 22 orang atau 220%.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

- a) Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya jika terdapat keluarga atau kerabatnya yang memiliki ketergantungan narkoba;
- b) melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi setelah melaksanakan pelatihan kepada petugas IBM supaya keterlampiran dalam melaksanakan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat dapat diterapkan dengan baik.

7.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba
----	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
8.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

3. Hasil Pengukuran Indikator

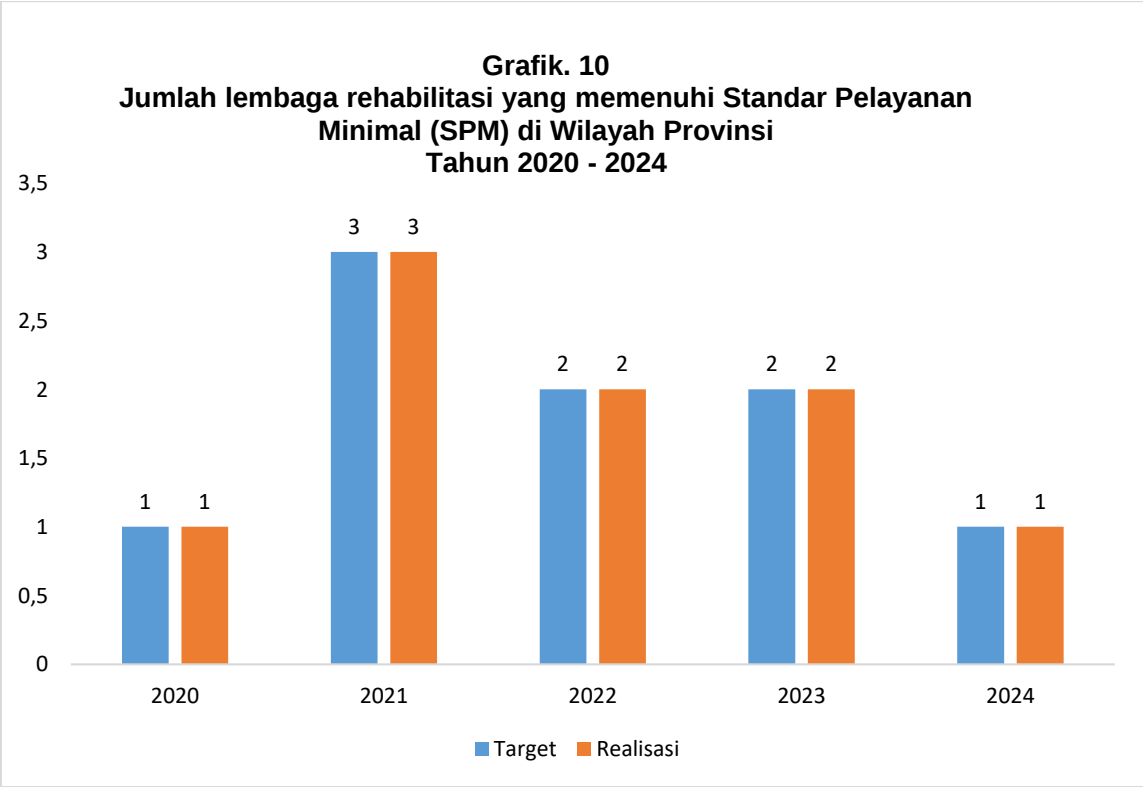
Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 1 lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 1 lembaga atau sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi, mengalami penurunan capaian pada tahun 2024 yaitu dari 2 lembaga pada tahun 2023 menjadi 1 lembaga pada tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan terjadinya penurunan target

kinerja pada tahun 2024 (1 target Lembaga yang SPM) jika dibandingkan dengan tahun 2023 (2 target lembaga yang SPM).

Tabel. 15
Realiasasi Jumlah Lembaga Rehabilitasi
Yang Memenuhi SPM wilayah Provinsi Periode 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TAHUN	Target	Realisasi
1	1. 2020 : Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Narkoba pada Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang Memadai 2. 2021 - 2024 : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	1. 2020 : Jumlah Fasilitas Rehabilitasi Milik Komponen Masyarakat yang Operasional 2. 2021 - 2024 : Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2020	1	1
2			2021	3	3
3			2022	2	2
4			2023	2	2
5			2024	1	1



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Timur (Renproja tahun 2020 - 2024) target jumlah lembaga rehabilitasi yang

memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi tahun 2024 adalah 6 lembaga. Akan tetapi terjadi perubahan target pada dialog kinerja atau penyepakatan kinerja antara satker dan Pembina fungsi diawal tahun 2024 yaitu disepakati 1 lembaga saja dikarenakan faktor anggaran yang terbatas, Hasil capaian indikator kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi tahun 2024 sebesar 1 lembaga atau 100% yaitu pada Puskesmas Baru Tengah Balikpapan.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah sebanyak 1 lembaga dari target 1 lembaga. Realisasi jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tingkat nasional adalah kumulatif realisasi dari BNNP/BNNK seluruh Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah koordinasi dilakukan secara masif baik melalui media video call, whatsapp, email maupun pembinaan secara langsung kepada seluruh fasilitas layanan rehabilitasi di wilayah Kalimantan Timur sehingga pada akhirnya seluruh lembaga rehabilitasi di wilayah provinsi Kalimantan Timur memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah jarak tempuh lembaga rehabilitasi di wilayah Kalimantan Timur rata-rata sangat jauh sehingga waktu pelaksanaan pembinaan maupun koordinasi menjadi kurang maksimal.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai target indikator kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi, seksi rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur memaksimalkan SDM yang ada dengan melakukan pembagian tugas secara profesional.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menunjang adalah kendaraan dinas roda 4 serta alat pengolah data yang masih terbatas. Meskipun demikian seksi rehabilitasi memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai target IKK tahun 2024.

c) Anggaran

Jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja sebesar Rp. 3.060.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.930.000,- atau 95% dengan hasil capaian indikator jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi tahun 2024 sebesar 1 lembaga atau 100%.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah dengan meningkatkan advokasi, koordinasi, serta pembinaan kepada lembaga rehabilitasi di wilayah Kalimantan Timur agar memenuhi standar pelayanan maksimal terkait upaya rehabilitasi kepada pecandu narkoba.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
9.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	8 Unit	8 Unit	100

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah unit atau kelompok

masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

2. Metode Pengukuran

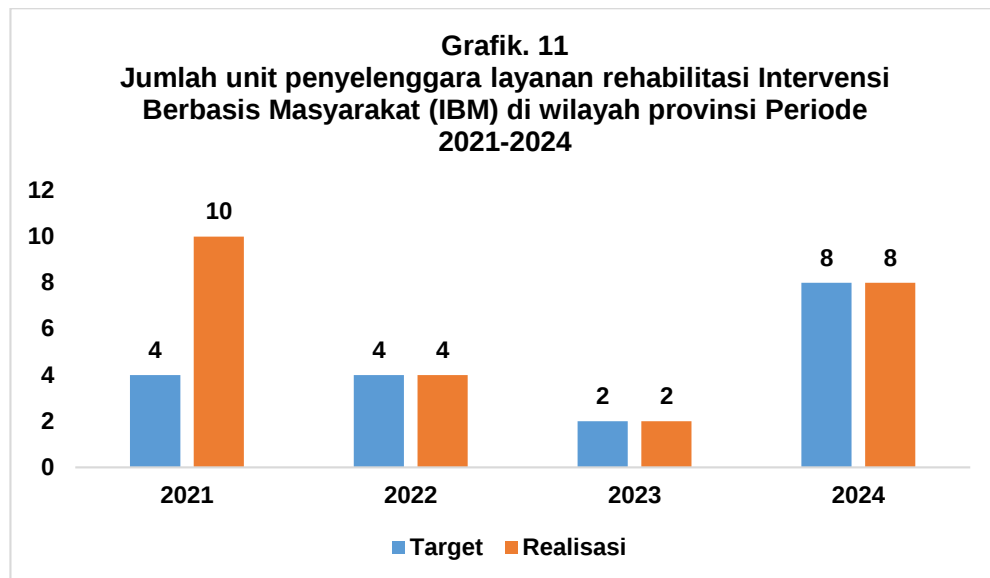
Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 8 unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 8 unit atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi, mengalami persamaan capaian pada tahun 2024 yaitu 8 unit IBM.

Tabel. 16
Realisasi Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Periode 2021-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tahun	Target	Realisasi
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	2021	4	10
		2022	4	4
		2023	2	2
		2024	8	8



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Timur (Renproja tahun 2020 - 2024) target indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi tahun 2024 adalah 7 unit. Akan tetapi terjadi perubahan target pada dialog kinerja atau penyepakatan kinerja antara satker dan Pembina fungsi diawal tahun 2024 yaitu disepakati 10 unit berdasarkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan rehabilitasi IBM.

Hasil capaian indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi tahun 2024 sebesar 8 unit atau 100% melebihi target jangka menengah yang hanya sebesar 7 unit saja.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah sebanyak 8 unit dari target 8 unit atau 100%. Realisasi jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah kumulatif realisasi dari BNNP/BNNK seluruh Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya kerjasama yang baik lintas program maupun lintas sektor terutama peran pemerintah daerah (kelurahan).

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

- a) Beberapa petugas IBM yang sudah terlatih masih berasumsi bahwa tugasnya dapat mengancam diri dan keluarganya ketika melaksanakan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, ancaman tersebut berasal dari pengedar diwilayahnya;
- b) Masih kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah terkait pelaksanaan Operasional IBM.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

- a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terbatas di bidang rehabilitasi sangat terbantu dengan adanya peran aktif dari masyarakat terutama Agen pemulihan yang membantu terlaksananya kegiatan intervensi berbasis masyarakat (IBM).

- b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah alat pengolah data serta kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

- c) Anggaran

Jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja sebesar Rp. 331,596,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 326,836,288,- atau 98,56% dengan hasil capaian indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi tahun 2024 sebesar 8 unit atau 100%. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam pencapaian kinerja.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah petugas layanan rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur memberikan pemahaman bahwa dalam melaksanakan proses pemulihan kepada klien merupakan tugas mulia dan memberikan rasa aman dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas IBM. Tetap menjalin komunikasi antara petugas, perangkat Desa, AP dan klien dan tetap melaksanakan monitoring terhadap unit IBM yang sudah terbentuk.

8. Sasaran : Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkoba

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
10.	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3.42	3.75	109%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana wajib melakukan survei kepuasan masyarakat dan wajib mempublikasikan hasil survei.

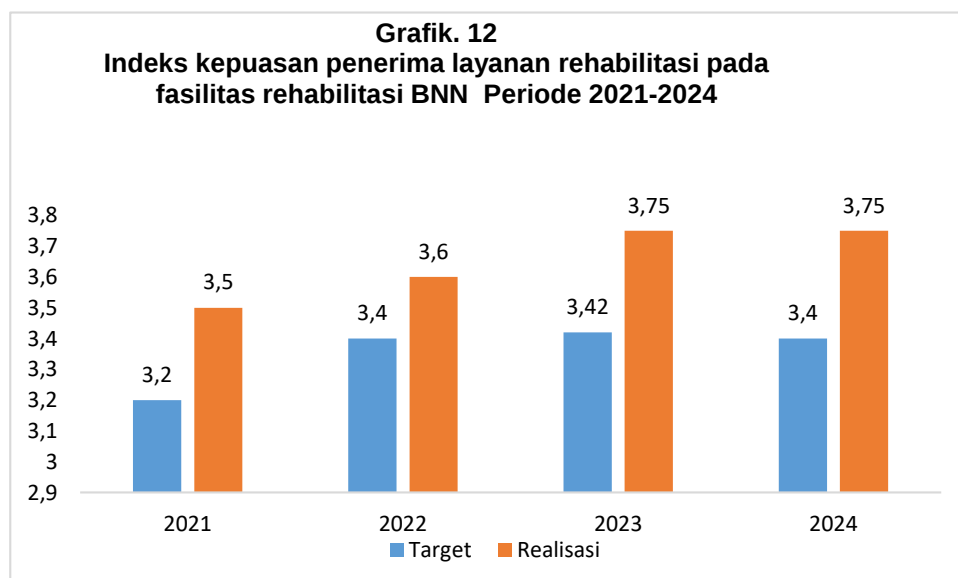
3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3,42 untuk nilai indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN dapat terealisasi sebesar 3.75 atau sebesar 109%.

Tabel. 17
Realisasi Indeks kepuasan
Penerima layanan Rehabilitasi pada fasilitas Rehabilitasi BNN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Unit Kerja	Target	Realisasi Wilayah	Realisasi Nasional
1	Meningkatnya kualitas layanan Rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan Rehabilitasi pada fasilitas Rehabilitasi BNN	BNNP Kaltim	3,42	3,75	3,62
2			BNNK Samarinda		3,8	
3			BNNK Balikpapan		3,65	
4			BNNK Bontang		3,36	
Rata-rata					3,7	

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN, mengalami peningkatan capaian pada tahun 2024 yaitu dari nilai 3.69 pada tahun 2023 menjadi 3.75 pada tahun 2024.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target indeks kepuasan layanan rehabilitasi dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kalimantan Timur (Renproja tahun 2020 - 2024) untuk tahun 2024 adalah 3.35 indeks. Target yang disepakati dalam perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu 3.42 indeks.

Capaian indeks kepuasan layanan rehabilitasi di klinik BNN Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil survey adalah 3.75 indeks atau 109%. Capaian ini berada diatas target jangka menengah BNN Provinsi Kalimantan Timur (target 3.42 indeks) dan Renstra BNN (target 3.2 indeks). Capaian ini didapat karena tingginya kepercayaan dan kepuasan masyarakat pada Layanan Rehabilitasi Klinik Pratama IPWL BNN Provinsi Kalimantan Timur.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi kinerja BNNP KALTIM dan BNNK Jajaran tahun 2024 dalam indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI dapat terlihat pada tabel 17 diatas

Dari data pada tabel 17 diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja BNN Provinsi Kalimantan Timur dan BNNK Jajaran sebesar 3.75 indeks. Hasil tersebut lebih tinggi dari realisasi kinerja indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN secara nasional sebesar 3.62 indeks. BNN Provinsi akan melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terarah dan sistematis lagi di tahun 2025 agar realisasi kinerja di tahun mendatang menjadi lebih baik dari capaian realisasi kinerja secara nasional.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah korelasi terhadap sasaran strategis Deputi Bidang Rehabilitasi adalah dengan dicapainya layanan rehabilitasi yang sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional, maka klien dapat menerima layanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya

terkait masalah ketergantungan narkoba. Sehingga program rehabilitasi yang dilaksanakan Klinik Pratama BNN Provinsi Kalimantan Timur memberikan hasil penanganan pemulihan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dirasakan manfaatnya oleh klien pada khususnya dan keluarga pada umumnya.

7. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah:

- a) Klien masih bingung dalam mengisi kuesioner indeks kepuasan layanan rehabilitasi;
- b) Kurangnya SDM dibidang upaya rehabilitasi baik secara kualitas dan kuantitas serta kurangnya sarana dan prasarana di bidang rehabilitasi.

8. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai kinerja meningkatnya indeks kepuasan Layanan klinik rehabilitasi, BNN Provinsi Kalimantan Timur memaksimalkan SDM yang ada. Dengan keterbatasan SDM koordinator berupaya untuk tetap memperhatikan mutu pelayanan yang ada di Klinik Pratama dengan melakukan pengaturan jadwal jaga di klinik dan memotivasi pegawai agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada penerima layanan (klien, keluarga klien dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi). Petugas Rehabilitasi pada Klinik Pratama BNN Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya menerima peningkatan kemampuan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh BNN RI baik secara luring maupun daring guna meningkatkan mutu layanan kepada klien.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah obat-obatan penunjang klien, alat medis dan formulir layanan rehabilitasi yang telah dipersiapkan.

c) Anggaran

Jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja sebesar Rp. 331,596,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 326,836,288,- atau 98,56% dengan hasil capaian indikator indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN sebesar 3.75 dari target 3.42 atau 109%

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah :

- peningkatan kompetensi kepada petugas layanan rehabilitasi dan petugas penunjang layanan rehabilitasi secara menyeluruh sesuai kompetensinya di Klinik Pratama BNNP Kaltim;
- pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP Kaltim;
- meningkatkan sosialisasi mengenai sasaran kegiatan dan indikator kinerja / survey kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNNP Kaltim

9.

Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.

Sasaran Kegiatan di atas, diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
11.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	15 Berkas Perkara	49 Berkas Perkara	326,67%

1. Definisi Operasional

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini yaitu jumlah Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain

wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

2. Metode Pengukuran

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

2. Hasil Pengukuran Indikator

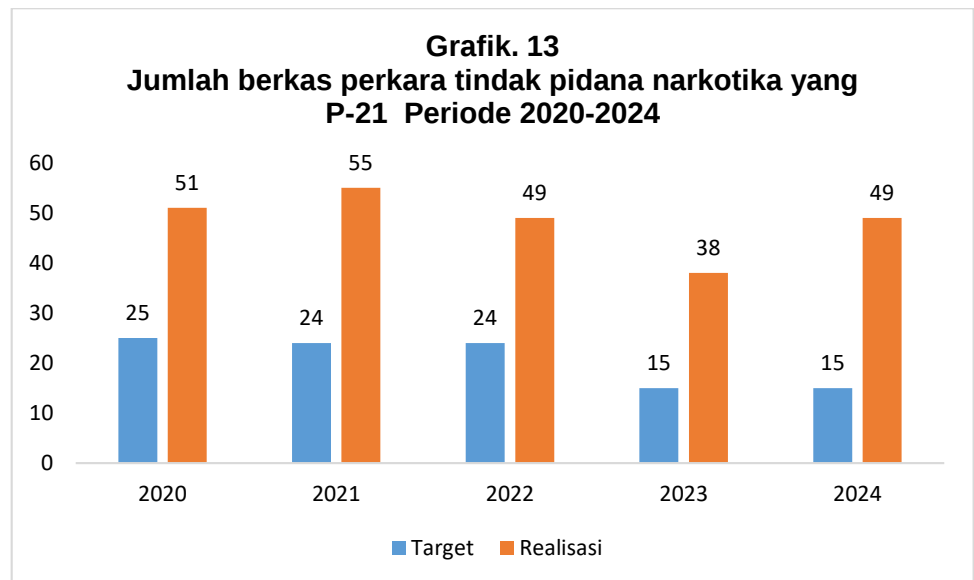
Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 15 jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dapat terealisasi sebanyak 49 berkas P-21 atau sebesar 326,67 %.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 menunjukkan terjadi peningkatan sebanyak 11 berkas P-21, yaitu dari 38 berkas P-21 pada tahun 2023 menjadi 49 berkas P-21 pada tahun 2024.

Tabel 18.

Realisasi Jumlah Berkas TPN yang P21 Periode 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	TAHUN	Target	Realisasi
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	2020	25	21
		2021	24	55
		2022	24	49
		2023	15	38
		2024	15	49



3. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kaltim (Renproja tahun 2020 - 2024) target indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 tahun 2024 adalah 49 berkas dengan presentase sebesar 326,67 %.

Hasil capaian indikator jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 tahun 2024 meningkat 11 berkas perkara dari tahun 2023. Untuk capaian target jangka menengah capaian indikator ini selalu melebihi target dari yang ditetapkan per tahunnya, sesuai kondisi penyesuaian target dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 dan berbeda dari tiga tahun sebelumnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian jumlah berkas perkara yang P-21 di level nasional adalah akumulasi jumlah berkas perkara P-21 di satker BNNP/BNNK seluruh Indonesia.

5. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target adalah kerjasama dan koordinasi yang baik antara BNNP Kaltim dan BNN RI dalam pengungkapan tindak pidana narkoba.

6. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Uji lab harus disertai permintaan keterangan ahli (Berita Acara Pemeriksaan Ahli) yang telah melakukan uji narkoba tersebut sehingga membutuhkan biaya perjalanan dinas lebih;
- b) Pada saat melakukan penangkapan atau RPE tidak ditemukan barang bukti narkoba, mengingat barang bukti narkoba adalah suatu hal yang wajib dalam penanganan narkoba.

7. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terbatas di bidang pemberantasan berjumlah 17 orang yang terdiri dari 14 orang personil Polri, 2 orang personil ASN, dan 1 Orang Petugas PPNNP Perbantuan BNN RI. Untuk pencapaian target kinerja BNN Provinsi Kaltim berkoordinasi dengan Pembina Fungsi di BNN RI.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah alat pengolah data serta kendaraan dinas roda empat, roda dua dan senjata api.

c) Anggaran

Jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja sebesar Rp. 621.931.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 603.139.871,- atau 96,98% dengan hasil capaian indikator jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 tahun 2024 sebesar 49 berkas dari target 15 berkas atau 326,66 %. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam pencapaian kinerja.

8. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah:

- a) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama mengenai proses P-21 dengan pihak terkait seperti Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan, Kemenkumham, dan pihak terkait lainnya;
- b) Menggunakan teknologi penyadapan di BNN RI;
- c) Menambah jumlah personil anggota Polri di Bidang Pemberantasan bekerjasama dengan Polda dan BNN RI.

10.**Sasaran :** Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

Sasaran Kegiatan di atas, diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
12	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100	100	100%

1. Definisi Operasional

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini yaitu Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi: tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

2. Metode Pengukuran

Adapun metode pengukuran tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNNP Kaltim. Adapun rumus penghitungan indikator kinerja ini sebagai berikut:

K3T : Nilai Kemanan, Ketertiban, dan Keselamatan Tahanan

a : Jumlah tahanan yang kabur

- b : Jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian
- c : Jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d.100. Maka:

$$K3T = \left(\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% \right) \times 100$$

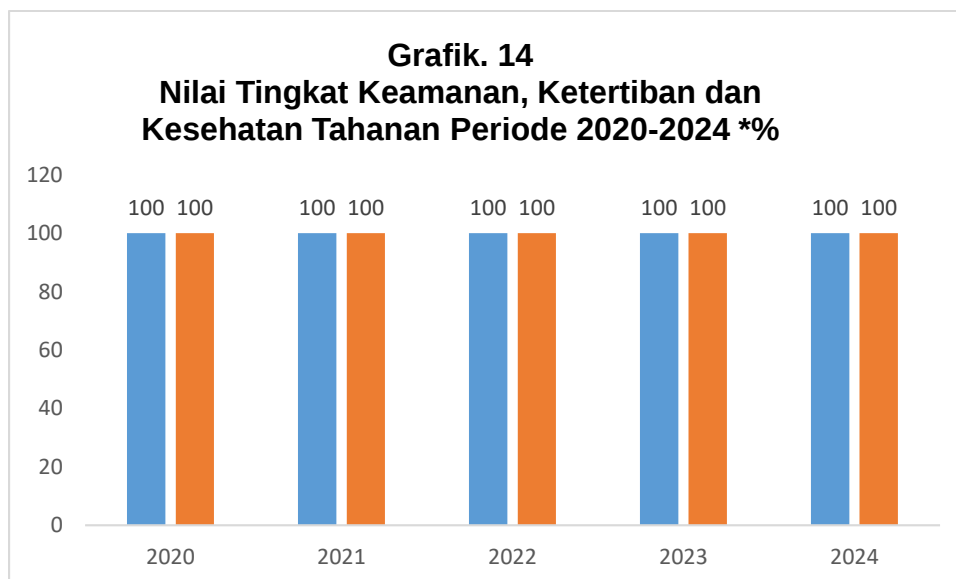
3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 100 untuk nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dapat terealisasi sebesar 100 atau sebesar 100%.

Tabel 19.
Realisasi Capaian Nilai Tingkat Keamanan,
Ketertiban dan Kesehatan Tahanan Tahun 2020- 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tahun	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	2020	100	100
			2021	100	100
			2022	100	100
			2023	100	100
			2024	100	100

Dari rentang nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba dari tahun 2020 s.d. 2024 tidak ada perubahan. Perbandingan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kaltim (Renproja tahun 2020 - 2024) target indikator kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan tahun 2024 adalah 100.

Hasil capaian indikator tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan tahun 2024 sebesar 100 atau 100%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian target indikator kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan di level nasional adalah akumulasi target indikator kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan di satker BNNP/BNNK seluruh Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target adalah Faktor pendukung keberhasilan target adalah :

- a) Petugas jaga tahanan telah dilatih dan diarahkan dengan baik sehingga tidak ada tahanan yang kabur atau meninggal akibat kelalaian petugas;
- b) Adanya tenaga kesehatan yang secara rutin memeriksa kesehatan tahanan.

7. Hambatan atau Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah kurangnya petugas jaga tahanan. Fungsi Sumberdaya manusia yang harusnya fokus dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab di Wastahti dalam merawat tahanan tidak bekerja sebagaimana tugas kinerja seharusnya dan kurangnya personil organik dari BNN hanya ada 1 (satu) orang BKO Polri sebagai petugas seksi wastahti.

8. Efisiensi atau penggunaan Sumber Data dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terbatas di bidang pemberantasan berjumlah 17 orang yang terdiri dari 14 orang personil Polri, 2 orang personil ASN, dan 1 Orang Petugas PPNP Perbantuan BNN RI. Untuk pencapaian target kinerja BNN Provinsi Kaltim berkoordinasi dengan Pembina Fungsi di BNN RI.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah alat pengolah data serta kendaraan dinas roda empat, roda dua dan senjata api.

c) Anggaran

Jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja sebesar Rp. 132.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 132.428.618,- atau 99.59% dengan hasil capaian indikator nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan sebesar 100 dari target 100 atau 100%.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah penambahan personil jaga tahanan.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
13.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika adalah nilai dari kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non-narkotika.

Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika, adalah kondisi keutuhan dan /atau kondisi penyusutan secara wajar (secara alamiah/kimiawi) pada barang bukti narkotika dan non-narkotika.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba dengan kriteria membandingkan data kondisi barang bukti narkoba dan non-narkoba pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II). Dengan perhitungan:

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran. Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran sama, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$. KKB= Nilai Keamanan Barang Bukti, a_1 = untuk barang bukti 1; a_2 = untuk barang bukti 2; a_y = dst. Dengan y = Jumlah BA (penitipan), dan asumsi: Jumlah BA penitipan = Jumlah BA pengeluaran. Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100

$$KKB = \left[\frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100$$

$$KKB = \left[\frac{1+1}{26} \times 100\% \right] \times 100 = 100$$

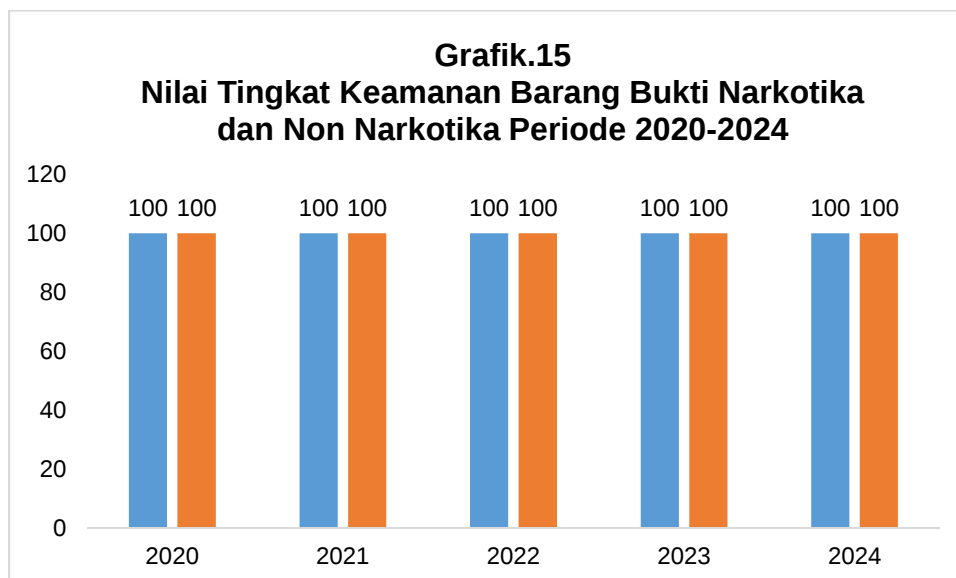
3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 100 untuk nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba dapat terealisasi sebesar 100 atau sebesar 100%.

Tabel. 20
Realisasi Nilai Tingkat Keamanan
Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tahun	Target	Realisasi
1	BNNP Kaltim	Meningkatnya Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	2020	100	100
				2021	100	100
				2022	100	100
				2023	100	100
				2024	100	100

Dari rentang nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika dari tahun 2020 s.d. 2024 tidak ada perubahan. Perbandingan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini.



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Kaltim (Renproja tahun 2020 - 2024) target indikator kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika tahun 2024 adalah

100. Hasil capaian indikator nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba tahun 2024 sebesar 100 atau 100%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian target indikator kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba di level nasional adalah akumulasi target indikator kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan di satker BNNP/BNNK seluruh Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target adalah kerjasama dan koordinasi yang baik antara BNNP Kaltim dan BNN RI dalam pengungkapan tindak pidana narkoba

7. Hambatan atau Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Uji lab harus disertai permintaan keterangan ahli (Berita Acara Pemeriksaan Ahli) yang telah melakukan uji narkoba tersebut sehingga membutuhkan biaya perjalanan dinas lebih;
- b) pada saat melakukan penangkapan atau RPE tidak ditemukan barang bukti narkoba, mengingat barang bukti narkoba adalah suatu hal yang wajib dalam penanganan narkoba.

8. Efisiensi atau penggunaan Sumber Data dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terbatas di bidang pemberantasan berjumlah 17 orang yang terdiri dari 14 orang personil Polri, 2 orang personil ASN, dan 1 Orang Petugas PPNPN Perbantuan BNN RI. Untuk pencapaian target kinerja BNN Provinsi Kaltim berkoordinasi dengan Pembina Fungsi di BNN RI.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah alat pengolah data serta kendaraan dinas roda empat, roda dua dan senjata api.

c) Anggaran

Jumlah anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja sebesar Rp. 132.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 132.428.618,- atau 99.59% dengan hasil capaian indikator nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan sebesar 100 dari target 100 atau 100%.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan adalah :

- a) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama mengenai proses P-21 dengan pihak terkait seperti Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan, Kemenkumham, dan pihak terkait lainnya;
- b) Menggunakan teknologi penyadapan di BNN RI;

- c) Menambah jumlah personil anggota Polri di Bidang Pemberantasan bekerjasama dengan Polda dan BNN RI.

11.	Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
------------	---

Sasaran Kegiatan di atas, diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
14	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur	91	98,68	108,44 %

1. Definisi Operasional

Definisi dan pengukuran kinerja dari sasaran kegiatan ini yaitu Nilai kinerja Anggaran (NKA) adalah kinerja capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran negara (APBN), NKA terintegrasi pada aplikasi SMART yang merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran K/L sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

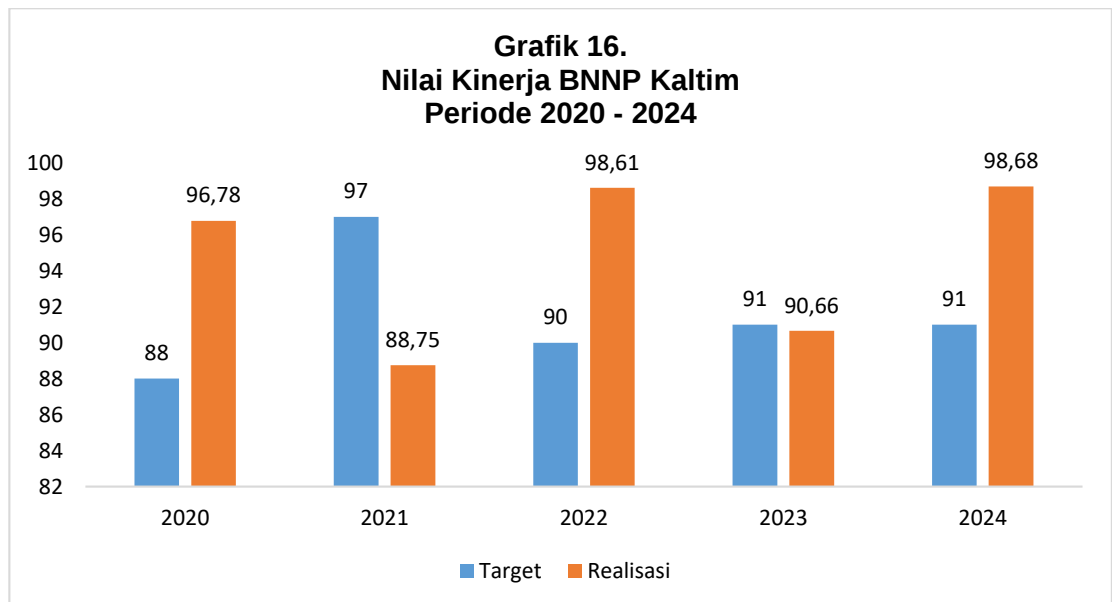
3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 91 untuk nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur dapat terealisasi sebesar 98.68 atau sebesar 108%.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	622651	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100,00	97,35	98,68

Tabel 21.
Nilai Kinerja Anggaran BNNP Kaltim Periode 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tahun	Target	Target	Persentase Realisasi
1	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	2020	88	96,78	109,98%
2			2021	97	88,75	91,49%
3			2022	90	96,21	109,57%
4			2023	91	90,66	99,63%
5			2024	91	98,68	108,44%



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara Nilai Kinerja Anggaran BNN mengalami kenaikan capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 8,02%. Pada tahun 2023 untuk Indikator Kinerja Kegiatan pada Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur dengan target sebesar 91 diperoleh nilai indeks 90,66. Dalam periode 2020 hingga 2024 perubahan target terjadi namun juga berpengaruh pada capaian realisasinya.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tingkat Nasional

Perbandingan realisasi kinerja indikator nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Provinsi Kalimantan Timur dengan tingkat nasional masih menunggu data dari Biro Perencanaan BNN RI.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan atau kegagalan pencapaian tingkat kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan target untuk indikator ini. Adapun faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Sinkronisasi data capaian output yang tidak sesuai antara OMSPAN dan Smart Kemenkeu.
- b) Tidak adanya bimtek dari Biro Perencanaan dan Kementerian Keuangan tentang Optimalisasi meningkatkan NKA pada satker kewilayahan.
- c) Indeks NKA pada Aplikasi Smart Kemenkue tidak terupdate pada bulan berjalan, hal ini terlihat bahwa nilai indeks NKA BNNP dari bulan maret – November 2024, masih berkisar 40 dan baru terlihat di akhir bulan desember 2024 mencapai nilai 98.
- d) Masih terjadi perubahan kebijakan terkait revisi eselon 1 yang seringkali menghambat proses kegiatan di tahun berjalan.
- e) Tidak ada Bimbingan Teknis langsung kepada masing masing Koordinator maupun Subkoordinator terkait faktor penghambat pelaksanaan kegiatan yang mampu mempengaruhi nilai kinerja anggaran.
- f) Keterlambatan sosialisasi atau pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masing masing bidang di Pembina Fungsi yang acapkali mendadak tanpa memperhitungkan timeline kegiatan.
- g) Keterlambatan pemutakhiran Revisi Hal 3 DIPA yang disebabkan proses revisi eselon 1 yang memakan waktu hingga 3 Bulan.

- h) Sinkronisasi data capaian output yang tidak sesuai antara OMSPAN dan Smart Kemenkeu. Perbandingan realisasi kinerja indikator nilai kinerja anggaran BNN pada BNN Provinsi Kalimantan Timur dengan tingkat nasional masih menunggu data dari Biro Perencanaan BNN RI.

7. Hambatan atau Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Kinerja

Tidak ada hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut karena BNNP Kaltim dan BNN RI selalu memantau kinerja jajarannya setiap bulan sehingga nilai NKA BNNK jajaran dapat memenuhi target.

8. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terbatas di BNN Provinsi Kaltim tidak menjadi penghalang dalam mewujudkan target kinerja

b) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah alat pengolah data.

c) Anggaran

Ada Anggaran yang disediakan untuk pencapaian target kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai NKA mencapai target adalah sebesar Rp. 62.277.000, dengan jumlah blokir yang dihapus sebesar Rp. 5.148.000,- sisa Rp 57. 129.000,- dengan Realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp. 51.908.032,- atau 90.86% dengan hasil capaian kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai NKA mencapai target sebesar 3 BNN Kabupaten/ Kota dari target 3

BNN Kabupaten/ Kota atau 100%. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam mencapai kinerja.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
15	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	3	3	100 %

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

2. Metode Pengukuran

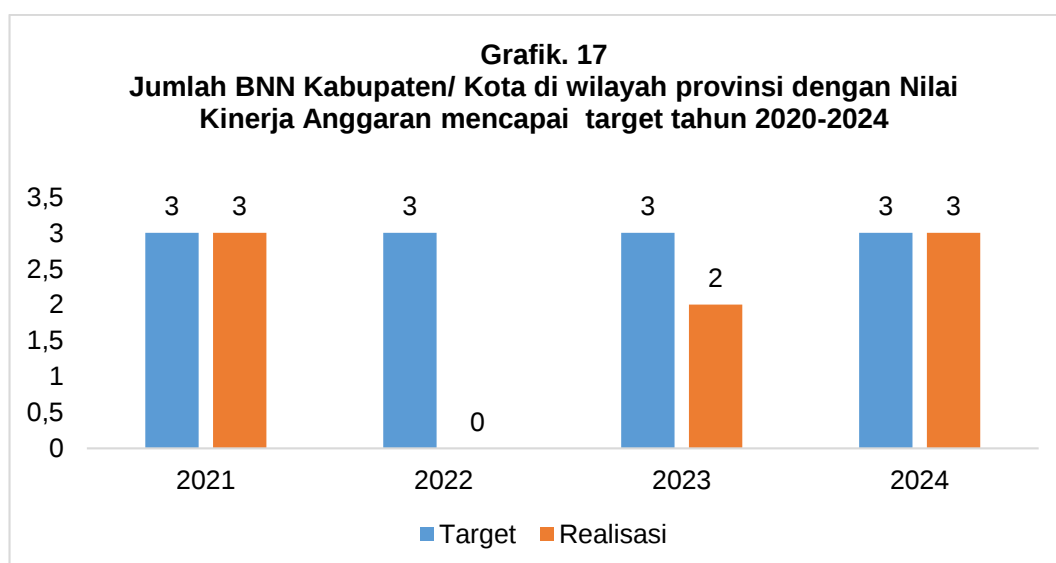
Metode pengukuran dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Timur yang memiliki Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sesuai dengan target IKK tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh BNN RI

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3 BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai NKA mencapai target dapat terealisasi sebesar 3 BNN Kab/Kota atau sebesar 100%.

Tabel 22.
Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan
Nilai Kinerja Anggaran mencapai target periode 2021 - 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tahun	Target	Realisasi	Persen Realisasi
1	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2021	3	3	100,00%
2			2022	3	0	0,00%
4			2023	3	2	66,67%
5			2024	3	3	100,00%



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Pada tahun 2024 dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3 Kab/Kota untuk Nilai Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target, mengalami kenaikan capaian sebesar 4 BNN Kabupaten/Kota sedangkan dari tahun 2020 capaian untuk indikator ini belum ada tercantum dalam non menklatur perjanjian kinerja. Berdasarkan grafik terlihat realiasi tercapai pada tahun 2021 dan 2024 sedangkan tahun 2022 dan 2023 target tidak tercapai.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian target indikator kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai NKA mencapai target adalah akumulasi target indikator kinerja di satker BNNP/BNNK seluruh Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Adapun faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Pemantauan secara berkala pada BNNP dan BNNK atas capaian nilai kinerja tiap triwulan.
- b) Kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran

Adapun faktor kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

7. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Kinerja

- a) Perubahan dalam aplikasi penginputan yang menyulitkan operator dalam menginput nilai capaian.
- b) Sinkronisasi yang lambat antara koneksi aplikasi Kementerian Keuangan.

8. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

- a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terbatas di BNN Provinsi Kaltim tidak menjadi penghalang dalam mewujudkan target kinerja

- b) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah alat pengolah data.

c) Anggaran

Ada Anggaran yang disediakan untuk pencapaian target kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai NKA mencapai target adalah sebesar Rp. 62.277.000, dengan jumlah blokir yang dihapus sebesar Rp. 5.148.000,- sisa Rp 57. 129.000,- dengan Realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp. 51.908.032,- atau 90.86% dengan hasil capaian kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai NKA mencapai target sebesar 3 BNN Kabupaten/ Kota dari target 3 BNN Kabupaten/ Kota atau 100%. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam mencapai kinerja.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.

Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Sasaran Kegiatan di atas, diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Timur	98,95	97,35	98,4%

1. Definisi Operasional

IKPA yaitu Kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang terintegrasi pada Online

Monitoring (OM) SPAN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementrian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, Efektifitas pelaksanaan anggaran, Efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan pada regulasi, sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/ Lembaga.

2. Metode Pengukuran

Pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berpedoman Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran IKPA Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu

Ada 3 aspek/sisi pengukuran dan 8 indikator kerja IKPA meliputi:

- 1) Aspek Kualitas Perencanaan (bobot 20%) merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari 2 indikator yaitu:
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (10%).
- 2) Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (bobot 55%) terdiri dari:
 - a. Penyerapan anggaran (20%)
 - b. Data Kontrak (10%)
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%)

d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)

e. Dispensasi SPM (5%)

3) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (bobot 25%) merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 1 indikator yaitu: capaian output (25%)

4) Rumus Perhitungan IKPA

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum \frac{\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n}{\text{Konversi Bobot}} \quad (n-1)$$

Keterangan:

- a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- b. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Satker tidak terdapat data terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

5) Kategori Nilai IKPA :

Sangat Baik : nilai IKPA ≥ 95

Baik : $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$

Cukup : $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$

Kurang : nilai IKPA < 70

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar sebesar 98.95 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Provinsi Kalimantan Timur dapat terealisasi sebesar 97.35 atau 98,4%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

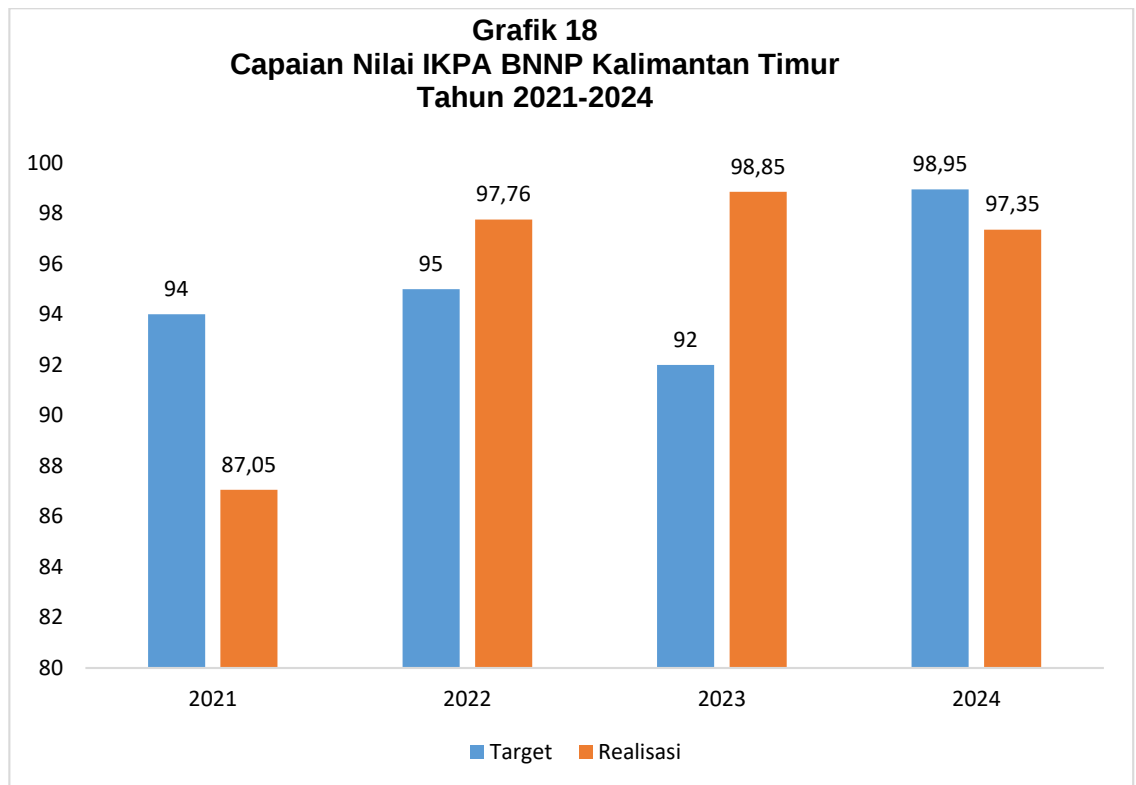
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	046	060	682651	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	87.90	98.48	0.00	0.00	100.00	100.00	77.88	80%	0.00	97.35
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	19.70	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.65		99.24			100.00					

Tabel 23
Nilai IKPA BNNP Kaltim Periode 2021-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TAHUN	Nilai IKPA		
				Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN	2021	94	87,05	92,61
2			2022	95	97,76	102,91
3			2023	92	98,85	107,45
4			2024	98,95	97,35	98,4



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Pada tahun 2024 dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 98,95 untuk Nilai IKPA dengan capaian 100, Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara indeks tidak mencapai target, mengalami kenaikan target 6,85 dan capaian sebesar 0,15. Untuk jangka menengah dari tahun 2021 hingga 2024 terdapat kenaikan target pada tahun 2021 ke 2022 kemudian menurun pada 2023. Pertimbangan naik dan turun targetnya mengikuti dari hasil capaian IKPA tiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut terlihat realiasi tercapai pada tahun 2021 dan 2024 sedangkan tahun 2020 dan 2023 target tidak tercapai. Dibandingkan capaian nilai IKPA tahun 2023 untuk BNNP terjadi peningkatan.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian target indikator kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target adalah akumulasi target indikator kinerja di satker BNNP/BNNK seluruh Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Adapun faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Pemantauan secara berkala pada BNNP dan BNNK atas capaian nilai kinerja tiap triwulan.
- b) Kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran

Adapun faktor kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Perubahan dalam aplikasi penginputan yang menyulitkan operator dalam menginput nilai capaian.
- b) Sinkronisasi yang lambat antara beberapa aplikasi yang terhubung pada Kementerian Keuangan.

7. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah pencatatan nilai kinerja anggaran masih terinput dalam aplikasi terpisah yang harusnya bisa dimunculkan pada aplikasi yang sudah ada seperti MonevPA dan Sakti.

8. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

- a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terbatas di BNN Provinsi Kaltim tidak menjadi penghalang dalam mewujudkan target kinerja

b) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah alat pengolah data.

c) Anggaran

Ada Anggaran yang disediakan untuk pencapaian target kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target adalah sebesar Rp.3.056.815.000 dan diblokir Sebesar Rp. 198.755.000 hingga menyisakan Rp. 2.858.060.000 maka realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.576.366.063 atau 90.14% dengan hasil capaian kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai NKA mencapai target sebesar 3 BNN Kabupaten/ Kota dari target 3 BNN Kabupaten/ Kota atau 100%. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam mencapai kinerja.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
17.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3	3	100%

1. Definisi Operasional

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan

selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

2. Metode Pengukuran

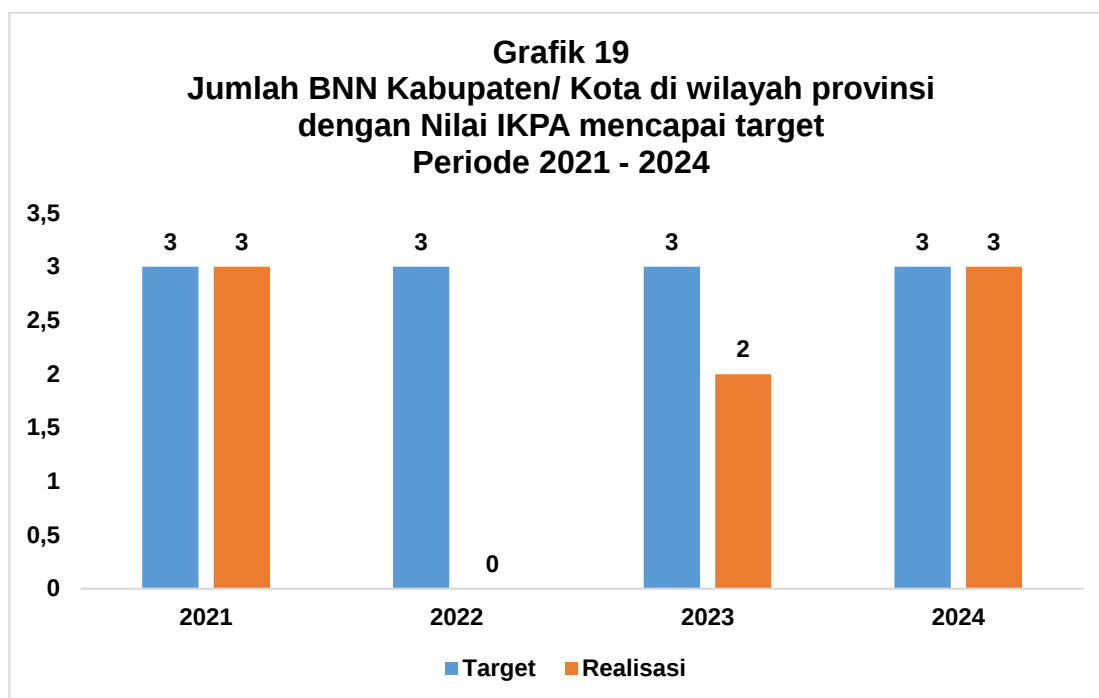
Metode pengukuran indikator kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kaltim yang memiliki nilai sesuai atau melebihi dari target IKK yang telah ditetapkan oleh BNN RI.

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3 BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target dapat terealisasi sebesar 3 BNN Kab/Kota atau sebesar 100%.

Tabel 24.
Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di
wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target
Periode 2021-2024

Periode 2021-2024					
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satker	Nilai IKPA	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN	BNNP Kaltim	98,85	97,35
2			BNNK Samarinda	95,71	97,12
3			BNNK Balikpapan	90	100
4			BNNK Bontang	94,65	99,79
Hasil Capaian 2024				3 Kab/Kota	3 Kab/Kota
Hasil Capaian 2021				3 Kab/kota	3 Kab/kota
Hasil Capaian 2022				2 Kab/kota	0 Kab/kota
Hasil Capaian 2023				3 Kab/kota	2 Kab/kota



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Pada tahun 2024 dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 97,35 untuk Nilai Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara indeks tidak mencapai target, mengalami kenaikan capaian Berdasarkan grafik diatas terlihat realiasi tercapai pada tahun 2021 dan 2024 sedangkan tahun 2020 dan 2023 target tidak tercapai.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian target indikator kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai NKA mencapai target adalah akumulasi target indikator kinerja di satker BNNP/BNNK seluruh Indonesia.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Adapun faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

a) Pemantauan secara berkala pada BNNP dan BNNK atas capaian nilai kinerja tiap triwulan.

b) Kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran

Adapun faktor kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

a) Perubahan dalam aplikasi penginputan yang menyulitkan operator dalam menginput nilai capaian.

b) Sinkronisasi yang lambat antara beberapa aplikasi yang terhubung pada Kementerian Keuangan.

7. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah pencatatan nilai kinerja anggaran masih terinput dalam aplikasi terpisah yang harusnya bisa dimunculkan pada aplikasi yang sudah ada seperti MonevPA dan Sakti.

8. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terbatas di BNN Provinsi Kaltim tidak menjadi penghalang dalam mewujudkan target kinerja

b) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah alat pengolah data.

c) Anggaran

Ada Anggaran yang disediakan untuk pencapaian target kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target adalah sebesar Rp.3.056.815.000 dan diblokir sebesar

Rp. 198.755.000 hingga menyisakan Rp. 2.858.060.000 maka realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.576.366.063 atau 90.14% dengan hasil capaian kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai NKA mencapai target sebesar 3 BNN Kabupaten/ Kota dari target 3 BNN Kabupaten/ Kota atau 100%. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam mencapai kinerja.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.	Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kinerja Vertikal
------------	---

Sasaran Kegiatan di atas, diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
18.	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	78	79,44	101,85 %

1. Definisi Operasional

Nilai Zona Integritas BNN dibuat Berdasarkan Penilaian Internal adalah nilai Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yang diwujudkan berdasarkan aturan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021

tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah dengan cara melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran Nilai Zona Integritas pada BNN Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penilaian internal oleh Tim Inspektorat BNN RI mengacu pada beberapa tahapan yaitu:

a. Pencanaan ZI:

- Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai
- Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas

b. Pembangunan ZI

- Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM
- Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM

c. Pengusulan

- Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
- TPI melaporkan kepada pimpinan instansi
- Pengusulan ke Kemen PAN RB

d. Reviu TPN

- Reviu oleh Tim Penilai Nasional (Kemenpan-RB, KPK, dan Ombudsman RI)

e. Penetapan WBK/WBBM

- MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK
- MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM

f. Pembinaan dan Pengawasan

- Pembinaan dan Pengawasan
- Pembinaan dilakukan Pimpinan Instansi K/L
- Pengawasan dilakukan oleh Kementerian PANRB

3. Hasil Pengukuran Indikator

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 78 untuk Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal dapat terealisasi sebesar 79.44 atau sebesar 101,85 %. Nilai diperoleh berdasarkan Surat Inspektur Utama BNN Nomor: B/ 658/XII/IR/IR.04.05/2024/ INS perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas Berdasarkan Penilaian Internal pada BNNP Tahun 2024.

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

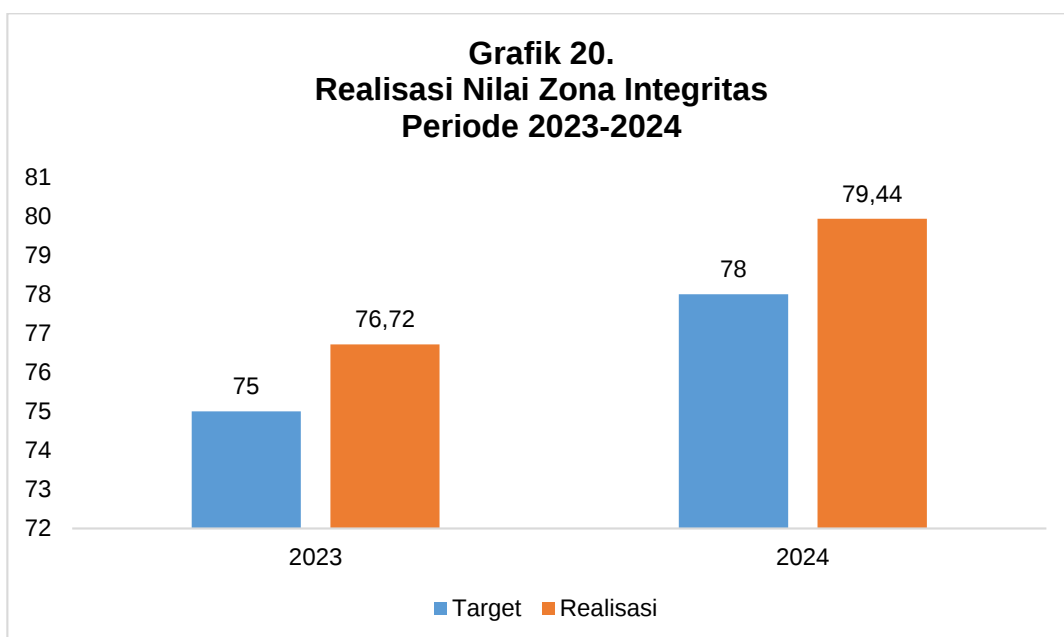
**LAMPIRAN
SURAT Inspektur Utama BNN
NOMOR : B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS
TANGGAL : 30 Desember 2024**

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN
PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2024**

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
18	BNNP Kalimantan Timur	43.10	36.34	79.44

Tabel 25.
Nilai Zona Integritas BNNP Kaltim Periode 2023 -2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun	Nilai IKPA		
				Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kinerja Vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	2023	75	76,72	102,29%
2			2024	78	79,44	101,85%



4. Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Pada tahun 2024 dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 78 untuk Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal dapat terealisasi sebesar 79.44 sedangkan pada tahun 2023 dengan target 75 realisasi sebesar 76,72.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tingkat Nasional

Realisasi capaian target indikator kinerja Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal di level nasional satker diperoleh berdasarkan Surat Inspektur Utama BNN Nomor: B/ 658/XII/IR/IR.04.05/2024/ INS perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas Berdasarkan Penilaian Internal pada BNNP Tahun 2024 BNN Provinsi Kaltim berada di peringkat 18 dari total 34 Provinsi.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Adapun faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas BNN Provinsi Kalimantan Timur.
- b) Melakukan dan membentuk inovasi-inovasi yang mendukung pelaksanaan Pembangunan ZI.
- c) Melaksanakan kegiatan Pembangunan Zona Integritas serta mengupdate secara rutin LKE.
- d) Melakukan monev Pembangunan ZI setiap triwulan.
- e) Memotivasi Pegawai untuk melaksanakan Pembangunan ZI disetiap pokja pada apel pagi.

7. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Kinerja

Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah tidak adanya ketersediaan anggaran khusus dalam pembangunan ZI di satuan kerja BNNP maupun BNNK.

8. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terbatas di BNN Provinsi Kalimantan Timur tidak menjadi penghalang dalam mewujudkan target kinerja Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal.

b) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah alat pengolah data, media cetak promosi maupun iklan layanan Masyarakat, media online, serta kendaraan dinas roda empat, roda dua dan senjata api.

c) Anggaran

Tidak tersedia anggaran atau non dipa.

9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai berikut sebagai langkah perbaikan untuk memaksimalkan capaian kinerja sebagai berikut:

- a) Konsisten berkomitmen untuk meningkatkan capaian dari masing masing pokja.
- b) Melakukan monev setiap bulan pelaksanaan Pembangunan ZI.
- c) Membuat rencana Kerja Pembangunan ZI dan memantau pelaksanaan rencana kerja disetiap bulannya pada masing-masing pokja di lembar kerja LKE ZI.
- d) Melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan kinerja BNNP.

- e) Melakukan studi banding Pembangunan ZI pada satker lain lingkup BNN maupun satker vertikal yang ada di Kalimantan Timur yang telah mendapat predikat WBK

B. Akuntabilitas Keuangan.

Tahun 2024 BNNP Kaltim beserta BNNK Jajaran mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp 13.150.942.000** (Tiga Belas Miliya Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 (dua) Program di wilayah Kalimantan Timur (BNNP dan BNNK) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26.
Jenis Belanja, Pagu DIPA dan R.ealisasi Anggaran
BNNP KALTIM DAN BNNK JAJARAN
TA. 2024

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% REAL	% SISA
165441	BNNK BONTANG	Rp 1.511.471.000	Rp 1.497.605.257	Rp 13.865.743	99,08%	1%
066.01.BL	Program P4GN	Rp 510.029.000	Rp 499.959.000	Rp 10.070.000	98,03%	2%
066.01.WA	Dukjemen	Rp 1.001.442.000	Rp 997.646.257	Rp 3.795.743	99,62%	0%
689025	BNNK SAMARINDA	Rp 1.818.009.000	Rp 1.786.283.512	Rp 31.725.488	98,25%	2%
066.01.BL	Program P4GN	Rp 525.409.000	Rp 509.344.400	Rp 16.064.600	96,94%	3%
066.01.WA	Dukjemen	Rp 1.292.600.000	Rp 1.276.939.112	Rp 15.660.888	98,79%	1%
165249	BNNK BALIKPAPAN	Rp 1.918.829.000	Rp 1.902.780.171	Rp 16.048.829	99,16%	1%
066.01.BL	Program P4GN	Rp 522.640.000	Rp 511.834.634	Rp 10.805.366	97,93%	2%
066.01.WA	Dukjemen	Rp 1.396.189.000	Rp 1.390.945.537	Rp 5.243.463	99,62%	0%
682651	BNNP KALTIM	Rp 7.902.633.000	Rp 7.590.848.131	Rp 311.784.869	96,05%	4%
066.01.BL	Program P4GN	Rp 1.920.693.000	Rp 1.899.904.348	Rp 20.788.652	98,92%	1%
066.01.WA	Dukjemen	Rp 5.981.940.000	Rp 5.690.943.783	Rp 290.996.217	95,14%	5%
Akumulasi Perhitungan BNNP Kaltim dan Jajaran BNNK						
066.01.BL	Program P4GN	Rp 3.478.771.000	Rp 3.421.042.382	Rp 57.728.618	98%	2%
066.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp 9.672.171.000	Rp 9.356.474.689	Rp 315.696.311	97%	3%
Total		Rp13.150.942.000	Rp 12.777.517.071	Rp 373.424.929	97%	3%

Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur beserta BNNK jajarannya tahun 2024 dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN, dengan pagu sebesar Rp 9.672.171.000,-

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 9.672.171.000,- telah terealisasi Rp 9.356.474.689 (97%), sisa anggaran sebesar Rp. 315.696.311,- (3%). Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat alokasi pembayaran gaji pegawai serta uang makan yang dibayar sesuai dengan kehadiran masuk kerja setiap pegawai. Pengawasan yang ketat terhadap kehadiran pegawai sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan untuk mendukung capaian organisasi. Penyebab lain tidak terserapnya anggaran disebabkan adanya sisa dari kegiatan layanan perkantoran serta pengeluaran kegiatan yang dilakukan se-efisien mungkin.

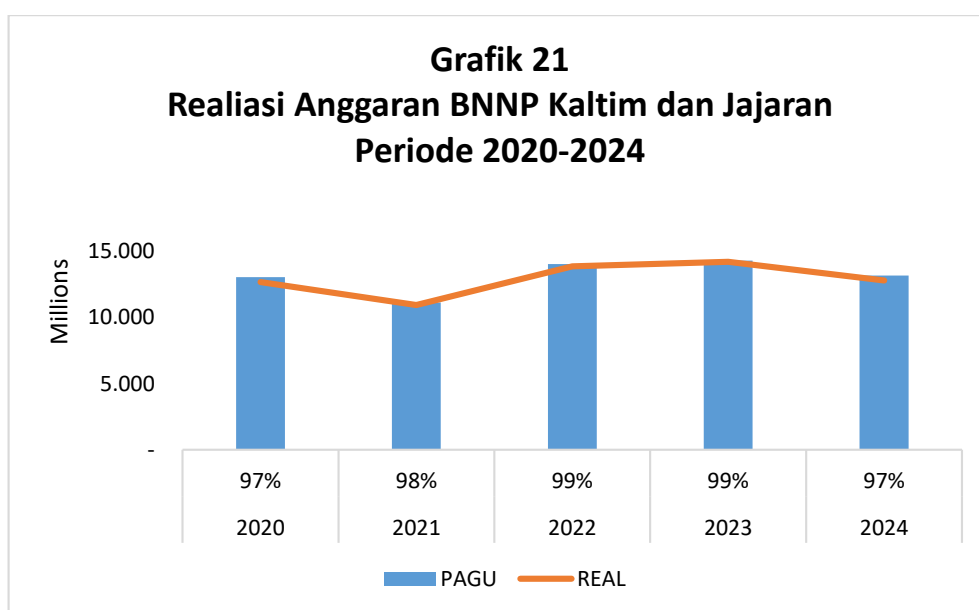
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan pagu sebesar Rp 3.478.771.000

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 3.478.771.000,- telah terealisasi sebesar Rp 3.421.042.382 (97%), sisa anggaran sebesar Rp. 57.728.618 (2%). Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat disebabkan adanya sisa dari kegiatan di P2M, Pemberantasan, dan Rehabilitasi yang sudah terlaksana tetapi terdapat sisa anggaran. Hal tersebut berasal dari sisa anggaran perjalanan dinas, ATK, dan paket meeting. Sisa anggaran juga terdapat pada layanan PNBPN terhadap penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) yang tidak mencapai target.

Penyebab lain tidak terserapnya anggaran disebabkan adanya sisa dari kegiatan layanan perkantoran serta pengeluaran kegiatan yang dilakukan se-efisien mungkin. Hal ini menjadi tantangan ke depannya bagi BNNP Kaltim untuk dapat mempertahankan capaian tersebut. Demikian pula untuk realisasi anggaran BNNP Kaltim juga mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Tabel 27.
Realiasi Anggaran BNNP Kaltim dan Jajaran
Periode 2020-2024

TAHUN	PAGU	REAL	%
2020	13.026.363.000	12.644.645.702	97%
2021	11.112.416.000	10.913.040.189	98%
2022	14.010.995.000	13.833.675.852	99%
2023	14.278.095.000	14.177.300.956	99%
2024	13.150.942.000	12.777.517.071	97%



Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur beserta BNNK jajarannya sejak 2020 hingga 2024, mengalami penurunan pagu pada tahun 2021 namun pagu kemudian nilainya meningkat pada 2022 dan 2023 kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2024, untuk realisasasi sendiri mengalami peningkatan signifikan 1% pertahun dari 2020 hingga 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 sebanyak 2%

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

BNNP Kaltim merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disajikan pada Bab sebelumnya, Dari target kinerja yang ditetapkan melalui 18 (Delapan Belas) indikator kinerja dapat disimpulkan :

1. 7 (Sebelas) indikator melebihi target yang ditetapkan yaitu :

Tabel 28.
Capaian IKK yang Melebihi Target Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian
1	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	132,14%
2	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	220%
3	Meningkatnya Upaya Pemulihan penyalahguna dan atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	120,63%
4	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur	109,65 %
5	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	326,67 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian
6	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Timur	108,44 %
7	Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	101,85 %

2. 9 (Sembilan) indikator sesuai target yang ditetapkan yaitu :

Tabel 29.
Capaian IKK yang Sesuai Target Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian
1	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	100 %
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	100 %
3	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	100 %
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia	100 %
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang operasional	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian
6	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100 %
7	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 %
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	100 %
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	100 %

3. 2 (Dua) indikator belum tercapai secara maksimal yaitu :

Tabel 30.
Capaian IKK yang Tidak Memenuhi Target Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian
1	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	66,67%
2	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Timur	98,4%

4. Tingkat capaian realisasi anggaran BNNP Kaltim mencapai 96,05 %, sedangkan untuk kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 97%.

5. Adapun langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja:

- a. Perubahan target kinerja sebagai kebijakan dari Pembina fungsi akan diikuti dengan revisi Perjanjian Kinerja

- b. Adanya peluang yang tinggi untuk mengikuti pengembangan kapasitas berupa pendidikan, pelatihan, bimtek bagi seluruh fungsional dan pelaksana di jajaran BNN RI.
- c. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama ke seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas.
- d. Peningkatan kerjasama dengan seluruh instansi pemerintah, swasta serta organisasi (LSM) agar berperan aktif dan bersinergi dalam program P4GN sesuai amanat inpres 02 tahun 2020 tentang RAN P4GN & PN.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Dialog Kinerja untuk target kinerja agar dilaksanakan sebelum awal tahun, agar musrembang dapat dilaksanakan di awal tahun, sehingga kegiatan program P4GN di setiap bidang dapat segera dilaksanakan sehingga pencapaian kinerja dapat lebih optimal.
2. Perubahan kebijakan yang berakibat pada perubahan rencana anggaran dan kegiatan, agar segera mungkin diberitahukan kepada BNNP/BNNK untuk arah dan proses perubahannya.

3. Pengendalian secara menyeluruh dalam pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan pokja untuk meningkatkan nilai Zona Integritas dilingkungan BNN Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR
TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUDI HARTONO, S.H.,S.I.K.

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.

Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

RUDI HARTONO, S.H.,S.I.K.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,8 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	8 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		(IBM) yang operasional di wilayah provinsi	
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42 Indeks
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	15 Berkas Perkara
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 %
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 %
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	91 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
16	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,95 Indeks
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
18	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	78 Indeks

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.3.056.815.000
2. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.65.540.000
3. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.62.277.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.6.754.767.000
5. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.438.700.000
6. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.90.000.000
7. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.150.000.000
8. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.56.060.000
9. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.824.382.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.278.745.000
11. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.97.970.000
12. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.690.707.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.50.000.000
14. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.820.000.000
15. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.383.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

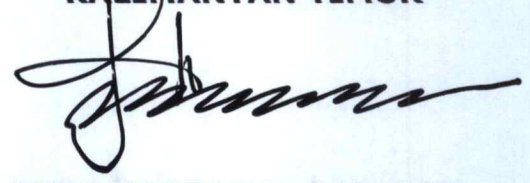


MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**



RUDI HARTONO, S.H.,S.I.K.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

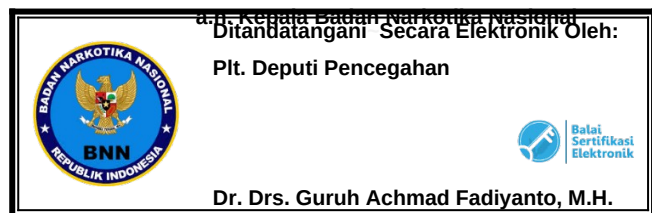
/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI



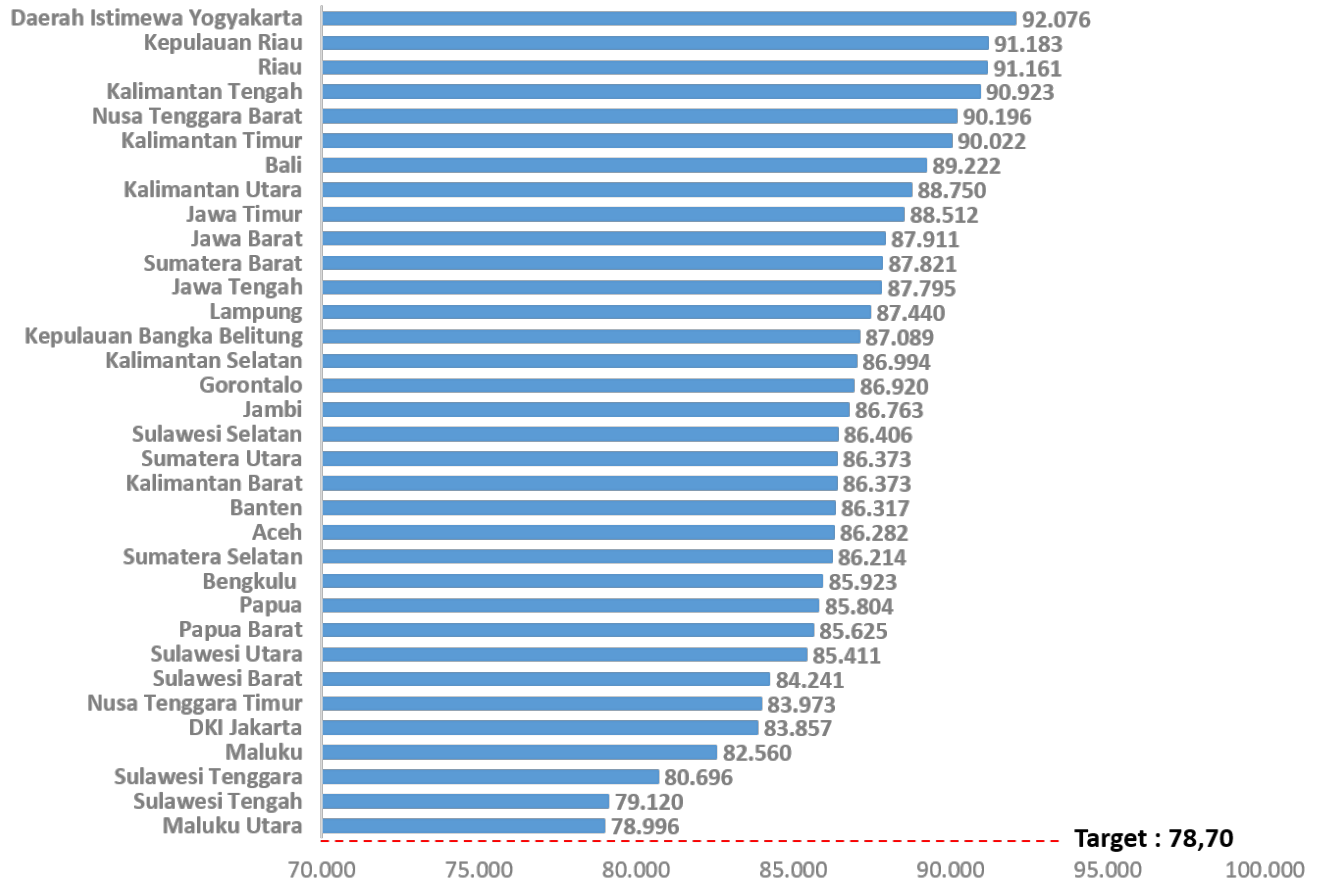
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Pencegahan

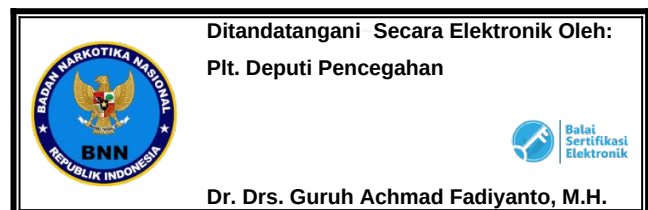


Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.

GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**

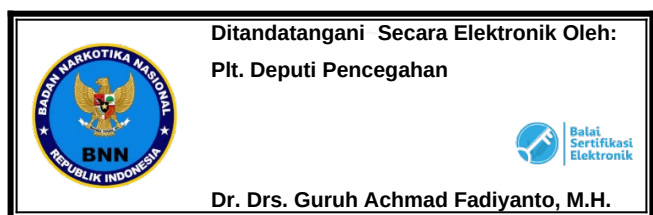
di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAHI	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Plt. Deputi Pencegahan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/9/I/DE/PM.01/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 6 Lembar
Perihal : Hasil Pengukuran IKRN di Wilayah
Program Pemberdayaan Alternatif

Jakarta, 03 Januari 2025

Kepada

Yth. **Kepala BNN Provinsi**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Program Kerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN T.A. 2024.

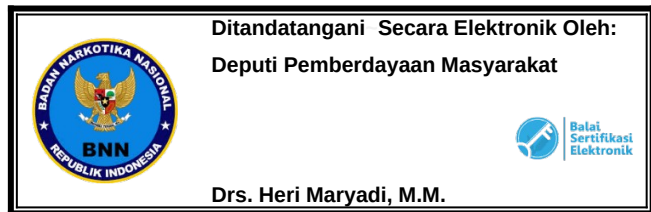
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) tahun 2024 melalui jajarannya P2M BNN Provinsi dan BNNK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKRN terlampir dengan masing-masing wilayah yang diintervensi program pemberdayaan alternatif BNNP dan BNNK, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Alternatif di tahun selanjutnya.

/4. Demikian ...

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGUKURAN IKRN DI WILAYAH PROGRAM
PEMBERDAYAAN ALTERNATIF TAHUN 2024**

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
1	BNNP Aceh	Desa Meunasah Baktrieng, Kec Barona Jaya, Aceh Besar	Waspada	3.45	Siaga
		Gampong Meurah Kec Seulimum, Kab Aceh Besar	Bahaya	3.54	Siaga
		Gampong Mureu Baro Kec Indrapuri Kab Aceh Besar	Bahaya	3.70	Siaga
2	BNNK Gayo Lues	Desa Beranang, Kec. Kuta Panjang	Waspada	3.43	Siaga
		Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren	Waspada	3.66	Aman
		Desa Penosan Kec. Blangjerango	Waspada	3.71	Aman
		Desa Bukit Kec. Blangkajeren, Kab. Gayo Lues	Waspada	3.29	Aman
		Desa Pertik Kec. Pining Kab. Gayo Lues	Waspada	3.80	Siaga
3	BNNK Lhokseumawe	Gampong Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Waspada	3.18	Siaga
		Gampong Teupin Reusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Waspada	3.54	Aman
		Gampong Blang Banyak Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Waspada	3.85	Siaga
		Gampong Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Waspada	3.76	Siaga
4	BNNK Bireuen	Pase Kec. Juli Kab. Bireuen	Waspada	3.18	Siaga
		Cot Bada Kec. Jeumpa Kab. Bireuen	Waspada	3.54	Aman
		Seubok Meujim-jim Kec. Juli Kab. Bireuen	Waspada	3.85	Siaga

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/9/I/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 03 Januari 2025

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
		Bale Me Kec. Kutablang Kab. Bireuen	Waspada	3.76	Siaga
5	BNNP Sumatera Utara	Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan	Bahaya	3.64	Aman
		Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan	Bahaya	3.38	Siaga
6	BNNP Sumatera Barat	Desa Balai Naras, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman, Prov. Sumatera Barat	Bahaya	3.66	Siaga
7	BNNP Sumatera Selatan	Desa Gasing, Kec. Tatang Kelapa, Kab. Banyuasin	Bahaya	3.73	Siaga
		Kel. Sukarami Kec Sukarami, Kota Palembang	Waspada	3.76	Siaga
8	BNNP Lampung	Desa Kibang, Kec. Metro Kibang, Kab. Lampung Timur	Bahaya	3.47	Aman
9	BNNP Riau	Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau	Bahaya	3.87	Aman
10	BNNP Kepulauan Riau	Kel. Sungai Pasir, Kec. Meral Kab. Tanjung Balai Karimun, Prov. Kepri	Bahaya	3.39	Siaga
11	BNNP Bengkulu	Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu	Waspada	3.52	Aman
12	BNNP DKI Jakarta	Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat	Bahaya	3.80	Aman
13	BNNP Jawa Tengah	Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov Jawa Tengah	Bahaya	3.58	Siaga
14	BNNP Jawa Barat	Desa Sukatani Kec. Sukatani Kab. Purwakarta	Bahaya	3.74	Aman

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/9/I/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 03 Januari 2025

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
		Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab Pangandaran	Waspada	3.76	Aman
15	BNNK Sukabumi	Desa Cibolang. Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Bahaya	3.29	Siaga
16	BNNP Jawa Timur	Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan	Bahaya	3.67	Aman
		Desa Randubango, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto	Waspada	3.66	Aman
17	BNNK Sidoarjo	Desa Banjarkemantren, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Waspada	2.96	Waspada
18	BNNP Kalimantan Barat	Desa Suka harja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Prov Kalimantan Barat	Bahaya	3.37	Aman
		Kel. Dalam Bugis Pontianak, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak	Bahaya	3.28	Aman
		Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak	Siaga	3.50	Aman
		kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak	Waspada	3.40	Aman
		Desa Kapur. Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	Bahaya	3.58	Aman
		Kel. Sungai Pinyuh kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah	Siaga	3.71	Siaga
		Kel. Roban Singkawang	Bahaya	4.17	Aman
		Kel. Condong Singkawang	Waspada	3.66	Aman
		Kel. Sedau Singkawang	Bahaya	3.26	Aman
		Kel. Sungai Garam Hilir Singkawang	Siaga	3.58	Siaga
		Desa Jagoi Bengkayang	Bahaya	3.45	Aman
		Desa Pulau Lemukutan Bengkayang	Bahaya	2.79	Waspada

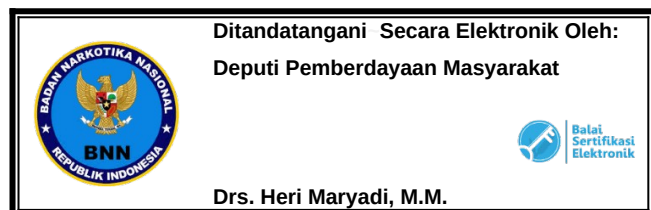
LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/9/I/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 03 Januari 2025

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
19	BNNP Kalimantan Tengah	Kel. Baamang Barat Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur	Bahaya	3.78	Aman
20	BNNP Kalimantan Selatan	Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Bahaya	3.47	Aman
		Kel. Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	Bahaya	3.47	Aman
21	BNNP Sulawesi Utara	Kel. Airmadidi Atas, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara, Prov Sulawesi Utara	Bahaya	3.29	Aman
22	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi	Bahaya	3.58	Siaga
23	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Panakkukang, Kec. Pallangga Kab Gowa Prov Sulsel	Waspada	3.44	Siaga
24	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari, Prov Sulawesi Tenggara	Waspada	3.63	Siaga
25	BNNP Maluku Utara	Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate	Waspada	3.58	Siaga
26	BNNP Nusa Tenggara Barat	Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara	Waspada	3.38	Aman
27	BNNP Bali	Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan	Waspada	-	-
		Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan	Waspada	-	-
28	BNNK Badung	Desa Mengwitani, Kec. Mengwi	Waspada	3.55	Aman
		Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara	Waspada	3.65	Aman
29	BNNP Banten	Kel. Banten, Kec. Kasemen, Kota Serang	Waspada	3.70	Siaga
30	BNNP Bangka Belitung	Desa Belo Laut, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat	Waspada	3.48	Aman
		Desa Air Putih, Kec. Mentok Kab. Bangka Barat	Waspada	2.86	Waspada
31	BNNP Kalimantan Timur	Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Pasir Utara,	Bahaya	3.70	Siaga
32	BNNP Maluku	Kel. Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kab. Ambon	Waspada	-	-
33	BNNP Gorontalo	Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bulango	Waspada	3.58	Aman

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
		Desa Ayula Timur Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bulango	Waspada	3.53	Aman
34	BNNP Papua	Kel. Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura	Waspada	3.41	Aman
35	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Desa Sepanjang Kec. Gondanglegi Kab. Malang, Jawa Timur	Bahaya	3.68	Aman
		Kel. Pasir Gintung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung	Bahaya	3.20	Siaga
		Kel. Bontorannu, Kec. Mariso, Sulawesi Selatan	Waspada	3.14	Siaga
		Kel. Buluh Kasap, Kec Dumai Timur, Kota Dumai, Riau	Bahaya	3.27	Aman
		Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumut	Bahaya	3.38	Siaga
		Kel Selat Tanjung Medan, Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumut	Bahaya	3.26	Aman
		Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Sumut	Bahaya	3.65	Aman
		Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Kepri	Bahaya	3.48	Siaga
		Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumut	Waspada	3.42	Aman
		Desa Amis, Kec. Cikedung, Indramayu, Jabar	Bahaya	2.31	Waspada

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
		Desa Tugu, Kec. Lelea, Indramayu, Jabar	Bahaya	3.69	Aman
		Desa Tunggul Payung, Kec. Lelea, Indramayu, Jabar	Bahaya	3.50	Siaga
		Desa Sungsang III, Kec. Banyuasin II Kab Banyuasin, Sumsel	Waspada	3.47	Aman
		Desa Jurong, Kec. Sawang, Aceh Utara, Aceh	Waspada	3.63	Siaga
		Desa Pardomuan Kec Panyabungan Timur Kab Madina, Sumut	Bahaya	3.10	Siaga
		Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kalimantan Barat	Bahaya	3.28	Aman
		Kelurahan Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Kalimantan Barat	Bahaya	3.37	Aman
		Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Waspada	2.89	Siaga

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	066	682651	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	87.90	98.48	0.00	0.00	100.00	100.00	77.88	80%	0.00	97.35
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	19.70	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.95		99.24				100.00				

LAMPIRAN 1

Persentase Penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup

No	Nama Satker	Penilaian	Target	Realisasi	Keterangan
A	BNN Prov. Kaltim	Domain Fisik 84,38%	68	82,03	Persentasi berdasarkan nilai domain dari survei kualitas hidup (Whoqol)
		Domain Psikologi 84,38%			
		Domain Sosial 78,13%			
		Domain Lingkungan 81,25%			

LAMPIRAN 2

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

No	Asal Instansi Penyelenggara IBM	NAMA PETUGAS	Instansi Peserta	Penanggung Jawab
1	BNNP Kalimantan Timur	Abdul wahab	Kelurahan nipah-nipah	Syaryadi, S.Kom
2	BNNP Kalimantan Timur	Achmad Fitriady. M	IBM Petung	Achmad Fitriady. M
3	BNNP Kalimantan Timur	Ade Nuriyani	IBM NIPAH - NIPAH	Syaryadi, S.Kom
4	BNNP Kalimantan Timur	Aminuddin	Nipah nipah	Syaryadi, S.Kom
5	BNNP Kalimantan Timur	Anita ahmad	IBM nipah nipah	Syaryadi, S.Kom
6	BNNP Kalimantan Timur	Aurdi Arnic Pesik,A.Md.Kes	Kelurahan Petung	Achmad Fitriady. M
7	BNNP Kalimantan Timur	Baedah	kelurahan Nipah-Nipah	Syaryadi, S.Kom
8	BNNP Kalimantan Timur	Hasanuddin Hamzah	IBM NIPAH NIPAH	Syaryadi, S.Kom
9	BNNP Kalimantan Timur	hasna	kelurahan nipah-nipah	Syaryadi, S.Kom
10	BNNP Kalimantan Timur	Ibrahim	IBM Petung	Achmad Fitriady. M
11	BNNP Kalimantan Timur	Kamrin	Nipah-Nipah	Syaryadi, S.Kom
12	BNNP Kalimantan Timur	M.ilham	IBM KELURAHAN PETUNG	Achmad Fitriady. M
13	BNNP Kalimantan Timur	Mahdalena	Kelurahan Nipah - nipah	Syaryadi, S.Kom
14	BNNP Kalimantan Timur	Mahmud Ajara	IBM NIPAH NIPAH	Syaryadi, S.Kom
15	BNNP Kalimantan Timur	MARLIANA	IBM KELURAHAN PETUNG	Achmad Fitriady. M
16	BNNP Kalimantan Timur	Muchlis M	IBM KELURAHAN PETUNG	Achmad Fitriady. M
17	BNNP Kalimantan Timur	Muhammad Arief Syam	IBM Petung	Achmad Fitriady. M
18	BNNP Kalimantan Timur	Samir	IBM NIPAH NIPAH	Syaryadi, S.Kom
19	BNNP Kalimantan Timur	sultaning	kelurahan Nipah-Nipah	Syaryadi, S.Kom
20	BNNP Kalimantan Timur	Syaryadi, S.Kom	Kelurahan Nipah-Nipah	Syaryadi, S.Kom
21	BNNP Kalimantan Timur	Wahyudi.N	Nipah-Nipah	Syaryadi, S.Kom
22	BNNP Kalimantan Timur	Yusnandi	Nipah-Nipah	Syaryadi, S.Kom
23	BNN Kota Balikpapan	DIVA DEVIANA	IBM MAHARDIKA (KELURAHAN MARGO MULYO)	DIVA DEVIANA
24	BNN Kota Balikpapan	ABDAL	IBM KELURAHAN MARGASARI	DIVA DEVIANA
25	BNN Kota Balikpapan	Armin halim	IBM KELURAHAN MARGASARI	DIVA DEVIANA
26	BNN Kota Balikpapan	Teguh widarto	IBM KELURAHAN MARGO MULYO	DIVA DEVIANA
27	BNN Kota Balikpapan	Ratna Dewi	IBM KELURAHAN MARGO MULYO	DIVA DEVIANA
28	BNN Kota Balikpapan	DARWIS	IBM SEHATI (KEL.MARGASARI)	DIVA DEVIANA
29	BNN Kota Balikpapan	Ghufron Faza	IBM KELURAHAN MARGO MULYO	DIVA DEVIANA

LAMPIRAN 2

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

No	Asal Instansi Penyelenggara IBM	NAMA PETUGAS	Instansi Peserta	Penanggung Jawab
30	BNN Kota Balikpapan	Miftahudin	IBM KELURAHAN MARGO MULYO	DIVA DEVIANA
31	BNN Kota Balikpapan	Meri Suriati	IBM KELURAHAN MARGO MULYO	DIVA DEVIANA
32	BNN Kota Balikpapan	Yusni	IBM KELURAHAN MARGASARI	DIVA DEVIANA
33	BNN Kota Balikpapan	NURLINA	IBM KELURAHAN MARGASARI	DIVA DEVIANA
34	BNN Kota Balikpapan	Juliansyah	IBM KELURAHAN MARGASARI	DIVA DEVIANA
35	BNN Kota Samarinda	H. Rajab	IBM Lima Jaya	H. Rajab
36	BNN Kota Samarinda	Firdaus	IBM Lima Jaya	H. Rajab
37	BNN Kota Samarinda	Ratnasari	IBM Lima Jaya	H. Rajab
38	BNN Kota Samarinda	Khairil Syamsul	IBM Lima Jaya	H. Rajab
39	BNN Kota Samarinda	Rizal	IBM Lima Jaya	H. Rajab
40	BNN Kota Samarinda	Iwan Rifadin	IBM Air Hitam	H. Rajab
41	BNN Kota Samarinda	Heri Setyo	IBM Air Hitam	H. Rajab
42	BNN Kota Samarinda	Raden Joko Wiyose Baskoro	IBM Air Hitam	H. Rajab
43	BNN Kota Samarinda	Ardiansyah	IBM Air Hitam	H. Rajab
44	BNN Kota Samarinda	Denny Zulkarnain	IBM Air Hitam	H. Rajab
45	BNNK BONTANG	D. Khasanah	Belimbing	D. Khasanah
46	BNK Bontang	Mega Puspita Sari	Kelurahan Belimbing	D. Khasanah
47	BNNK Bontang	Indah Nur Rohania	Kelurahan Loktuan	D. Khasanah
48	BNNK Bontang	Fathur Rohman	Belimbing	D. Khasanah
49	BNNK BONTANG	AGIL DWI YULIANTO	KELURAHAN LOKTUAN	D. Khasanah
50	BNNK bontang	yuliani	kelurahan loktuan	D. Khasanah
51	BNNK BONTANG	Alda Dwi Rahayu	IBM Loktuan	D. Khasanah
52	BNNK BONTANG	Irma Damayanti	IBM Loktuan	D. Khasanah
53	BNNK Bontang	Usman	Kelurahan Belimbing	D. Khasanah
54	Bnn kota bontang	Rini sehawati	Kelurahan belimbing	D. Khasanah

LAMPIRAN 3

Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia

No	Fasilitas Rehabilitasi	Alamat	Penanggung Jawab
1.	Puskesmas Baru Tengah Balikpapan	Jl. Letjen Soeprapto No.30 Rt.26, Baru Tengah, Kec. Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim	dr. Wendy

LAMPIRAN 4

Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang operasional

No	Satker / Unit Penyelenggara	Unit IBM	Alamat	Penanggung Jawab
1	BNNP Kalimantan Timur	IBM Petung	Jl. Provinsi Km 8,5 Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur	Achmad Fitriady. M
2	BNNP Kalimantan Timur	IBM Nipah Nipah	Jl. Provinsi Km 18, Giri Mukti, Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur	Syaryadi, S.Kom

LAMPIRAN 5

Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama Satker	Pengisi Survey	Penilaian	Target	Realisasi	Keterangan
A	BNN Prov. Kaltim	Klien Rehabilitasi Rawat Jalan	Sistem, mekanisme & prosedur; waktu pelayanan;	3,42	3,75	-
			Penjelasan biaya/tarif;			
			Produk, spesifikasi jenis layanan yang diberikan;			
			Kompetensi pelaksana layanan;			
			Perilaku pelaksana layanan kepada klien selama program; penanganan pengaduan dan saran yang dilakukan oleh lembaga;			
			Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga sebagai pendukung layanan			

LAMPIRAN 6

DAFTAR JARINGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA YANG BERHASIL DIPETAKAN

No.	Lokasi	Sindikot	Status	Jumlah
1	Tenggarong, Kutai Kartanegara	Jaringan Rizky Als Kiki	tertangkap	1
2	Balikpapan	Jaringan Ambo Aco Als Komeng Haris Als H. Aras	tertangkap	1
3	Balikpapan	Jaringan Rusni	belum tertangkap	1
Total Jumlah Jaringan yang terpetakan				3

LAMPIRAN 7

DAFTAR BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG P-21 TA. 2024

No	Nama	LKN	Satker
1	AM. RIZKY AKBAR, Sos ALS KIKI BIN AZI MUHAMMAD RIZAL	3	BNNP KALIMANTAN TIMUR
2	MUHAMMAD ROBBY ALS OBE BIN ANTONIO (ALM)	3	BNNP KALIMANTAN TIMUR
3	HERI SISWANTO ALS HERI BIN SUYITNO	3	BNNP KALIMANTAN TIMUR
4	BUDI RAHARJO BIN SUMAR (ALM)	4	BNNP KALIMANTAN TIMUR
5	ISKANDAR ALS ANDAR BIN HUSEN	6	BNNP KALIMANTAN TIMUR
6	MUHAMMAD AMBULANI ALS EMBUL BIN SAFI'I	6	BNNP KALIMANTAN TIMUR
7	ASNAN AHMAD MAULANA BIN (ALM) YANSYAH	7	BNNP KALIMANTAN TIMUR
8	DANI IRAWAN BIN TAHER	8	BNNP KALIMANTAN TIMUR
9	MICKHAEL JECK ROTENG	9	BNNP KALIMANTAN TIMUR
10	ALEXANDER DANIEL JEREMY MARPAUNG ANAK DARI TUMPAL RUDI MARPAUNG	9	BNNP KALIMANTAN TIMUR
11	AMBO ENDE ALS AMBO BIN (ALM) SAHARUDIN	11	BNNP KALIMANTAN TIMUR
12	JULIANSYAH ALS KADAL BIN MAKULAHU	12	BNNP KALIMANTAN TIMUR
13	JUMANSYAH ALS BACO BIN LAN	13	BNNP KALIMANTAN TIMUR
14	MINTO ALIANTO BIN YUNTUNG	13	BNNP KALIMANTAN TIMUR
15	SUGIANTO BIN PAJO	13	BNNP KALIMANTAN TIMUR
16	FACHRIAN NOOR ALS RIAN BIN MASERANI	14	BNNP KALIMANTAN TIMUR
17	JAUHARI ABDI ALS ARI BIN H. MASKUR	14	BNNP KALIMANTAN TIMUR
18	HERMANTO BIN (ALM) RAHMAT	16	BNNP KALIMANTAN TIMUR
19	SUMARDI ALS MARDI ALS SULE BIN SUGIMIN	18	BNNP KALIMANTAN TIMUR
20	DWI WISNU WARDANA ALS DWI BIN HERI HELFIAN	19	BNNP KALIMANTAN TIMUR
21	IIS PUJI KARTINI BIN ANTON LUDONG	20	BNNP KALIMANTAN TIMUR
22	ROHAN ALS BIN ABDULLAH M	20	BNNP KALIMANTAN TIMUR
23	REHAN ALS BIN ABDULLAH M	20	BNNP KALIMANTAN TIMUR
24	JEDRI SAMADAN ALS JERRY BIN WAHID	21	BNNP KALIMANTAN TIMUR
25	INDRA HENGKI FAHREZA ANAK DARI AGUSTINUS TRIMURTI	23	BNNP KALIMANTAN TIMUR
26	NOPI KRISTIANA BIN (ALM) DARMANSYAH GALANG	23	BNNP KALIMANTAN TIMUR
27	MUHAMMAD NOVRIAL KAHFI ALS NOVI BIN IBRAMSYAH	26	BNNP KALIMANTAN TIMUR
28	YULIANTHA PALINGGI ST. ALS ANTA BIN JONATHAN PALINGGI	27	BNNP KALIMANTAN TIMUR
29	AM RIZKY AKBAR, S.SOS ALS KIKI BIN AZI MUHAMMAD	27	BNNP KALIMANTAN TIMUR
30	MOHAMMAD ROBBY ALS OBE BIN ANTONIO (ALM)	27	BNNP KALIMANTAN TIMUR
31	SUTRISNO ALS SUTRIS BIN SETU	28	BNNP KALIMANTAN TIMUR
32	MUHAMMAD IQBAL BIN SABARUDDIN	28	BNNP KALIMANTAN TIMUR
33	SYAMSU AFRYZHA ALS CUA BIN ARIFIN (ALM)	29	BNNP KALIMANTAN TIMUR
34	HERMAN ALS EBO BIN DARU (ALM)	29	BNNP KALIMANTAN TIMUR
35	MUHAMMAD SAFARUDDIN ALS KOMENG ALS ACO BIN AMBO ERANG (ALM)	29	BNNP KALIMANTAN TIMUR
36	ISWENDI KARNIAWAN ALS WENDY BIN ISMAIL	30	BNNP KALIMANTAN TIMUR
37	MABE, ADITYA YUDISTIRA ALS MABE BIN KIANDARY HARTAWAN MABE	31	BNNP KALIMANTAN TIMUR
38	RIYANSYAH ALS RIYAN BIN SUKARMAN (ALM)	2	BNNK SAMARINDA
39	RIO RESTU PRAKASIWI BIN BUDI SETIAWAN	10	BNNK SAMARINDA
40	FAHRI ALS AMANG BIN AMIN (ALM)	15	BNNK SAMARINDA
41	IRWAN ALS IWAN BIN ARDIYANSYAH	15	BNNK SAMARINDA
42	ZUNAIIDI BIN JAMRI ACHMADI	17	BNNK SAMARINDA
43	WAHYUDI ALS OJOT BIN KAMARUDDIN	17	BNNK SAMARINDA
44	MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO BIN SUKINO	17	BNNK SAMARINDA
45	SUNARDI, S.Sos ALS NARDI BIN DALLE (ALM)	22	BNNK SAMARINDA
46	ANSAR RIZAL ALS ANSAR BIN SARIFUDIN (ALM)	22	BNNK SAMARINDA
47	WAHYU LAKSONO SETIADI BIN SAMAD (ALM)	1	BNNK BALIKPAPAN
48	RIZQI SETIAWAN ALS ICHI BIN MOHAMMAD DARMAWAN	25	BNNK BALIKPAPAN
49	ANDI WAHYUDI RAHMAN ALS IZZY BIN ANDI MUCHTAR	25	BNNK BALIKPAPAN
50	BAHARUDDIN	24	BNNK BONTANG

BNNP KALTIM	37
BNNK SAMARINDA	9
BNNK BALIKPAPAN	3
BNNK BONTANG	1
	50

LAMPIRAN 8
DATA BARANG BUKTI BNNP KALIMANTAN TIMUR TA. 2024

DATA PENERIMAAN BARANG BUKTI TAHUN 2024										DATA PENGELUARAN BARANG BUKTI TAHUN 2024									
No	Bulan	Jenis Narkotika				Kendaraan Bermotor (Unit)		Uang	HP (Unit)	No	Bulan	Jenis Narkotika				Kendaraan Bermotor (Unit)		Uang	HP (Unit)
		Sabu - Sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Inex/Extasi (gram)	Lain Lain (Ganja Sintetis/Gram)	R2	R4					Sabu - Sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Inex/Extasi (gram)	Lain Lain (Ganja Sintetis/Gram)	R2	R4		
1	JANUARI	24,53						Rp 1.500.000	10	1	JANUARI								
2	FEBRUARI	19,03	1976						3	2	FEBRUARI								
3	MARET	2,3							1	3	MARET								
4	APRIL	19,49				1			1	4	APRIL								
5	MEI	25,53							3	5	MEI	43,56	1976				Rp 1.500.000	13	
6	JUNI	44,11				1			6	6	JUNI	21,79				1			2
7	JULI	514,24						Rp 450.000	4	7	JULI	25,53							3
8	AGUSTUS	41,74							1	8	AGUSTUS								
9	SEPTEMBER		1984,71						1	9	SEPTEMBER								
10	OKTOBER	1064,6				1			6	10	OKTOBER	558,35				1		Rp 450.000	4
11	NOVEMBER	2090,6					1	Rp 3.000.000	4	11	NOVEMBER	41,74	1984,71			1		Rp 3.000.000	2
12	DESEMBER		4115,4						2	12	DESEMBER	3155,2	4115,4				1		12
TOTAL		3846,17	8076,11	0	0	3	1	Rp 4.950.000	36	TOTAL		3846,17	8076,11	0	0	3	1	Rp 4.950.000	36

DATA BARANG BUKTI BNNK SAMARINDA TA. 2024

DATA PENERIMAAN BARANG BUKTI TAHUN 2024										DATA PENGELUARAN BARANG BUKTI TAHUN 2024									
No	Bulan	Jenis Narkotika				Kendaraan Bermotor		Uang	HP (Unit)	No	Bulan	Jenis Narkotika				Kendaraan Bermotor		Uang	HP (Unit)
		Sabu - Sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Inex/Extasi (gram)	Lain Lain (Ganja Sintetis/Gram)	R2	R4					Sabu - Sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Inex/Extasi (gram)	Lain Lain (Ganja Sintetis/Gram)	R2	R4		
1	JANUARI		200			1				1	JANUARI		200			1			
2	FEBRUARI		131							2	FEBRUARI		131						
3	MARET									3	MARET								
4	APRIL									4	APRIL								
5	MEI	0,24						Rp 605.000		5	MEI	0,24						Rp 605.000	
6	JUNI		181,34				1			6	JUNI		181,34				1		
7	JULI									7	JULI								
8	AGUSTUS	50								8	AGUSTUS	50							
9	SEPTEMBER									9	SEPTEMBER								
10	OKTOBER									10	OKTOBER								
11	NOVEMBER	0,8								11	NOVEMBER	0,8							
12	DESEMBER									12	DESEMBER								
TOTAL		51,04	512,34	0	0	1	1	Rp 605.000	0	TOTAL		51,04	512,34	0	0	1	1	Rp 605.000	0

DATA BARANG BUKTI BNNK BALIKPAPAN TA. 2024

DATA PENERIMAAN BARANG BUKTI TAHUN 2024										DATA PENGELUARAN BARANG BUKTI TAHUN 2024									
No	Bulan	Jenis Narkotika				Kendaraan Bermotor		Uang	HP (Unit)	No	Bulan	Jenis Narkotika				Kendaraan Bermotor		Uang	HP (Unit)
		Sabu - Sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Inex/Extasi (gram)	Lain Lain (Ganja Sintetis/Gram)	R2	R4					Sabu - Sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Inex/Extasi (gram)	Lain Lain (Ganja Sintetis/Gram)	R2	R4		
1	JANUARI		2.076						1	1	JANUARI								
2	FEBRUARI									2	FEBRUARI								
3	MARET									3	MARET								
4	APRIL									4	APRIL								
5	MEI									5	MEI		2076						1
6	JUNI									6	JUNI								
7	JULI									7	JULI								
8	AGUSTUS									8	AGUSTUS								
9	SEPTEMBER		2058						2	9	SEPTEMBER								
10	OKTOBER									10	OKTOBER								
11	NOVEMBER									11	NOVEMBER								
12	DESEMBER									12	DESEMBER		2058						2
TOTAL		0	4134	0	0	0	0	Rp -	3	TOTAL		0	4134	0	0	0	0	Rp -	3

DATA BARANG BUKTI BNNK BONTANG TA. 2024

DATA PENERIMAAN BARANG BUKTI TAHUN 2024										DATA PENGELUARAN BARANG BUKTI TAHUN 2024									
No	Bulan	Jenis Narkotika				Kendaraan Bermotor		Uang	HP (Unit)	No	Bulan	Jenis Narkotika				Kendaraan Bermotor		Uang	HP (Unit)
		Sabu - Sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Inex/Extasi (gram)	Lain Lain (Ganja Sintetis/Gram)	R2	R4					Sabu - Sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Inex/Extasi (gram)	Lain Lain (Ganja Sintetis/Gram)	R2	R4		
1	JANUARI									1	JANUARI								
2	FEBRUARI									2	FEBRUARI								
3	MARET									3	MARET								
4	APRIL									4	APRIL								
5	MEI									5	MEI								
6	JUNI									6	JUNI								
7	JULI									7	JULI								
8	AGUSTUS									8	AGUSTUS								
9	SEPTEMBER	7,8							1	9	SEPTEMBER								
10	OKTOBER									10	OKTOBER								
11	NOVEMBER									11	NOVEMBER								
12	DESEMBER									12	DESEMBER	7,8							1
TOTAL		7,8	0	0	0	0	0	Rp -	1	TOTAL		7,8	0	0	0	0	0	Rp -	1

LAMPIRAN 9
DAFTAR TAHANAN BNNP KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

No	Nama Tahanan/ Tersangka	Domisili Tersangka	TKP	LAPORAN KASUS NARKOTIKA		Surat Perintah Penahanan		Ket
				Nomor LKN	Tgl.Masuk Rutan	No. SP Penahanan	Tanggal Penahanan	
1	AM. RIZKY AKBAR, Sos Als KIKI Bin AZI MUHAMMAD RIZAL	Jl. Danau Lipan No.50 Rt.028 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Jl. Biawan No.44 Rt. 14, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513	LKN/0003-NARI/2024/BNNP Kalimantan Timur	15-Jan-24	Sprin-Han/0003/I/2024/BNNP Kalimantan Timur	15-Jan-24	
2	MUHAMMAD ROBBY Als OBE Bin ANTONIO (ALM)	Jl. Cuk Nyak Dien Rt. 4, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Jl. Pesut Rt. 47, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	LKN/0003-NARI/2024/BNNP Kalimantan Timur	15-Jan-24	Sprin-Han/0004/I/2024/BNNP Kalimantan Timur	15-Jan-24	
3	HERI SISWANTO Als HERI Bin SUYITNO	Jl. Mayend Panjaitan Gg.V.No.59 RT.004 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Jl. Pesut Rt. 47, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	LKN/0003-NARI/2024/BNNP Kalimantan Timur	15-Jan-24	Sprin-Han/0005/I/2024/BNNP Kalimantan Timur	15-Jan-24	
4	BUDI RAHARJO Bin (Alm) SUMAR	Jl. Damai Kencana RT.27 Kel. Sido Damai, Kecamatan Samarinda Iir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Jl. Damai Gang Tirta Kencana RT.27 Kel. Sido Damai, Kecamatan Samarinda Iir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	LKN/0004-NARI/2024/BNNP Kalimantan Timur	16-Jan-24	Sprin-Han/0006/I/2024/BNNP Kalimantan Timur	16-Jan-24	
5	ISKANDAR Als ANDAR BIN HUSEN	Bukit Harapan Km.19 (Jl. Poros Tenggarong- Kota Bangun) RT.04, Desa Loa Ipuh Darat, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Bukit Harapan Km.19 (Jl. Poros Tenggarong- Kota Bangun) RT.04, Desa Loa Ipuh Darat, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	LKN/0006-NAR/I/BNNP Kalimantan Timur	18-Jan-24	Sprin-Han/0007/I/2024/BNNP Kalimantan Timur	18-Jan-24	
6	ASNAN AHMAD MAULANA Bin (Alm) YANSYAH	Mendik RT.12 Kel. Mendik Kec. Loangkali Kabupaten Penajam Paser Utara	Jl. Penajam-Kuaro	LKN/0007-NAR/I/BNNP Kalimantan Timur	19-Jan-24	Sprin-Han/0008/I/2024/BNNP Kalimantan Timur	19-Jan-24	
7	DANI IRAWAN Bin TAHER	Jl. Sultan Almutdin RT.31 Kel.Selili Kec. Samarinda Iir Kota Samarinda	Gg. Darna, Selili, Kec. Samarinda Iir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	LKN/0008-NAR/I/BNNP Kalimantan Timur	20-Jan-24	Sprin-Han/0009/I/2024/BNNP Kalimantan Timur	20-Jan-24	
8	ALEXANDER DANIEL JEREMY MARPAUNG Anak Dari TUMPAL RUDY MARPAUNG	Kos Kosan Ginanda Jl. Juanda 2 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda	Jl. Marsma R Iswahyudi Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman	LKN/0009-NAR/I/BNNP Kalimantan Timur	9-Feb-24	Sprin-Han/0010/I/2024/BNNP Kalimantan Timur	9-Feb-24	
9	AMBO ENDE Als AMBO Bin (Alm) SARHUDIN	Jl. Air Terjun lorong 3 blok E8 No. 138, Mangkupalas Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Jl. Air Terjun lorong 3 blok E8 No. 138, Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda	LKN/0011-NAR/I/BNNP Kalimantan Timur	1-Mar-24	Sprin-Han/0012/II/2024/BNNP Kalimantan Timur	1-Mar-24	
10	JULIANSYAH Als KADAL Bin MAKULAHU	Long Kali RT.004, Kel. Long Kali, Kec. Long Kali, Kab. Paser, Kalimantan Timur	Long Kali RT.004, Kel. Long Kali, Kec. Long Kali, Kab. Paser, Kalimantan Timur	LKN/0012-NAR/III/2024/BNNP Kalimantan Timur	1-Mar-24	Sprin-Han/0013/III/2024/BNNP Kalimantan Timur	1-Mar-24	
11	JUMANSYAH Als BACO Bin LAN	Sawit Jaya Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur	Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Samuntai, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur	LKN/0013-NAR/IV/BNNP Kalimantan Timur	22-Apr-24	Sprin-Han/0016/IV/2024/BNNP Kalimantan Timur	22-Apr-24	
12	MINTO ALIANTO Bin YUNTUNG	Sawit Jaya Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur	Drop Point J&T Jl. Negara No.1, Samuntai, Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur	LKN/0013-NAR/IV/BNNP Kalimantan Timur	22-Apr-24	Sprin-Han/0015/IV/2024/BNNP Kalimantan Timur	22-Apr-24	
13	SUGIANTO Bin PAUJO	Sawit Jaya Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur	Sawit Jaya Blok D, RT.05, Desa Sawit Jaya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur	LKN/0013-NAR/IV/BNNP Kalimantan Timur	22-Apr-24	Sprin-Han/0014/IV/2024/BNNP Kalimantan Timur	22-Apr-24	
14	FACHRIAN NOOR Als RIAN Bin MASERANI	Jl. Jelawat Gg. 8 Rt. 3 No. 42 Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Kahoi 7 Rt. 31, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	LKN/0014-NAR/V/BNNP Kalimantan Timur	7-May-24	Sprin-Han/0017/V/2024/BNNP Kalimantan Timur	7-May-24	
15	JAUHARI ABDI Als ARI Bin H.MASKUR	Jl. Merdeka Rt. 95 No.8, Kel. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Merdeka Rt. 95 No.8, Kel. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	LKN/0014-NAR/V/BNNP Kalimantan Timur	7-May-24	Sprin-Han/0018/V/2024/BNNP Kalimantan Timur	7-May-24	
16	HERMANTO BIN (ALM) RAHMAT	Jl. Pariwisata Rt. 7 Rw. 3 No. 29 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara	Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov Kalimantan Timur	LKN/0016-NAR/V/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 26 Mei 2024	26 Mei 2024	Sprin-Han/0021/V/2024/BNNP Kalimantan Timur	29 Mei 2024	
17	DWI WISNU WARDANA Als DWI Bin HERI HELFIAN	Jl. Raudah V Rt. 23 No. - Kel. Teluk Lerong Iir Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Jl. M. Said No. 12A Rt.12 Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda . Kalimantan Timur, (Depan Moue)	LKN/0019-NAR/VI/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 25 Juni 2024	25 Juni 2024	Sprin-Han/0025/VI/2024/BNNP Kalimantan Timur	28 Juni 2024	
18	REHAN AIS BIN ABDULLAH M	JL. DR. SOETOMO RT. 007 KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG	Berbas Pantai, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur	LKN/0020-NAR/VII/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 8 Juli 2024.	08 Juli 2024	Sprin-Han/0028/VII/2024/BNNP Kalimantan Timur	09 Juli 2024	
19	ROHAN AIS BIN ABDULLAH M	JL. DR. SOETOMO RT. 007 KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG	Berbas Pantai, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur	LKN/0020-NAR/VII/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 8 Juli 2024	08 Juli 2024	Sprin-Han/0027/VII/2024/BNNP Kalimantan Timur	09 Juli 2024	
20	IIS PUJI KARTINI BINTI ANTON LUDONG	JL. DR. SOETOMO RT. 007 KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG	Berbas Pantai, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur	LKN/0020-NAR/VII/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 8 Juli 2024	08 Juli 2024	Sprin-Han/0026/VII/2024/BNNP Kalimantan Timur	11 Juli 2024	
21	JEDRI SAMADAN Als JERRI Bin WAHID	Jl. Jakarta gang tuhu monas 8 RT.016 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.	Jl. Kahoi RT.34 Karang Asam Iir, Kec. Sungai Kunjang, Kota samarinda provinsi kalimantan timur	LKN/0021-NAR/VII/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 22 Juli 2024	22 Juli 2024	Sprin-Han/0029/VII/2024/BNNP Kalimantan Timur	25 Juli 2024	
22	INDRA HENGKY FAHREZA Anak dari AGUSTINUS TRIMURTI	Kampung Menomai Jl. Naras Gunaq RT.1 Kec. Barong tongkok kabupaten Kutai Barat provinsi Kalimantan timur	Jl. Naras gunaq RT. 1 kec. Barong tongkok kabupaten Kutai Barat provinsi Kalimantan timur	LKN/0023-NAR/VIII/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 31 Agustus 2024.	30 Agustus 2024	Sprin-Han/0032/IX/2024/BNNP Kalimantan Timur	02 September 2024	

23	Muhammed Novrial Kahfi Als Novi Bin Ibramsyah	Jl.Revolusi Karang Rejo RT.43 Kel. Lok Kec Sungai Kunjang	Jl. Jakarta, Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kantor Lion Parcel)	LKN0026-NAR/IX/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 12 September 2024	12 September 2024	Sprin-Han/0035/IX/2024/BNNP Kalimantan Timur	15 September 2024	
24	YULIANTHA PALINGGI, ST. Als ANTA Bin JONATHAN PALINGGI	Jl. Loa Ipuh Permai No.8A RT.015 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong kab. Kutai Kartanegara Provinsi kalimantan timur	Jl. Kadrie Oening, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Pencucian Mobil CIMALA)	LKN0027-NAR/X/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 3 Oktober 2024.	03 Oktober 2024	Sprin-Han/0036/X/2024/BNNP Kalimantan Timur	06 Oktober 2024	
25	SUTRISNO als SUTRIS bin SETU	Jl. Soekarno Hatta, Km.38, RT.17, Kel. Sungai Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.	Jl. Soekarno Hatta (Halaman Gereja Toraja) Km.41, Kel. Sungai Merdeka, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	LKN0028-NAR/X/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 4 Oktober 2024	04 Oktober 2024	Sprin-Han/0037/X/2024/BNNP Kalimantan Timur	08 Oktober 2024	
26	MUHAMMAD IQBAL bin SABARUDDIN	Dusun Lampe, RT.15, Desa Sungai Seluang, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.	Jl. Mulawarman RT. 22, Kel. Lamaru, Kec. Balkpapan Timur, Kota Balkpapan, Prov. Kalimantan Timur	LKN0028-NAR/X/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 4 Oktober 2024	04 Oktober 2024	Sprin-Han/0038/X/2024/BNNP Kalimantan Timur	08 Oktober 2024	
27	HERMAN Als EBO Bin DARU(AIm)	Jl. Sentosa Gg. Remaja, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Tj. Kuaro Rt. 10, Da. Muara Langon, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	LKN0029-NAR/XI/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 24 November 2024.	23-Nov-24	Sprin-Han/0042/XI/2024/BNNP Kalimantan Timur	26 November 2024	
28	MUHAMMAD SAFARUDDIN Als KOMENG Als ACO Bin AMBO ERANG(AIm)	Jl. Pandan Sari No. 63 Rt. 30 Kel. Marga Sari Kec. Balkpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Pandan Barat Rt. 32, Kel. Marga Sari, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	LKN0029-NAR/XI/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 24 November 2024	23-Nov-24	Sprin-Han/0041/XI/2024/BNNP Kalimantan Timur	26 November 2024	
29	SYAMUS AFRYZHA A Als CUA Bin ARIFIN(AIm)	Perum Talang Sari Regency Blok F No. 19, Kel. Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	I J. Tj. Kuaro Rt. 10, Da. Muara Langon, Kec. Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (perbatasan Kaltim - Kalsel)	LKN0029-NAR/XI/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 24 November 2024	23-Nov-24	Sprin-Han/0040/XI/2024/BNNP Kalimantan Timur	26 November 2024	
30	Iswendi Kariawan Als Wendy Bin Ismail	Jl. Sejati 2 RT.01 No.5 Kel.Sambutan Kota Samarinda	Jl. Jakarta, Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang Kota, Samarinda Kalimantan Timur (Kantor Lion Parcel).	LKN0030-NAR/XII/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 8 Desember 2024.	08 Desember 2024	Sprin-Han/0043/XII/2024/BNNP Kalimantan Timur	11 Desember 2024	
31	MABE, ADITYA YUDISTIRA Als MABE Bin KIANDARY HARTAWAN MABE	Jl. Bengkuring Raya No. 135 Rt. 29 Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Jakarta, Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kantor Lion Parcel)	LKN0031-NAR/XII/2024/BNNP Kalimantan Timur, tanggal 16 Desember 2024.	16 Desember 2024	Sprin-Han/0044/XII/2024/BNNP Kalimantan Timur	19 Desember 2024	

DAFTAR TAHANAN BNNK SAMARINDA TAHUN 2024

No	Nama Tahanan/ Tersangka	Domisili Tersangka	TKP	LAPORAN KASUS NARKOTIKA		Surat Perintah Penahanan		Ket
				Nomor LKN	Tgl.Masuk Rutan	No. SP Penahanan	Tanggal Penahanan	
1	RIYANSYAH Als RIYAN Bin SUKARMAN (AIm)	Jl. Merdeka Timur Gg. III RT.100 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda	Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 jam 17.00 WITA di Kantor Lion Parcel Samarinda Jl. Cendana Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur	LKN/0002- NAR/V/2024/BNN Kota Samarinda	11 Januari 2024	Sprin-Han/0002/VI/2024/BNN Kota Samarinda	14 Januari 2024	P21
2	RIO RESTU PRAKASWI Bin BUDI SETIAWAN	Jl. Ulin Gg.VI Blok C RT.024 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda/ Jl. Kelapa Gading No.41A RT.15 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda	Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 jam 08.00 WITA di Jl. Kelapa Gading No.41A RT.15 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda	LKN/0010-NAR/II/2024/BNN Kota Samarinda	22 Februari 2024	Sprin-Han/0011/II/2024/BNN Kota Samarinda	25 Februari 2024	P21
3	FAHRI Als AMANG Bin AMIN (AIm)	Jl. Lambung Mangkurat Gg. Bakdi RT.42 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda	Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di Jl. Lambung Mangkurat Gg. Bakdi RT.42 (Depan Lorong Pelita 2) Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda	LKN/0015-NAR/V/2024/BNN Kota Samarinda	15 Mei 2024	Sprin-Han/0019/V/2024/BNN Kota Samarinda	18 Mei 2024	P21
4	IRWAN Als IWAN Bin ARDIANSYAH (AIm)	Jl. Gatot Subroto Gg.I RT.43 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda	Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di Jl. Lambung Mangkurat Gg. Bakdi RT.42 (Depan Lorong Pelita 2) Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda	LKN/0015-NAR/V/2024/BNN Kota Samarinda	15 Mei 2024	Sprin-Han/0020/V/2024/BNN Kota Samarinda	18 Mei 2024	P21
5	ZUNAI DI Als CIBOL JAMRI ACHMADI	Jl. Ulin Gg.4 No.45 RT.021 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda	Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 11.00 WITA di Jl. Ulin Gg.4 No.45 RT.021 Kel. Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda	LKN/0017-NAR/VI/2024/BNN Kota Samarinda	31 Mei 2024	Sprin-Han/0024/VI/2024/BNN Kota Samarinda	3 Juni 2024	P21
6	WAHYUDI ALS OJOT BIN KAMARUDDIN	Jl. Letjen R Soeprapto No.18 RT.024 Kel. Api- Api Kec. Bontang Utara Kota Bontang	Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 pukul 11.00 WITA di Jl. DI Panjaitan Depan Perum Citraland Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda	LKN/0017-NAR/VI/2024/BNN Kota Samarinda	01 Juni 2024	Sprin-Han/0023/VI/2024/BNN Kota Samarinda	4 Juni 2024	P21
7	MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO BIN SUKINO	Jl. Catur Perum Bontang Permai Blok.D No.04 RT.007 Kel. Api-API Kec. Bontang Utara Kota Bontang	Pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 pukul 11.00 WITA di Jl. DI Panjaitan Depan Perum Citraland Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda	LKN/0017-NAR/VI/2024/BNN Kota Samarinda	01 Juni 2024	Sprin-Han/0022/VI/2024/BNN Kota Samarinda	4 Juni 2024	P21
8	SUNARDI, S Soe Als NARDI Bin DALLE (AIm)	Jl. Barugae RT.01 RW.01 Kel. Paldi Kec. Matitto Butu Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan/ Jl. Tikora Gg. Angga Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda	Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2024 pukul 21.30 WITA di Jl. Geniyya RT.36 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda	LKN/NAR-0022/VI/2024/BNN Kota Samarinda	31 Juli 2024	Sprin-Han/0030/VIII/2024/BNN Kota Samarinda	3 Agustus 2024	P21
9	ANSAR RIZAL Als ANSAR Bin SARIFUDIN (AIm)	Jl. Tien Soeharto RT.13 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan	Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2024 pukul 21.30 WITA di Jl. Geniyya RT.36 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda	LKN/NAR-0022/VI/2024/BNN Kota Samarinda	31 Juli 2024	Sprin-Han/0039/XI/2024/BNN Kota Samarinda	3 Agustus 2024	Proses Penyidikan

DAFTAR TAHANAN BNNK BALIKPAPAN TAHUN 2024

No	Nama Tahanan/ Tersangka	Domisili Tersangka	TKP	LAPORAN KASUS NARKOTIKA		Surat Perintah Penahanan		Ket
				Nomor LKN	Tgl.Masuk Rutan	No. SP Penahanan	Tanggal Penahanan	
1	WAHYU LAKSONO SETIADI BIN SAMAD (ALM)	Jl. Mekar Sari No. 33 Rt. 29 Kel. Gunung Sari Iir, Kec. Balikpapan Tengah	Drop Point J&T Muara Rapak, Jl. Soekarno Hatta No. 09 Rt. 44, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Kalimantan Timur	LKN/0001-NARI/2024/BNNK Balikpapan, tanggal 1 Januari 2024.	4 Januari 2024	Sprin-Han/0001/I/2024/BNN Kota Balikpapan	4 Januari 2024	
2	RIZQI SETIAWAN ALS ICHI BIN MOHAMMAD DARMAWAN	Jl. Sumber Mulia No. 22 Rt. 62, Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.	Jl. Perumahan Kumala Residence 4 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	LKN/0025-NARI/IX/2024/BNNK Balikpapan, tanggal 12 September 2024.	13-Sep-24	Sprin-Han/0034/IX/2024/BNN Kota Balikpapan	13-Sep-24	

DAFTAR TAHANAN BNNK BONTANG TAHUN 2024

No	Nama Tahanan/ Tersangka	Domisili Tersangka	TKP	LAPORAN KASUS NARKOTIKA		Surat Perintah Penahanan		Ket
				Nomor LKN	Tgl.Masuk Rutan	No. SP Penahanan	Tanggal Penahanan	
1	BARUDDIN BIN (ALM) ABAS	Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur	Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur	LKN/0024-NARI/IX/2024/BNN Kota Bontang, tanggal 11 September 2024.	11-Sep-24	Sprin-Han/0033/IX/2024/BNN Kota Bontang	12-Sep-24	

LAMPIRAN 10. REKAPITULASI ANGGARAN BNNP KALTIM DAN BNNK JAJARAN TA. 20204

Kode	NO	Uraian	KALTIM					BALIKPAPAN					SAMARINDA					BONTANG					TOTAL				
			PAGU	REAL	%	SISA	%	PAGU	REAL	%	SISA	%	PAGU	REAL	%	SISA	%	PAGU	REAL	%	SISA	%	PAGU	REAL	%	SISA	%
			7.902.633.000	7.590.848.131	96,05%	311.784.869	3,95%	1.918.829.000	1.902.780.171	99,16%	16.048.829	0,84%	1.818.009.000	1.786.283.512	98,25%	31.725.488	1,75%	1.511.471.000	1.497.605.257	99,08%	13.865.743	0,92%	13.150.942.000	12.777.517.071	97,16%	373.424.929	2,84%
3236	1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	2.726.419.000	2.447.096.276	89,75%	279.322.724	10,25%	41.778.000	41.778.000	100,00%	0	0,00%	41.497.000	41.497.000	100,00%	0	0,00%	48.366.000	45.994.787	95,10%	2.371.213	4,90%	2.858.060.000	2.576.366.063	90,14%	281.693.937	9,86%
3237	2	Pengembangan Organisasi, Tatakelasa, dan Sumber Daya Manusia	31.000.000	29.971.896	96,68%	1.028.104	3,32%	6.880.000	6.880.000	100,00%	0	0,00%	11.680.000	10.880.000	93,15%	800.000	6,85%	6.487.000	6.487.000	100,00%	0	0,00%	56.047.000	54.218.896	96,74%	1.828.104	3,26%
3238	3	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	24.606.000	24.480.332	99,49%	125.668	0,51%	15.715.000	13.050.200	83,04%	2.664.800	16,96%	4.300.000	2.600.000	60,47%	1.700.000	39,53%	12.508.000	11.777.500	94,16%	730.500	5,84%	57.129.000	51.908.032	90,86%	5.220.968	9,14%
3239	4	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	3.179.915.000	3.169.570.279	99,67%	10.344.721	0,33%	1.321.816.000	1.321.487.337	99,98%	328.663	0,02%	1.226.923.000	1.217.142.112	99,20%	9.780.888	0,80%	920.261.000	920.066.970	99,98%	194.030	0,02%	6.648.915.000	6.628.266.698	99,69%	20.648.302	0,31%
3247	5	Penyelenggaraan Advokasi	115.910.000	115.660.650	99,78%	249.350	0,22%	106.000.000	104.690.000	98,76%	1.310.000	1,24%	90.070.000	85.120.000	94,50%	4.950.000	5,50%	106.000.000	106.000.000	100,00%	0	0,00%					
3248	6	Pengelolaan Pembelajaran Alternatif	77.300.000	73.909.415	95,61%	3.390.585	4,39%															77.300.000	73.909.415	95,61%	3.390.585	4,39%	
3251	7	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	130.000.000	129.934.121	99,95%	65.879	0,05%															130.000.000	129.934.121	99,95%	65.879	0,05%	
3256	8	Pasca-rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	28.250.000	27.409.695	97,03%	840.305	2,97%	4.325.000	3.625.000	83,82%	700.000	16,18%	10.320.000	9.645.000	93,46%	675.000	6,54%	5.765.000	4.925.000	85,43%	840.000	14,57%	48.660.000	45.604.695	93,72%	3.055.305	6,28%
3257	9	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	219.702.000	216.497.840	98,54%	3.204.160	1,46%	145.515.000	143.135.000	98,36%	2.380.000	1,64%	164.160.000	159.910.000	97,41%	4.250.000	2,59%	156.740.000	156.740.000	100,00%	0	0,00%	686.117.000	676.282.840	98,57%	9.834.160	1,43%
3258	10	Penguasaan Tahanan dan Barang Bukti	192.240.000	190.552.893	99,12%	1.687.107	0,88%	43.400.000	43.400.000	100,00%	0	0,00%	23.600.000	23.450.000	99,36%	150.000	0,64%						259.240.000	257.402.893	99,29%	1.837.107	0,71%
3259	11	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	38.630.000	38.624.225	99,99%	5.775	0,01%	14.980.000	14.980.000	100,00%	0	0,00%	10.938.000	10.925.000	99,88%	13.000	0,12%	14.080.000	14.080.000	100,00%	0	0,00%	78.628.000	78.609.225	99,98%	18.775	0,02%
3260	12	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	333.940.000	326.836.288	97,87%	7.103.712	2,13%	98.420.000	93.675.000	95,18%	4.745.000	4,82%	127.371.000	123.394.400	96,88%	3.976.600	3,12%	132.994.000	130.464.000	98,13%	2.480.000	1,87%	692.675.000	674.369.688	97,36%	18.305.312	2,64%
3979	13	Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Keprotokolan	20.000.000	19.825.000	99,13%	175.000	0,88%	10.000.000	7.750.000	77,50%	2.250.000	22,50%	8.200.000	4.800.000	58,78%	3.380.000	41,22%	13.820.000	13.320.000	96,38%	500.000	3,62%	52.020.000	45.715.000	87,88%	6.305.000	12,12%
5354	14	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	621.931.000	619.647.221	99,63%	2.283.779	0,37%	40.000.000	38.499.634	96,25%	1.500.366	3,75%	40.000.000	40.000.000	100,00%	0	0,00%	40.000.000	33.250.000	83,13%	6.750.000	16,88%	741.931.000	731.396.855	98,58%	10.534.145	1,42%
5936	15	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	162.790.000	160.832.000	98,80%	1.958.000	1,20%	70.000.000	69.830.000	99,76%	170.000	0,24%	58.950.000	56.900.000	96,52%	2.050.000	3,48%	54.500.000	54.500.000	100,00%	0	0,00%	346.240.000	342.062.000	98,79%	4.178.000	1,21%
PAGN			1.920.693.000	1.899.904.348	98,92%	20.788.652	1,08%	522.640.000	511.834.634	97,93%	10.805.366	2,07%	525.409.000	509.344.400	96,94%	16.064.600	3,06%	510.029.000	499.959.000	98,03%	10.070.000	1,97%	3.478.771.000	3.421.042.382	98,34%	57.728.618	1,66%
DUKJEMEN			5.981.940.000	5.690.943.783	95,14%	290.996.217	4,86%	1.396.189.000	1.390.945.537	99,62%	5.243.463	0,38%	1.292.600.000	1.276.939.112	98,79%	15.660.888	1,21%	1.001.442.000	997.646.257	99,62%	3.795.743	0,38%	9.672.171.000	9.356.474.689	96,74%	315.696.311	3,26%
RIDANG	UMUM		5.981.940.000	5.690.943.783	95,14%	290.996.217	4,86%	1.396.189.000	1.390.945.537	99,62%	5.243.463	0,38%	1.292.600.000	1.276.939.112	98,79%	15.660.888	1,21%	1.001.442.000	997.646.257	99,62%	3.795.743	0,38%	9.672.171.000	9.356.474.689	96,74%	315.696.311	3,26%
	PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		575.702.000	566.899.905	98,47%	8.802.095	1,53%	321.515.000	317.655.000	98,80%	3.860.000	1,20%	313.180.000	301.930.000	96,41%	11.250.000	3,59%	317.240.000	317.240.000	100,00%	0	0,00%	1.527.637.000	1.503.724.905	98,43%	23.912.095	1,57%
	REHABILITASI		400.820.000	392.870.208	98,02%	7.949.792	1,98%	117.725.000	112.280.000	95,37%	5.445.000	4,63%	148.629.000	143.964.400	96,86%	4.664.600	3,14%	152.789.000	149.469.000	97,83%	3.320.000	2,17%	819.963.000	798.583.608	97,39%	21.379.392	2,61%
	PEMBERANTASAN		944.171.000	940.134.235	99,57%	4.036.765	0,43%	83.400.000	81.899.634	98,20%	1.500.366	1,80%	63.600.000	63.450.000	99,76%	150.000	0,24%	40.000.000	33.250.000	83,13%	6.750.000	16,88%	1.131.171.000	1.118.733.869	98,90%	12.437.131	1,10%
BELANJA	PEGAWAI		2.648.423.000	2.358.381.439	89,05%	290.041.561	10,95%																2.648.423.000	2.358.381.439	89,05%	290.041.561	10,95%
	BARANG		5.254.210.000	5.232.466.692	99,59%	21.743.308	0,41%	1.879.299.000	1.863.268.534	99,15%	16.030.466	0,85%	1.818.009.000	1.786.283.512	98,25%	31.725.488	1,75%	1.511.471.000	1.497.605.257	99,08%	13.865.743	0,92%	10.462.989.000	10.379.623.995	99,20%	83.365.005	0,80%
	MODAL							39.530.000	39.511.637	99,95%	18.363	0,05%											39.530.000	39.511.637	99,95%	18.363	0,05%
SELF BLOKING			15.938.000					15.195.000					18.000.000				13.610.000					62.743.000					
			7.886.695.000	7.590.848.131	96,25%	295.846.869	3,75%	1.903.634.000	1.902.780.171	99,96%	853.829	0,04%	1.800.009.000	1.786.283.512	99,24%	13.725.488	0,76%	1.497.861.000	1.497.605.257	99,98%	255.743	0,02%	13.088.199.000	12.777.517.071	97,63%	310.681.929	2,37%



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Rapak Indah Km.1 No.57 Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda 75126

Telp./Fax. (0541) 6276879

e-mail : bnnp.kalimantantimur@gmail.com

website : kaltim.bnn.go.id